

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SINTANG



**TAPM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh:

**Dra. WARNIDA
NIM. 015283764**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
PONTIANAK
2010**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia Menerima sanksi akademik.

Sintang, 11 Juni 2010

Yang Menyatakan

**(WARNIDA)
NIM.015283764**

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang

Penyusun TAPM : Warnida
NIM : 015283764
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr.Eddy Suratman,MA
NIP.19670707 199202 1 001

Dr.Liestyodono B.I
NIP.19611231 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik

Direktur Program Pascasarjana

Dra. Susanti. M.Si
NIP.19671214 199303 2 002

Prof. Dr. Udin S.Winataputra,MA
NIP.19451007 197302 1 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : WARNIDA
NIM : 015283764
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pelaksanaan
Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program
Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS /TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Penguji Ahli :

Pembimbing I : Dr. EDDY SURATMAN, MA

Pembimbing II : Dr. LIESTYODONO B.I

DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Persetujuan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	1-6
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	7
B. Perumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah.....	7-8
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	
	9-18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18-19
A. Kerangka Teoritik.....	19
B. Kerangka Berpikir.....	
C. Definisi Konsep dan Operasional.....	
	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Desain Penelitian	21-22
B. Populasi dan Sampel	22
C. Instrumen Penelitian	23-24
D. Prosedur Pengumpulan Data	
E. Analisis Data	25-26
 PENUTUP.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN : A. Form. Pengajuan Studi Mandiri	
B. Transkrip Nilai	

ABSTRAK

Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang

Warnida

Universitas Terbuka

warnidasintang@yahoo.co.id

Kata Kunci: Kinerja, Penyuluh KB, Program KB

Seorang petugas lapangan (PKB), pendataan dan pemetaan program KB Nasional merupakan bagian awal dari kegiatan kerjanya yang tidak boleh dilewati begitu saja karena berhasil atau tidaknya pendataan keluarga tergantung pada kinerja PKB itu sendiri. Sehubungan hal tersebut permasalahan dalam penelitian adalah mengenai kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, Camat, Koordinator PKB, LSM pemerhati KB (PKBI Kabupaten Sintang), Kader KB pada Posyandu, serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang tersebar di 14 kecamatan. Adapun instrumen penelitian adalah: (1) Angket, (2) Pedoman wawancara, dan (3) Dokumenter.

Kesimpulan penelitian ini adalah mekanisme pelaporan Program Keluarga Berencana belum berjalan secara optimal. Indikasi hal tersebut adalah Jenis dan tahapan pelaporan belum dilaksanakan secara berjenjang serta belum disusun berdasarkan sasaran, frekuensi laporan dan jangkauan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan Program Keluarga Berencana berkaitan dengan Kualitas Petugas Lapangan Keluarga Berencana masih menghadapi masalah. Dari sisi jumlah, keberadaan personil masih belum memadai. Sedangkan dari aspek kualitas juga masih belum memadai. Masih minimnya anggaran yang dimiliki juga menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan Petugas Lapangan Keluarga.

Saran penelitian ini adalah Mekanisme Pelaporan Program Keluarga Berencana diharapkan dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan RT, RW/Dusun, Desa dan Pemerintah Kecamatan. Selain itu, Petugas Lapangan Keluarga Berencana diharapkan diikutkan dalam kegiatan bimbingan teknis atau diklat mengenai penyusunan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru. Selain itu, kepada para petugas diberikan insentif dan biaya operasional serta sarana penunjang kerja lainnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan TAPM yang berjudul Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pelaksanaan Program keluarga berencana di Kabupaten Sintang. Selesaiannya penulisan tesis ini, juga dikarenakan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
2. Prof.Dr.Udin S.Winataputra,MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran.
3. Ir. Edward Zubir, MM selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Pontianak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
4. Dra. Susanti, M Si selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas arahan dan bimbingan.
5. Prof. Dr. Edy Suratman, selaku Pembimbing Pertama penulisan Tesis ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini
6. Dr. Liestyodono B.I selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan TAPM ini. Beliau dengan teliti dan penuh kesabaran dalam memberikan saran-saran serta masukan demi penyempurnaan tulisan ini.
7. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu

8. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi secara lancar.
9. Drs Milton Crosby, M.Si selaku Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med, Ph selaku Wakil Bupati Sintang serta Drs. H. A. Abdussamad Ismail, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
10. Ir. Veronica Ancili selaku Kepala BKBPP Kabupaten Sintang.
11. Camat se Kabupaten Sintang, Koordinator PKB beserta LSM pemerhati KB (PKBI Kabupaten Sintang)
12. Penyuluh Keluarga Berencana (PKE) yang tersebar di 14 kecamatan.
13. Kedua Orang Tua dan Suami serta anak- anak saya yang tercinta.
14. Rekan-rekan mahasiswa serta handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Sintang, Juni 2010

Penulis

WARNIDA
NIM. 015283764

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	Hal i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
A. Kajian Teoritik	13
1. Kebijakan Program Keluarga Berencana.....	13
2. Pelayanan Publik.....	18
3. Konsep Kinerja.....	22
4. Konsep Keluarga Berencana.....	30
B. Kerangka Pemikiran	50
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 52
A. Desain Penelitian.....	52
B. Definisi Konseptual Variabel.....	53
C. Informan.....	54
D. Instrumen Penelitian.....	54
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Analisis Data.....	56
G. Lokasi Penelitian.....	56
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	 58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang.....	63

1. Mekanisme Operasional Program KB Di Kabupaten Sintang.....	63
a. Kebijakan Dan Strategi.....	63
b. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian.....	66
2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	86
a. Pencatatan Dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi.....	86
b. Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan.....	93
c. Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan Keluarga.....	108
3. Pandangan Informan Kunci Tentang Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang	120
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang.....	124
1. Kualitas Petugas.....	124
2. Kuantitas Petugas.....	126
3. Anggaran Serta Sarana Dan Prasarana.....	126
4. Informasi Dan Metode.....	127
5. Partisipasi Masyarakat.....	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	50
Gambar 4.1.	Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang	62
Gambar 4.2.	Mekanisme Pengelolaan Operasional Program KB	65
Gambar 4.3.	Mekanisme Kegiatan Operasional Program KB Lini Lapangan Tahap Awal	78
Gambar 4.4.	Mekanisme Kegiatan Operasional Program KB Tahap Perkembangan	79
Gambar 4.5.	Pola Pembinaan Wilayah Operasional Petugas Lapangan KB	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1. Prevalensi peserta KB aktif di Kabupaten Sintang dari tahun 2007 - 2009	6
Tabel 1.2. Peserta KB aktif di Kabupaten Sintang dari tahun 2005 - 2009	7
Tabel 1.3. Perolehan peserta KB baru di Kabupaten Sintang dari tahun 2005 - 2009	8
Tabel 4.1. Peran Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kabupaten	68
Tabel 4.2. Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kecamatan	71
Tabel 4.3. Penyelenggaraan Program KB Tingkat Desa/Kelurahan	73
Tabel 4.4. Pertemuan Koordinasi Teknis Kegiatan Program KB	75
Tabel 4.5. Forum Pertemuan Koordinasi Manajemen Lintas Sektor	75
Tabel 4.6. Kegiatan Pengendalian Program KB	77
Tabel 4.7. Rapat Pimpinan Dalam Pengelolaan Operasional Program KB	81
Tabel 4.8. Rapat Koordinasi Dalam Pengelolaan Operasional Program KB	82
Tabel 4.9. Pertemuan Telaah Staf Paripurna Dalam Pengelolaan Operasional Program KB	83
Tabel 4.10. Pertemuan Teknis Dalam Pengelolaan Operasional Program KB	84
Tabel 4.11. Sarasehan Dalam Pengelolaan Operasional Program KB	85
Tabel 4.12. Penyediaan Data Bulanan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB	86
Tabel 4.13. Penyediaan Data Tahunan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB	88
Tabel 4.14. Jenis Dan Kegunaan Kartu, Register, Formulir Pelayanan Kontrasepsi di Kabupaten Sintang	89

Tabel 4.15.	Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB	93
Tabel 4.16.	Penyediaan Data Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB	94
Tabel 4.17.	Penyediaan Data Tahunan Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB	96
Tabel 4.18.	Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB	97
Tabel 4.19.	Jenis-Jenis Dan Kegunaan Formulir Pengendalian Lapangan di Kabupaten Sintang	98
Tabel 4.20.	Penyediaan Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB	108
Tabel 4.21.	Frekuensi Penyampaian Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB Oleh PKB	110
Tabel 4.22.	Pemanfaatan Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB	111
Tabel 4.23.	Pelaksanaan Pemetaan Dan Pendataan Keluarga Di Kabupaten Sintang	113
Tabel 4.24.	Tingkat Pendidikan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang	123
Tabel 4.25.	Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang Tahun 2009	124
Tabel 4.26.	Jumlah Anggaran Penunjang Kegiatan Pelaporan Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang Tahun 2008	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Transkrip Hasil Kuesioner
Lampiran 4	Transkrip Hasil Wawancara Kepala BKBPP
Lampiran 5	Transkrip Hasil Wawancara Camat
Lampiran 6	Transkrip Hasil Wawancara Koordinator PKB dan PKBI Kabupaten Sintang

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Berencana Nasional (KBN) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk atau masyarakat, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak ideal, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Perubahan Visi Program KB Nasional dari Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) menjadi Menuju Keluarga Berkualitas 2015 serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Misi Program KB semakin luas.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka tujuan pembangunan keluarga berencana adalah meningkatkan kualitas program keluarga berencana untuk memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran agar terwujud keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yang pada akhirnya menuju keluarga yang berkualitas.

Dengan ditunjang ketersediaan data mikro yang tertuang dalam lembaran data Demografi dan Keluarga Berencana, Tahapan Keluarga Sejahtera serta Data Anggota Keluarga yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang

keadaan dilapangan sampai ketingkat keluarga, sehingga hasil-hasil pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dapat digunakan untuk kepentingan operasional langsung dilapangan serta untuk kepentingan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkat wilayah.

Menyadari arti pentingnya program keluarga berencana tersebut, maka kebijakan pembangunan nasional yang diimplementasikan dengan kebijakan di daerah secara aktual harus tercantum dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten/kota.

Kabupaten Sintang sebagai bagian integral Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang tanggap untuk segera mengimplementasikan kebijakan nasional tersebut dengan mencantumkannya dalam salah satu butir Rencana Strategis Pembangunan Daerah yang merupakan break down dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten. Sebagai daerah pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur provinsi Kalimantan Barat, maka prioritas pembangunan yang salah satunya dititikberatkan dengan pembangunan sumber daya manusia merupakan pilihan yang sangat tepat.

Secara geografis, Kabupaten Sintang terletak di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatuistiwa. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² yang secara administratif batas wilayah Kabupaten Sintang meliputi :

- Utara : Kab. Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
- Selatan : Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, Kab. Sanggau dan Kab. Ketapang.
- Timur : Propinsi Kalimantan Tengah, Kab. Sanggau dan Kab. Kapuas Hulu.
- Barat : Kab. Ketapang, Kab. Sanggau, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan Data Kabupaten Sintang Dalam Angka tahun 2008, Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang tahun 2007 berjumlah 357.479 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 181.652 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 175.827 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2000 – 2007 tercatat rata-rata 2,01 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2006) yang besarnya rata-rata 1,84 persen per tahun.

Badan Keluarga Berencana Kabupaten Sintang sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah di Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 636 Tahun 2003 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan pengelolaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera serta tugas lainnya yang dilimpahkan Kepala Daerah. Salah satu tugas yang dilimpahkan tersebut, adalah pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB yang semula hanya mencakup informasi tentang KB diperluas dengan informasi tentang demografi dan keluarga sejahtera, sehingga namanya berubah menjadi pendataan keluarga.

Dalam upaya melaksanakan tugas Badan Keluarga Berencana Kabupaten Sintang, masih menghadapi permasalahan. Menurut Bappeda Kabupaten Sintang (2005:27) permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk. Meskipun mengalami penurunan, Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Sintang masih tergolong tinggi, yaitu 2,25 per wanita usia produktif.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dan remaja tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi. Keikutsertaan PUS ber KB di Kabupaten Sintang baru mencapai 74,1% dari 58.511 PUS. Remaja yang tidak tahu tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi sebanyak 65.8%.
3. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB di Kabupaten Sintang masih sangat rendah. Sampai dengan Agustus 2005 jumlah Pria dalam ber KB baru mencapai 266 dari 58.511 PUS (0,61%).
4. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga. Kondisi lemahnya ekonomi keluarga mempengaruhi daya beli termasuk kemampuan membeli alat dan obat kontrasepsi. Keluarga miskin pada umumnya mempunyai anggota keluarga cukup banyak. Kemiskinan menjadikan mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya. Jumlah keluarga miskin (Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 dengan alasan ekonomi) di Kabupaten Sintang pada tahun 2004 ada sebanyak 19.532 keluarga (25,12%).
5. Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintah, dan pembangunan yang berkelanjutan. Penataan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dimulai sejak tahun 1960-an, namun hingga saat ini belum terwujud. Di sisi lain peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan yang akan melangkapi Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan belum tersedia. Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasipun belum memadai. Demikian pula, bank data sebagai data basis kependudukan belum tersedia.

Guna mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas tersebut di atas, menurut Bappeda Kabupaten Sintang (2005:28) telah disusun sasaran pokok sebagai berikut :

1. *Total Fertility Rate* (TFR) menurun menjadi 2,00 per wanita usia subur.

2. Menurunnya PUS yang tidak terlayani (*ummet needs*) dan meningkatnya partisipasi pria dalam ber KB diikuti dengan peningkatan jumlah PUS yang ber KB secara mandiri
3. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuhkembang anak, pembinaan anak remaja dan optimalisasi kegiatan lansia.
4. Meningkatnya jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif
5. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
6. Tersedianya data mikro keluarga untuk kepentingan upaya peningkatan penyelenggaraan keluarga berkualitas.
7. Meningkatnya cakupan jumlah Kecamatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya, menurut Bappeda Kabupaten Sintang (2005:28) kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga, diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga berkualitas dengan :

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, peningkatan KIE bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi dan melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi
2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja.
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera-1, peningkatan kualitas lingkungan keluarga
4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
5. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatnya kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk.

Data dan informasi hasil pendataan keluarga selain digunakan untuk keperluan operasional Program KB Nasional sendiri juga dimanfaatkan sebagai data basic oleh stake holder pengambil kebijakan pembangunan lainnya, khususnya untuk menentukan sasaran program pemberian bantuan kepada keluarga miskin dan tidak mampu. Untuk mendukung semua program pendataan diatas, diperlukanlah petugas atau pengelola di tingkat lini lapangan yang dikenal dengan sebutan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana). PKB berkedudukan di desa atau di kelurahan dengan tugas , wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB Nasional serta kegiatan program pembangunan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

Prevalensi peserta KB aktif di Kabupaten Sintang dari tahun 2007 - 2009 semua telah mencapai target yang ditetapkan. Prevalensi peserta KB aktif dari tahun 2005 – 2009 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Prevalensi peserta KB aktif di Kabupaten Sintang dari tahun 2007 - 2009

Indikator	2007	2008	2009
Prevalensi peserta KB aktif	74,84%	72,13%	71,50%

Sumber: BKBPP Kabupaten Sintang, 2010.

Terlihat terjadi penurunan prevalensi peserta KB aktif di tahun 2009 dibandingkan tahun 2008, namun upaya untuk menjadikan prevalensi peserta KB aktif mendekati 100,00% terus di upayakan secara serius dan terpadu di jajaran

Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Peserta KB aktif dari tahun 2005 - 2009 semua telah mencapai target yang ditetapkan. Peserta KB aktif dari tahun 2005 – 2009 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2. Peserta KB aktif di Kabupaten Sintang dari tahun 2005 - 2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Peserta KB aktif	46.547	42.514	46.779	46.840	47.481

Sumber: BKBPP Kabupaten Sintang, 2010.

Terlihat tren yang merata setiap tahun. Namun, pada tahun 2006 terjadi penurunan jumlah peserta KB aktif hingga ke 42.514 orang. Tren yang positif ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Upaya peningkatan peserta KB aktif di koordinasikan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang guna mencegah membludaknya angka kelahiran bayi.

Perolehan peserta KB baru dari tahun 2005 - 2009 semua telah mencapai target yang ditetapkan, pencapaian terendah terjadi di tahun 2007. Perolehan peserta KB baru dari tahun 2005 – 2009 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3. Perolehan peserta KB baru di Kabupaten Sintang dari tahun 2005 - 2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Perolehan peserta KB baru	5.280	7.558	6.652	8.051	8.419

Sumber: BKBPP Kabupaten Sintang, 2010.

Terlihat adanya kecenderungan peningkatan perolehan peserta KB baru di tahun 2008 dan tahun 2009, pencapaian perolehan peserta KB baru ini harus dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Usaha mempertahankan perolehan peserta KB baru tersebut tetap perlu di upayakan secara serius dan terpadu di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Perkembangan program KB Nasional menuntut tersedianya data yang cepat, tepat dan benar, salah satu item tugas dari PKB adalah pemetaan dan pendataan. Pendataan dan pemetaan ini merupakan suatu keharusan dalam langkah-langkah awal penggarapan program KB Nasional di suatu wilayah kerja dalam rangka menjabarkan kebijakan dan menetapkan strategi kegiatan operasional secara tepat serta melaksanakan evaluasi keberhasilan program. Bagi seorang petugas lapangan (PKB), pendataan dan pemetaan program KB Nasional merupakan bagian awal dari kegiatan kerjanya yang tidak boleh dilewati begitu saja karena berhasil atau tidaknya pendataan keluarga tergantung pada kinerja PKB itu sendiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas petugas lini lapangan dimaksud salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan penilaian. Melalui kegiatan penilaian bukan saja akan dapat mengetahui tingkat kualitas seorang petugas / tenaga yang bersangkutan, tetapi lebih jauh akan dapat mendorong petugas / tenaga yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri.

Selanjutnya agar penilaian yang dilakukan dapat terlaksana secara obyektif serta berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan adanya indikator kualitas bagi petugas lini lapangan. Salah satu indikator penilaian bagi petugas lapangan terdiri dari berbagai aspek diantaranya aspek kemampuan managerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan dan evaluasi.

Ditinjau dari kelima aspek yang tercakup dalam aspek kemampuan managerial tersebut, penulis lebih menitik beratkan kepada point pencatatan dan pelaporan, karena kemampuan pencatatan dan pelaporan dapat dilihat dari kemampuan seorang petugas lapangan dalam mencatat dan melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) termasuk didalamnya tentang pendataan keluarga, ketelitian mencatat, ketepatan penyampaian laporan, pembuatan umpan balik laporan serta upaya pengolahan dan penyajian data.

Aspek kemampuan managerial dianggap penting karena data yang dihasilkan merupakan data based yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bidang kependudukan, maka seorang petugas lapangan dituntut untuk lebih aktif agar hasil yang didapat akan lebih maksimal dan informasi perkembangan dilapangan dapat

dideteksi secara dini. Maraknya kasus gizi buruk yang disebabkan oleh kurangnya akses keluarga miskin pada sumber daya ekonomi, menjadi pusat perhatian pemerintah dan secara nasional hal tersebut menjadi salah satu prioritas untuk segera diantisipasi.

Salah satu *based point* dalam menunjang keberhasilan program pengentasan kemiskinan tersebut, maka data yang akurat dan penyampaiannya tepat waktu sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan keluarga serta sebagai data based untuk menetapkan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur. Menyadari pentingnya data yang dihasilkan tersebut, maka tingkat akurasi data dan ketepatan waktu penyampaiannya menjadi *landing point* keberhasilan arah dan sasaran pembangunan kabupaten.

Bila dikaitkan dengan kenyataan yang ada ternyata harapan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian dan ketepatan penyampaian laporan belum sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

Kondisi demikian yang mendorong penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pendataan keluarga oleh PKB dalam melaksanakan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang. Untuk itu, penulis mencoba menganalisa hal tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul : ***"Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang"***.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah tersebut, guna mencapai penelitian yang tidak melebar terlalu jauh, dalam penelitian ini hanya membatasi masalah penelitiannya pada kinerja pendataan keluarga oleh PKB dalam melaksanakan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang. Dari pembatasan tersebut rumusan masalah penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang”.

Dari perumusan masalah tersebut diperinci ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam melaksanakan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan ini nantinya adalah :

1. Untuk menjelaskan kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam melaksanakan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun secara teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Praktis :

Secara praktis manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat menjadi masukan bagi Badan Keluarga Berencana (BKB) Kabupaten Sintang khususnya dan Pemerintah Kabupaten Sintang umumnya, serta sekaligus pula sebagai bahan pertimbangan bagi BKB Kabupaten Sintang dalam peningkatan kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

2. Secara Akademik :

Sebagai wujud aplikatif dari teori-teori metodologi penelitian, dan sekaligus sebagai wahana untuk menamahi khasanah ilmu administrasi negara khususnya pada aspek manajemen sumber daya manusia dan ilmu administrasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Kebijakan Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Memperhatikan uraian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan pembangunan dan kebijakan publik menurut Suharto (2006:1): Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu, kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam program dan proyek.

Menurut Dye (dalam Thoha, 1993:60) kebijaksanaan negara merupakan: *is whatever governments choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah akan mempunyai

pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari definisi di atas, konsekuensinya adalah kebijakan publik itu lebih banyak mengedepankan peran negara atau pemerintah. Anderson (dalam Wahab, 1997:3) mengatakan: *Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials* (kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Anderson (dalam Wahab, 1997:3), implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah: (1) bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau akan menyatakan akan melakukan sesuatu; (4) bahwa kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif – dalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan (5) bahwa kebijaksanaan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Definisi lain dikemukakan oleh Jenkins (dalam Wahab, 1997:4), mengatakan kebijakan negara adalah: *A set interrelated decisions taken by a political actor or*

group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve (serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

David Easton (dalam Islamy, 1988:19), memberikan arti kebijaksanaan negara sebagai: *the authoritative allocation of values for the whole society* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan definisi ini ditegaskan hanya bahwa pemerintahlah yang secara syah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Dari beberapa pengertian kebijakan negara tersebut di atas, bagaimanapun rumusannya pada hakekatnya bahwa kebijakan negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Seseorang atau kelompok aktor politik harus senantiasa memasukkan pikiran-pikiran publik dalam wacana politiknya, dan bukan hanya pikirannya atau kemauannya semata-mata sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,

baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Islamy (1997:107) mengatakan bahwa, suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian, jika mereka tidak berbuat atau bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu maka kebijakan negara menjadi tidak efektif. Grindle (dalam Wahab, 1997:127) menyebutkan proses implementasi kebijakan yang efektif hanya dapat dimulai apabila : a) tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; b) program-program aksi telah dirancang dan; c) sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan negara boleh dikatakan sekedar retorika atau slogan politik belaka.

Menurut Mayer dan Greenwood (dalam Wahab, 1997:129) ada empat tinjauan yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan ciri-ciri dari penelitian kebijakan yaitu: dari segi tujuannya, kontekstualnya, pendekatannya dan waktu pelaksanaannya. Dari segi tujuannya, penelitian kebijakan adalah untuk menghasilkan alternatif untuk membantu mengambil kebijakan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan itu. Dilihat dari sisi kontekstualnya, penelitian kebijakan selalu mendudukan masalah penelitian dalam lingkungan kontekstualnya yang kongkrit sehingga alternatif

kebijakan yang dihasilkan juga lebih kongkrit untuk diterapkan. Dari aspek pendekatannya, maka penelitian kebijakan adalah kombinasi antara pendekatan empirik (untuk melihat fakta), evaluatif (untuk melihat nilai) dan normativ (untuk melihat keterlaksanaannya).

Salah satu kebijakan khusus Program KB Nasional adalah meningkatkan kualitas data dan informasi melalui rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penilaian, penyajian dan penyebarluasan, pemanfaatan sampai dokumentasi dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hubungan tersebut, menurut Siagian (1988:118) “lancar tidaknya pembangunan nasional ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat administratif. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur administratif yang tangguh merupakan sasaran dari pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan”.

Dikatakan Siagian (1988:118) “pada hakekatnya infrastruktur administrasi yang mutlak harus dibangun dalam rangka pembangunan adalah, pegawai negeri, struktur organisasi, serta sistem dan prosedur kerja”. Selanjutnya, Siagian (1988:129) menyatakan sasaran pembangunan administratif di bidang sistem dan prosedur kerja adalah penyederhanaan, yang meliputi bidang-bidang: “(1) pengawasan dan pemeriksaan, (2) pencatatan dan pelaporan, (3) penyimpanan dokumen, serta (3) pertanggungjawaban keuangan”.

2. Pelayanan Publik

Sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah merupakan suatu proses dari usaha-usaha memberdayakan potensi secara terencana untuk diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bermakna bahwa kegiatan Pembangunan Daerah yang dilakukan secara terencana lebih dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam merefleksikan upaya nyata memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Menurut Moenir (1992:80) “pelayanan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sifatnya berwujud atau tidak berwujud yang dilakukan untuk melayani konsumen dengan memberikan barang atau jasa disertai atau tanpa disertai pemindahan kepemilikan atau suatu benda atau jasa tertentu. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusdiklat BPPK, 2000:7) yang dimaksud dengan pelayanan adalah: “Perihal atau cara melayani. Melayani yaitu membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang”.

Dalam hubungan tersebut menurut Soepodo (2003:12), “pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan institusi yang mempresentasikan tugas dan fungsi pemerintah/negara terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Dalam konteks saat ini, pelayanan publik selain memang merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan (kredibilitas) birokrasi pemerintah.

Menurut Ashari (2003:45), secara teoritik beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pelayanan publik dapat efektif yaitu:

1. Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik (memenuhi *performance*)
2. Isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan (*need*) dari masyarakat. Persyaratan ini berhubungan dengan utilitas fasilitasi pelayanan publik
3. Masyarakat mempunyai *trust* atau kepercayaan kepada organisasi penyelenggara pelayanan publik (terkait dengan partisipasi dan komitmen sosial)
4. Organisasi pelayanan publik harus selalu dan siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan (nilai-nilai baru dalam pelayanan publik). Persyaratan ini menyangkut persoalan *resvonsiveness*.

Menurut Damar (2003:45), pelayanan publik antara lain terdiri dari:

1. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pertolongan untuk kelompok miskin.
2. Pelayanan administrasi seperti KTP, akte kelahiran, kematian, perizinan dan sertifikasi
3. Pelayanan penyediaan sarana dan prasarana baik untuk kegiatan sosial maupun ekonomi
4. Pelayanan penyediaan lapangan pekerjaan
5. Pelayanan perlindungan dan keamanan

Salah satu pelayanan publik yang mendapat banyak sorotan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang semakin meningkat. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan jumlah penduduk, sehingga melahirkan tuntutan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang lebih baik dan berkualitas di tengah masyarakat.

Berbicara mengenai Penduduk dengan sendirinya akan membawa konotasi yang luas karena pengertian dari Penduduk itu dapat ditafsirkan bermacam-macam tergantung dari sisi mana melihatnya. Penduduk dapat didefinisikan sebagai bagian dari kelompok Masyarakat yang berdomisili disuatu Wilayah/tempat tertentu. Jika dilihat dari pengertian yang lebih luas lagi, Penduduk dapat dibedakan menjadi bermacam-macam ada yang disebut Penduduk Dunia, Penduduk Indonesia, Penduduk

Kalimantan Barat, Penduduk Sintang dan lain sebagainya. Berbeda dengan pengertian Warga Negara, Warga Negara adalah Penduduk Negara dan Orang Asing yang disahkan menurut Undang-Undang sebagai Warga Negara. Sedangkan kalau dilihat dari cara memperoleh Kewarganegaraan kita mengenal ada 2 (dua) Azas yaitu Azas Ius Soli dan Ius Sangiunis. Ius Soli adalah Kewarganegaraan yang diperoleh karena keturunan, sedangkan Ius Sangiunis adalah Kewarganegaraan yang diperoleh atas permintaan atau sebagai penghargaan.

Secara umum atau hampir setiap Negara di Dunia ini masalah Penduduk dan Kewarganegaraan merupakan masalah yang prinsip dan diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus untuk mengatur permasalahan tersebut, hal ini dimaksudkan selain untuk Tertib Administrasi Kependudukan juga merupakan pondasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan diberbagai bidang, baik bidang Sosial Budaya maupun dibidang Pertahanan Keamanan.

Mengingat begitu pentingnya masalah Kependudukan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, khususnya untuk di Negara RI secara khusus telah diatur didalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26 (setelah Diamandemen) menyatakan : Ayat (1) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat (2) hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang. Jadi yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia dan orang-orang asing yang ditetapkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara RI.

Berkenaan dengan permasalahan Penduduk kebijakan-kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan, seperti setiap tahun diadakan Sensus Penduduk, Laporan Penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mengetahui identitas seseorang, setiap Warga yang usinya sudah 16 Tahun keatas atau sudah pernah kawin diwajibkan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), melalui Kartu yang sangat sederhana inilah identitas seseorang dapat diketahui juga berfungsi sebagai alat bukti pertama sebagai Warga Negara. Lebih jauh Warga Negara diwajibkan punya KK (Kartu Keluarga) ini dimaksudkan untuk bagian dari Keluarga siapa dan siapa Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Dan lebih lengkap lagi setiap anak yang baru lahir diwajibkan mempunyai Akte Kelahiran, sebab melalui Akte Kelahiran seseorang tercatat status Hukum seseorang yang terdiri dari tempat tanggal lahir, nama lengkap, anak ke berapa dari hasil perkawinan Suami Istri siapa, dan seterusnya.

Menurut Islamy (1999:10), "*Public administration* tidak lagi secara tradisional diartikan semata-mata bersifat kelembagaan, tetapi hubungannya dengan seberapa besar pengaruh/kaitan lembaga tersebut dengan kepentingan publik". Tekanan pengertian publik disini adalah "pengguna jasa pelayanan" yang dilakukan oleh pelayan publik, dalam hal ini adalah pegawai Pemerintah. "Para pengguna jasa pelayanan publik yang konkrit adalah mereka yang langsung menerima atau menikmati jasa pelayanan publik, sekalipun demikian secara konseptual para calon pengguna jasa dan para pengguna jasa pelayanan publik dimasa datang juga termasuk kategori ini" (Wahab, 1998: 70).

Selanjutnya Wahab (1998:23) menjelaskan bahwa “kecenderungan global menunjukkan pemberian pelayanan publik yang kompetitif dan berkualitas kepada rakyatnya akan terus dituntut”. Lebih lanjut dinyatakan, kecenderungan global menunjukkan bahwa pemberian pelayanan yang semakin baik pada sebagian besar rakyat merupakan salah satu tolak ukur bagi kredibilitas dan sekaligus kepastian politik pemerintah dimanapun. Sebenarnya yang dimaksud pelayanan publik adalah pendekatan seutuhnya seorang pegawai instansi kepada masyarakat untuk bersikap menolong, bersahabat dan profesional yang bisa memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk memohon pelayanan berikutnya (Waworuntu, 1997 : 22).

Bagaimana upaya pelayanan publik agar masyarakat merasakan keadilan sosial dan musyawarah mufakat dalam Pancasila terefleksikan dalam *public service*. “Pada aparatur pelayanan publik harus berada dalam rel kemanusiaan, yang diharapkan berwajah humanis sekaligus akuntabel pada rakyat, semakin dekat dengan rakyat dan tidak malah menjauhi rakyat” (Wahab, 1998 : 9). Disinilah kemampuan aparatur negara dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan dari setiap individu yang dilayani.

3. Konsep Kinerja

Menurut Irawan (dalam BKN, 2001:4) “kinerja adalah terjemahan dari *performance* yang berarti perbuatan prestasi atau sebagai perbuatan yang berdayaguna”. Dalam konteks khusus, pengertian kinerja atau *performance* sebagai hasil kerja seorang pekerja, menurut (BKN, 2001:4) adalah “sebuah proses

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara kongkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standart yang telah ditentukan)".

Pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Ruky, (2002:14-15), menyatakan bahwa "istilah kinerja atau prestasi kerja sebenarnya adalah pengalihbahasaan dari bahasa Inggris yaitu "*Performance*" yang memiliki tiga arti kata yaitu :(1) Prestasi yang digunakan dalam konteks atau kalimat misalnya tentang "mobil yang sangat cepat ("*high performance car*")", (2) Pertunjukan yang biasanya digunakan dalam kalimat "*Folk Dance Performance*" "atau Pertunjukan Tari-tarian Rakyat", dan (3) Pelaksanaan Tugas misalnya dalam kalimat "*In performing his/her duties*"

Selanjutnya Ruky (2002:15) mempertegas pengertian "*performance*" atau prestasi sebagai berikut : "Prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu". Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kinerja ditekankan kepada hasil atau apa yang keluar (*outcomes*) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi seorang atau kelompok pegawai pada organisasi. Hal ini juga sejalan dengan pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Suryadi (1999:2) bahwa "kinerja sebagai hasil atau output yang dicapai oleh seseorang dalam organisasi, dalam kerangka mencapai tujuan organisasi". Pencapaian tujuan organisasi dilakukan berdasarkan hukum dan perundangan yang berlaku, legal, serta sesuai dengan moral dan etika.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya salah satu indikator penentu adalah tingkat produktivitas kerjanya yang dipengaruhi oleh tingkat kinerja

para pegawai secara individu-individu. Karena semakin tinggi tingkat kinerja individu pegawai akan mengakibatkan tingkat kinerja organisasi semakin tinggi pula yang pada akhirnya tercapai tingkat produktivitas kerja organisasi yang tinggi.

Kinerja merupakan bagian dari manajemen kinerja, untuk perlu dipahami pula mengenai manajemen kinerja. Manajemen Kinerja dapat diartikan sebagaimana diutarakan oleh Bacal (2001 : 3) adalah “Proses komunikasi yang berlangsung terus menerus, yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan, antara seseorang dengan penyelia langsungnya”. Manajemen kinerja berorientasi kepada pemahaman tentang :

1. Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan
2. Seberapa besar kontribusi pekerjaan karyawan bagi pencapaian tujuan organisasi
3. Apa arti konkretnya “melakukan pekerjaan yang baik”
4. Bagaimana karyawan dan penyeliannya bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja karyawan yang sudah ada sekarang
5. Bagaimana prestasi kerja akan di ukur
6. Mengenali berbagai hambatan kinerja dan menyingkirkannya

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa manajemen kinerja adalah merupakan suatu sistem kerja sama antara pribadi untuk membuat setiap orang menjadi lebih baik, yang mengakibatkan kemungkinan keberhasilan organisasi semakin besar. Menurut Mahsun (2006:21) pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Dijelaskan pula oleh Mahsun (2006:22) “pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan”. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Menurut Mangkunegara (2005:44) “untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya”. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menurut Irawan (dalam BKN, 2001:6) “ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa

indikator hasil (*outcomes*)”. Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan menurut Irawan (dalam BKN, 2001:8) mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Guna memahami sejauhmana kinerja pegawai dalam suatu organisasi tidaklah hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab atau tugas dengan baik, tetapi kinerja pegawai dalam lingkup organisasi memerlukan beberapa ukuran-ukuran kinerja tertentu. Menurut Nawawi (1998 : 248), “penilaian kinerja sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan yang sangat luas, karena berkaitan dengan banyak kegiatan sumber daya manusia lainnya”. Dan penilaian kinerja menurut Dessler (1997:2) merupakan:

Sebagai prosedur apa saja yang meliputi: 1) penetapan standar kerja; 2) penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar ini; dan 3) memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya proses penilaian bagi kinerja pegawai sebagai suatu akibat penetapan standar kinerja yang baik demi tercapainya suatu tujuan organisasi.

Dalam memberikan penilaian tentu harus memahami mengapa penilaian itu penting dalam lingkungan organisasi. Dessler (1997:2) mengemukakan beberapa alasan pentingnya suatu penilaian, antara lain: “a) penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji; b) penilaian memberi satu peluang untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan”. Dengan kedua alasan pentingnya penilaian tersebut maka proses pengembangan pegawai dengan mengurangi atau menghilangkan kemerosotan kerja pegawai dapat dilakukan. Dan melalui penilaian kinerja akan membawa manfaat pada kesempatan pengembangan karir pegawai di masa mendatang.

Melakukan penilaian tentu didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu penilaian, sehingga hasil akhir dari suatu penilaian tidak berdasarkan kepentingan individu penilai tetapi memiliki tujuan yang lebih tinggi dalam organisasi. Menurut Nawawi (1998 : 249), ada beberapa tujuan penilaian kinerja terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan seperti berikut ini:

a. Tujuan Umum

Beberapa tujuan umum penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penilaian untuk memperbaiki pelaksana para pekerja, agar setiap pekerja mampu mewujudkan dan mempergunakan potensi yang ada secara maksimal dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Dari uraian yang tergambar masih ada potensi yang belum diwujudkan secara nyata.
2. Untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan manajer dalam mengambil keputusan yang akan dilaksanakan. Karena setiap dalam aktivitas pekerjaan selalu dihadapkan dengan keharusan pengambilan keputusan. Sehingga keputusan dapat diambil relatif tepat jika didasari dengan informasi yang cukup dan benar.
3. Demikian kinerja secara umum ditujukan dalam upaya melakukan inventarisasi SDM dilingkungan organisasi atau perusahaan, yang

digunakan untuk mendesain hubungan antara atasan dengan bawahan, guna mewujudkan saling pengertian dalam rangka mengembangkan keseimbangan kerja sama sebagai tim dalam organisasi tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling pengertian dan saling menghargai.

4. Penilaian kinerja untuk meningkatkan motivasi kerja yang berinflikasi terhadap prestasi kerja dalam aktivitas organisasi sehari-hari. Oleh karena itu hasil penilaian hendaknya diketahui oleh para pekerja. Dari satu sisi tentang keberhasilan, agar memotivasi pekerja tersebut untuk mempertahankan serta sekaligus untuk meningkatkannya. Disisi lain, kegagalan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan agar dimasa yang akan datang prestasi kerja menjadi lebih baik.

b. Tujuan Khusus

Dalam aktivitas SDM akan lebih tinggi nilainya bila di ikuti kegiatan lainnya. Demikian juga halnya dengan tujuan khusus penilaian kinerja ini sebagai berikut :

1. Untuk dijadikan dasar dalam melakukan promosi, memperkecil kekeliruan pelaksanaan tugas atau pekerja, menetapkan pemberian penghargaan atau balas jasa, serta mewujudkan keadilan.
2. Penilaian kinerja digunakan untuk keperluan rekrutmen dan seleksi sehingga kriteria dalam membuat tugas memiliki validitas tinggi
3. Penilaian kinerja memberikan informasi umpan balik bagi pekerja dalam meningkatkan efisiensi kerja dengan tujuan agar perlu dilakukan perbaikan terhadap kekurangan atau kekeliruan.
4. Penilaian kinerja memberikan informasi yang dapat digunakan organisasi sebagai upaya mengidentifikasi kebutuhan pekerja dalam meningkatkan prestasi kerja.
5. Penilaian kinerja memberikan informasi tentang spesifikasi jabatan dimana spesifikasi jabatan ini diperlukan dalam memecahkan masalah organisasi.
6. Penilaian kinerja akan meningkatkan komunikasi sebagai usaha mewujudkan hubungan manusiawi yang harmonis antara atasan dan bawahan.

Selain itu penilaian kinerja yang diwujudkan dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Job assesment*) sebagaimana dimaksud John (1997:6) mengatakan bahwa :

“Penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja (*Appraisal of performance*) adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan

mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaan keseluruhan bukan hanya dinilai hasil pisiknya tetapi meliputi berbagai hal, seperti kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu pedoman dalam bidang personalia yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja para karyawan secara rutin dan teratur, sehingga sangat bermanfaat bagi pengembangan karir karyawan yang dinilai mampu untuk perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa Tujuan penilaian pelaksanaan pekerja menurut John (1997:7) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadaan keterampilan dan kemampuan setiap karyawan secara rutin.
2. Untuk digunakan sebagai dasar perencanaan bidang personalia khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.
3. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin, sehingga antara lain dapat diarahkan jenjang kariernya atau perencanaan karier, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan.
5. Mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan dari bidang personalia, khususnya prestasi karyawan dalam bekerja.
6. Secara pribadi, bagi karyawan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan / karyawannya, sehingga dapat membantu dalam memotivasi karyawan dalam bekerja.
7. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan.

Ada beberapa langkah dalam menilai kinerja menurut Dessler (1997:3), yakni:

”mendefinisikan pekerjaan, berarti memastikan bahwa anda dan bawahan anda sepakat tentang tugas-tugasnya dan standar jabatan, menilai kinerja berarti

membandingkan kinerja aktual bawahan anda dengan standar-standar yang telah ditetapkan, penilaian kinerja biasanya menuntut satu atau lebih sesi umpan balik”. Disini kinerja dan kemajuan bawahan dibahas dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang dituntut. Melalui langkah-langkah tersebut akan mempermudah seorang pimpinan maupun bawahan untuk sama-sama memberikan penilaian pada dirinya didasarkan pada standar jabatan yang telah disepakati bersama.

4. Konsep Keluarga Berencana

Menurut Badan Keluarga Berencana Nasional (2006:12) Visi Program KB Nasional Era Baru telah ditetapkan menjadi “Keluarga Berkualitas Tahun 2015”.

Visi ini dimaksud untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menurut Badan Keluarga Berencana Nasional (2006:15) Misi Program KB Nasional Era Baru adalah “Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitas, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga serta penguatan kelembagaan dan jejaring KB”.

Kebijakan Umum yang ditetapkan dalam Program KB Nasional adalah usaha mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi, serta memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berwawasan gender melalui upaya

peningkatan partisipasi pria dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi remaja serta upaya pemberdayaan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan melalui Program KB Nasional. Lebih jauh menurut Badan Keluarga Berencana Nasional (2006:21) ditetapkan beberapa kebijakan khusus, meliputi :

- a. Meningkatkan pemenuhan Hak-Hak Reproduksi bagi semua Individu, Remaja dan Keluarga.
- b. Meningkatkan Jaminan dan kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Meningkatkan Partisipasi Pria dan Promosi KB dan Kesehatan Reproduksi yang berwawasan Kesetaraan dan Keadilan Gender.
- d. Mempersiapkan Remaja untuk memasuki Kehidupan Berkeluarga.
- e. Mengintegrasikan Pelayanan KB kedalam Kesehatan Reproduksi.
- f. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
- g. Meningkatkan upaya-upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- h. Peningkatkan upaya Pemberdayaan Keluarga dalam Bidang Ekonomi.
- i. Mengembangkan upaya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Pelestarian Lingkungan.
- j. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB.
- k. Penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang lebih terbuka.
- l. Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender dalam Program-Program Operasional.
- m. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi melalui rangkaian Kegiatan mulai dari Pengumpulan, Pengelolaan, Analisa dan Penilaian, Penyajian dan Penyebarluasan, Pemanfaatan sampai Dokumentasi dengan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa salah satu kebijakan khusus Program KB Nasional adalah meningkatkan kualitas data dan informasi melalui rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penilaian, penyajian dan penyebarluasan, pemanfaatan sampai dokumentasi dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hubungan tersebut, Menurut Siagian

(1988:118) “lancar tidaknya pembangunan nasional ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat administratif. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur administratif yang tangguh merupakan sasaran dari pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan”. Dikatakan Siagian (1988:118) “pada hakekatnya infrastruktur administrasi yang mutlak harus dibangun dalam rangka pembangunan adalah, pegawai negeri, struktur organisasi, serta sistem dan prosedur kerja”. Selanjutnya, Siagian (1988:129) menyatakan sasaran pembangunan administratif di bidang sistem dan prosedur kerja adalah penyederhanaan, yang meliputi bidang-bidang: “(1) pengawasan dan pemeriksaan, (2) pencatatan dan pelaporan, (3) penyimpanan dokumen, serta (3) pertanggungjawaban keuangan”.

Menurut Ma'moeri (2001:32) “laporan pada hakekatnya adalah bentuk penyampaian informasi yang merupakan pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, sedangkan pelaporan adalah proses pembuatan laporan”. Setiap laporan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban. Dikatakan Ma'moeri (2001:34) proses pembuatan laporan pada umumnya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah. Agar laporan dapat berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban yang baik dan dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan, maka harus dirumuskan atau diidentifikasi hal-hal berikut: Mengapa laporan perlu dibuat dan apa tujuannya?, Informasi apa yang harus dimuat dan dilaporkan?, Siapa/apa yang harus dilaporkan?, Kapan laporan harus dibuat?, Siapa yang harus membuat?, serta Bentuk laporan yang harus dibuat.
2. Perumusan alternatif laporan. Setelah permasalahan laporan berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan alternatif laporan yang harus dipersiapkan untuk memenuhi tujuan laporan itu sendiri.

3. Pengumpulan dan analisis data. Langkah selanjutnya dalam pelaporan adalah penentuan sumber data yang akan digunakan sebagai bahan laporan. Selain itu dilakukan pula penentuan metode pengumpulan data. Setelah ditetapkan sumber data dan metode pengumpulannya, langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah data yang telah terkumpul perlu dianalisis lebih dahulu atau tidak sebelum dilaporkan.
4. Memilih alternatif pelaporan. Setelah dikembangkan alternatif pelaporan, perlu diputuskan jenis laporan yang akan dipilih untuk diterapkan pada instansi atau organisasi. Pemilihan ini hendaknya didasarkan kepada analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Tahap identifikasi masalah merupakan tahap penting yang harus dilakukan instansi atau organisasi sebelum sistem pelaporan dikembangkan. Jika tujuan yang akan dicapai dengan pelaporan tidak jelas, maka laporan tidak akan ada manfaatnya. Demikian pula dengan unsur lainnya yang harus dirumuskan dengan cermat sebelum diputuskan bahwa laporan perlu dibuat.

Pelaporan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan melekat yang handal, jika proses pembuatannya memenuhi unsur pengendalian yang baik. Menurut Ma'moeri (2001:37) agar menghasilkan laporan yang handal maka dalam proses membuat pelaporan instansi atau organisasi harus memperhatikan unsur pengendalian manajemen berikut: "penetapan siapa yang berwenang membuat laporan, perencanaan informasi yang harus dilaporkan, kebijakan kapan laporan harus dibuat, penetapan prosedur pembuatan laporan, penetapan sumber informasi pelaporan, penetapan personil yang membuat laporan, dan bagaimana reviu penerbitan laporannya".

Menurut Gie (2000:17) “pembuatan laporan harus diorganisasikan dengan jelas. Instansi atau organisasi harus menetapkan terlebih dahulu siapa yang harus membuat laporan”. Penetapan siapa yang harus membuat laporan akan menjadi kritikal karena akan membatasi pembuatan laporan hanya oleh pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Pengorganisasian pelaporan yang tidak jelas dan tegas akan mengakibatkan banyaknya laporan yang dibuat tidak sesuai dengan urgensinya. Laporan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kompetensi akan menyulitkan pimpinan mengambil tindakan yang diperlukan.

Di samping penetapan siapa yang dapat melaporkan, instansi atau organisasi harus merencanakan informasi apa yang dapat dilaporkan. Menurut Winardi (1990:71) “penentuan informasi apa yang dapat dilaporkan harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya. Penetapan informasi apa yang harus dilaporkan harus didasarkan pada analisis pemanfaatannya”. Analisis ini akan menetapkan urgensi informasi yang disampaikan dari bawah ke atas. Jika kebutuhan informasi ini tidak dianalisis dan direncanakan, maka pimpinan akan menerima laporan tidak terklasifikasi sesuai dengan tingkat urgensinya.

Analisis dan perencanaan informasi yang dilaporkan harus dilakukan secara berkala, mengingat kebutuhan informasi yang dilaporkan oleh atasan dapat berubah. Jika informasi yang akan dilaporkan tidak terklasifikasi sesuai urgensinya, maka pimpinan akan sulit mengambil tindakan yang benar-benar diperlukan sehingga energi pimpinan terpakai untuk membaca laporan yang tidak urgen, dan pada akhirnya pimpinan tidak memanfaatkan laporan tersebut cenderung mendapatkan

informasi dari sumber lain. Jika hal ini terjadi, maka laporan yang disusun tidak berfungsi sebagai alat pengendalian.

Walaupun informasi yang akan dilaporkan telah dianalisis dan direncanakan, agar dapat bermanfaat laporan harus disusun dengan baik. Laporan yang baik hanya dapat disusun oleh orang atau personil yang berkemampuan dalam menyusun laporan dengan baik. Informasi yang baik jika tidak disusun dalam format laporan yang baik tidak akan menarik perhatian pimpinan dan akhirnya tidak akan digunakan. Kemampuan personil dalam menyusun laporan tidak dapat timbul secara kebetulan atau berdasarkan bakat yang dimilikinya, melainkan dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut Sutrisno (2001:102) "sebelum disampaikan, laporan harus direviu untuk menghindari kejadian berikut : kesalahan kalimat, penjumlahan, kutipan, refrensi, ketepatan, dan lain sebagainya". Reviu ini dilakukan untuk menghindari laporan yang mengandung kesalahan. Kegiatan reviu ini harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat diketahui apakah laporan yang diterbitkan telah melalui proses reviu sebagaimana mestinya. Reviu harus dilakukan pada saat membuat laporan maupun pada saat laporan akan diterbitkan.

Reviu yang dilakukan harus terdokumentasikan, sehingga memudahkan pengecekan di kemudian hari. Reviu dilakukan oleh atasan pembuat laporan atau personil yang bertanggung jawab atas materi laporan. Selain dilakukan oleh pihak yang membuat, laporan yang diterbitkan juga seharusnya direviu secara berkala oleh pihak di luar pembuat. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kegiatan reviu

oleh pembuat laporan tetap dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan informasi yang disampaikan tetap relevan bagi pimpinan. Dijumpainya laporan suatu instansi atau organisasi yang mengandung berbagai kesalahan atau kekeliruan setelah laporan tersebut disampaikan kepada atasan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar organisasi penyusun akan menurunkan citra instansi atau organisasi itu sendiri.

Menurut Ma'moeri (2001:47) "dalam suatu organisasi hubungan antara atasan dan bawahan atau pimpinan dan staf, serta antara unit kerja yang satu dengan yang lain dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien jika diatur melalui sistem yang baik dengan visi yang sama". Salah satu alat komunikasi yang baik dalam mengatur hubungan antar atasan dan bawahan, antar unit-unit kerja, serta pertanggungjawaban dalam organisasi adalah dengan penyampaian informasi melalui pelaporan.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, yang dapat berbentuk laporan tertulis dan/atau tidak tertulis. Untuk penyampaian komunikasi formal, laporan bentuk tertulis adalah hal yang paling umum, sedangkan komunikasi informal lebih sering dilakukan secara tidak tertulis (lisan). Menurut Ma'moeri (2001:47) laporan dapat digunakan untuk menyajikan informasi mengenai: "apa yang telah terjadi (*what*), dimana kejadiannya (*where*), bilamana (*when*) dan mengapa (*why*) hal itu terjadi, serta siapa (*who*) yang bertanggungjawab terhadap kejadian-kejadian tersebut, dan bagaimana (*how*) hal tersebut terjadi".

Dengan demikian pelaporan didefinisikan sebagai bentuk penyampaian informasi tertulis dari unit kerja yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau dari bawahan kepada atasan. Informasi tertulis dimaksud dapat berbentuk

laporan bentuk surat, bentuk tabel matriks, atau informasi pada layar monitor, penggunaan formulir tertentu dan sebagainya. Menurut Ma'moeri (2001:47) "Laporan merupakan konsekuensi logis dari pendelegasian wewenang. Laporan berarus atau berawal dari bawah ke atas dengan pola piramidal atau pohon natal (*christmas tree*)". Hal ini berarti bahwa semakin ke atas jenjang yang dilapori maka materi laporan yang disampaikan semakin terfokus pada hal yang memiliki urgensi tinggi.

Pelaporan yang dirancang dengan baik dan digunakan sebagaimana mestinya merupakan instrumen pengendalian oleh pimpinan atau atasan karena dapat memberikan informasi tentang adanya penyimpangan atau deviasi sehingga memungkinkan pemakai laporan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Menurut Ma'moeri (2001:49) agar laporan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi, penyusun laporan harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut: "menginformasikan, meyakinkan serta menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu".

Prinsip menginformasikan, dimaksudkan Laporan yang disampaikan secara tertulis harus memuat suatu informasi yang mempunyai nilai. Dengan demikian jika materi yang disampaikan tidak mempunyai nilai informasi, berarti laporan yang disampaikan tidak akan bermanfaat. Jika dikaitkan dengan pengendalian manajemen, informasi yang mempunyai nilai adalah informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas dalam organisasi.

Agar memenuhi sifat ini, laporan harus memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan atau program yang perlu terus menerus dikendalikan agar tidak terjadi hambatan atau penyimpangan. Informasi penting tersebut adalah informasi tentang perkembangan efektivitas pelaksanaan kegiatan/aktivitas agar para pimpinan (penerima laporan) dapat mengikuti jalannya proses kegiatan. Sebagaimana diketahui, penciptaan pengendalian dimaksudkan agar seluruh kegiatan terkendali dengan baik sehingga tujuan, target, sasaran diharapkan tercapai dengan baik. Terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan akan membawa dampak terhadap pencapaian tujuan, target, serta sasaran yang telah ditetapkan.

Prinsip meyakinkan adalah informasi yang tercantum dalam laporan harus disajikan dalam bentuk dan bahasa yang dapat meyakinkan pihak pembaca. Pelaporan yang memuat informasi penting tentang penyimpangan akan tetapi tidak disajikan dalam bentuk yang tepat dan bahasa yang menarik tidak akan mendapat perhatian pembaca. Pimpinan tidak akan menyadari adanya kelemahan atau penyimpangan jika informasi dalam laporan kurang meyakinkan.

Untuk dapat meyakinkan, pelaporan harus dikemas secara profesional. Misalnya materi yang disajikan harus disusun dalam bentuk yang tepat dan mudah dibaca, tidak menggunakan bahasa teknik yang sulit dimengerti, dan jika memungkinkan digunakan ilustrasi seperti grafik, tabel bentuk matrik, analisis, dan sebagainya.

Sekali laporan atau informasi yang disampaikan kepada pimpinan atau atasan tidak meyakinkan, tentu selanjutnya akan menghilangkan kepercayaan pimpinan terhadap manfaat laporan. Salah satu penyebab informasi atau laporan yang tidak

meyakinkan adalah laporan yang tidak didukung bukti yang relevan dan obyektif. Adalah usaha yang sia-sia jika informasi atau laporan yang sudah disiapkan dengan biaya dan tenaga yang cukup banyak, tidak mendapat perhatian pimpinan/atasan. Agar pembaca berkeinginan membaca laporan terutama laporan bentuk surat/bab yang telah disiapkan, penyusun laporan hendaknya juga menyiapkan ringkasan meteri pelaporan yang akan diberikan kepada pejabat yang lebih tinggi.

Prinsip menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu adalah laporan yang disusun dan bentuknya dirancang dengan baik serta materi yang dilaporkan dapat meyakinkan pemakai diharapkan akan mampu menggerakkan pejabat berwenang untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan melakukan tindakan perbaikan yang didasarkan atas suatu laporan, diharapkan akan meningkatkan kinerja organisasi. Laporan yang telah dikemas dengan baik akan menjadi sia-sia jika setelah dibaca ternyata tidak mampu menggerakkan seseorang yang mempunyai kewenangan untuk berbuat sesuatu guna mengambil tindakan perbaikan. Syarat-syarat pelaporan yang baik menurut Ma'moeri (2001:50):

Laporan harus mengandung kebenaran, obyektif, dan dapat dibuktikan, laporan harus jelas dan cermat, laporan harus langsung mengenai sasaran, laporan harus lengkap, laporan harus tegas dan konsisten, laporan harus tepat waktu, laporan harus ditujukan kepada penerima yang tepat, pembuatan laporan harus mempertimbangkan faktor manfaat dan biaya, jelaskan pengaruh negatif yang mungkin timbul serta laporan harus dibuat oleh pihak yang kompeten

Untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan benar dan obyektif, perlu ditetapkan sifat kehati-hatian dalam menyusun laporan. Menyusun

laporan bukan merupakan pekerjaan yang sulit, akan tetapi menyusun laporan yang mengandung kebenaran, obyektif, dan didukung bukti memerlukan kehati-hatian.

Menurut Sutrinso (2001:109) "tidak semua informasi harus dilaporkan. Laporan yang memuat semua informasi tanpa membedakan mana informasi yang penting dan mana informasi yang hanya perlu diketahui dapat mengakibatkan penerima laporan tidak terfokus pada masalah yang penting saja". Hindari penggunaan kata dan susunan kalimat yang tidak lazim karena dapat menimbulkan salah penafsiran. Jika terdapat sejumlah data atau angka yang dilaporkan, hendaknya dimuat dalam lampiran.

Penerima laporan perlu diminta pendapatnya secara periodik untuk menentukan apakah penerima/pengguna laporan masih memerlukan isi laporan seperti yang biasa atau isi dan bentuknya perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui informasi yang diinginkan penerima laporan, seperti membicarakan atau mendiskusikan dengan penerima laporan mengenai informasi yang diharapkannya, dan memperkirakan keinginan pembaca laporan.

Laporan harus dikemukakan secara lengkap tetapi singkat, padat, dan jelas, yang mencakup semua segi masalah yang dilaporkan. Uraian yang dikemukakan hendaknya harus tegas dan tidak kontraditif antara bagian laporan yang satu dan bagian yang lain. Ketepatan waktu pendistribusian laporan harus benar-benar diperhatikan, tidak tepatnya waktu penyampaian dan penerimaan suatu laporan dapat mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak bermanfaat dan akhirnya tindakan korektif atau perbaikan akan mengalami keterlambatan. Akibat lebih jauh dari

keterlambatan laporan adalah kerugian organisasi akibat koreksi yang tidak dilakukan segera.

Laporan dapat dibuat secara periodik. Jika terjadi deviasi atau penyimpangan yang memerlukan tindakan segera, laporan dapat dibuat sesegera mungkin. Organisasi harus mengembangkan kebijakan yang memungkinkan dibuatnya laporan yang bersifat sangat segera. Laporan yang bersifat sangat segera hendaknya hanya laporan yang memuat informasi sangat penting. Laporan ini harus mendapat perlakuan yang istimewa karena materi laporannya memerlukan tindakan segera, dan jika tindakan tidak segera diambil, organisasi akan menderita kerugian.

Laporan harus dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memuat informasi hasil kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan biasanya disampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan, atasan dari atasan langsung yang bersangkutan, dan/atau pihak lain yang kompeten. Laporan yang disusun oleh pihak yang melaksanakan kegiatan rutin biasanya disampaikan melalui saluran formal pelaporan kepada atasan atasan yang bersangkutan. Selanjutnya atasan yang bersangkutan meneruskan laporan tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi yang mempunyai kewenangan dan harus berbuat sesuatu atas laporan tersebut.

Laporan yang memuat penyimpangan harus dilaporkan tidak hanya kepada atasan langsung yang bersangkutan akan tetapi juga disampaikan setidaknya kepada pejabat satu tingkat di atas atasan langsung yang bersangkutan. Proses pelaporan seperti ini dapat menciptakan dukungan dalam mengambil tindakan koreksi dan memberikan informasi kepada pihak lain yang terkena dampak dari

penyimpangan tersebut. Jika penyimpangan yang terjadi melintasi unit organisasi lain laporan juga harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi tersebut.

Biaya penyiapan dan pengumpulan data untuk pembuatan laporan harus mempertimbangkan manfaat pelaporan tersebut. Dalam melaporkan penyimpangan, hendaknya dijelaskan pengaruh negatif yang timbul dan atau yang akan timbul. Penjelasan pengaruh negatif harus dibuat secara obyektif. Laporan yang menginformasikan adanya penyimpangan akan tetapi tidak dapat memberikan gambaran dampak negatifnya, akan mengurangi nilai laporan tersebut.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2000:19) “pengawasan melekat dapat menciptakan atau menentukan siapa yang harus melaporkan terjadinya penyimpangan”. Misalnya laporan tentang pelaksanaan pengawasan melekat dapat dilakukan oleh penyedia (supervisor) dengan membuat laporan tentang hal tersebut kepada atasan langsungnya dan dilakukan oleh unit organisasi yang secara khusus melakukan pengujian atas efektivitas pengawasan melekat.

Menurut Ma'moeri (2001:59) “suatu instansi atau organisasi dalam membuat laporan harus menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ruang lingkup materi yang dapat dilaporkan, kepada siapa laporan disampaikan, kapan laporan harus disiapkan, siapa yang boleh mereviu proses pembuatan laporan, siapa yang boleh membuat laporan, dan lain sebagainya”. Kebijakan siapa yang boleh membuat laporan akan mempertegas batasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi atau organisasi. Pimpinan instansi atau organisasi harus menetapkan garis kebijakan yang jelas sehingga laporan hanya dibuat oleh pihak atau unit organisasi yang paling

kompeten dan bertanggung jawab. Ketidakadaan kebijakan yang mengatur siapa dan bagaimana membuat laporan, akan membuat instansi atau organisasi kelebihan informasi, dan kebanyakan informasi tersebut bersumber dari unit organisasi yang tidak kompeten.

Pembuatan laporan harus melalui prosedur yang baik. Agar dihasilkan laporan yang baik dan bermutu, perlu diciptakan prosedur yang baik yang mencerminkan proses yang sangat hati-hati. Prosedur ini harus mencerminkan langkah yang harus seseorang dalam membuat laporan. Prosedur pembuatan laporan harus terdokumentasikan dengan baik, sehingga memudahkan pengecekannya dikemudian hari. Dokumentasi prosedur pembuatan laporan antara lain mencatat siapa yang membuat, siapa yang mereviu, dari mana sumber informasi diperoleh, apakah terdapat bukti yang relevan dan obyektif, dan lain sebagainya. Prosedur yang baik dan mengandung pengendalian yang baik akan mengurangi kesalahan dalam membuat laporan.

Laporan yang harus dibuat berdasarkan informasi yang tercatat atau terdokumentasikan pada instansi atau organisasi. Sebagai sumber pelaporan, catatan atau dokumentasi harus bebas dari kesalahan dan didukung dengan bukti yang relevan, dan kompeten. Catatan atau dokumentasi yang baik dihasilkan dari proses dan prosedur pencatatan yang baik. Dengan demikian organisasi harus menciptakan mekanisme atau sistem pencatatan yang andal sehingga data yang tersedia untuk bahan pelaporan mengandung nilai kebenaran dan obyektif. Jika organisasi atau instansi kurang memperhatikan hal ini maka laporan akan memuat data yang tidak

akurat dan akan menyesatkan pembaca. Agar tidak terdapat pemborosan, materi laporan tertentu hendaknya dapat disiapkan langsung dari pencatatan rutin sehingga pembuat laporan hanya memindahkan data dari pencatatan ke dalam laporan.

Di dalam organisasi terdapat berbagai macam sumber daya yang harus ada yang membuat organisasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan tercapai. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:7) berbagai sumber daya tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan bentuk/fisiknya yaitu: "(1) *Physcal resources* (sumberdaya fisik) yang terdiri dari: *man*, *money* dan *machine*, dan (2) *Virtual resources* (sumberdaya virtual) yaitu: informasi dan metode".

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya sumberdaya fisik meliputi manusia, uang dan mesin atau peralatan. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:9) "dari aspek manusia, berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah maupun mutu, telah memenuhi kualifikasi dari tugas dan tuntutan organisasi". Dalam beberapa hal menurunnya kinerja organisasi mungkin disebabkan oleh kurang qualified-nya pegawai. Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan inefisiensi yang akhirnya akan membebani organisasi dan mungkin akan mempengaruhi profit organisasi. Keberagaman SDM dalam organisasi mungkin bisa juga disebabkan oleh perbedaan asal-usul, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan adanya perpindahan antar daerah.

Atas dasar tantangan dan tuntutan reformasi, maka salah satu faktor kuncinya adalah kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Dikatakan demikian, karena

dari berbagai kajian akademik maupun secara empirik menunjukkan, titik lemah dari upaya reformasi salah satunya berada pada aspek kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Hal ini disebabkan, tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur negara dirasakan masih belum sesuai harapan. Bahkan untuk beberapa hal, dapat dikatakan masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, terutama dalam proses implementasi kebijakan publik.

Ketersediaan sumber daya aparatur merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Menurut Tayibnapis (1995:19) hal ini disebabkan bahwa: “dalam era pembangunan nasional peranan aparatur semakin dirasakan kehadirannya. Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya manusianya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program”. Oleh karena itu, untuk menunjang keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:11) “dari aspek uang berkaitan dengan anggaran dan pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan semakin besarnya anggaran yang dimiliki organisasi akan mempengaruhi organisasi itu sendiri. Semakin besar atau kecilnya anggaran akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya kegiatan-kegiatan organisasi”. Sedangkan dari aspek mesin atau peralatan menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:13) adalah “pengelolaan

peralatan meliputi seluruh kegiatan, pencatatan, pelaporan, penyusunan kebutuhan, perencanaan pemenuhan, pengadaan, pengiriman/pendistribusian, penerimaan, pemanfaatan, pemeliharaan / penyimpanan, kepemilikan, penghapusan dan pembinaan”.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana salah satu sumber daya yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang disebut fasilitas. Menurut Ashari (2003:70) fasilitas tersebut antara lain meliputi:

1. Gedung, adalah suatu bangunan yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan pelaksanaan pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dilaksanakan dengan aman tertip dan menyenangkan sehingga dapat dicapai kinerja yang maksimal.
2. Peralatan, adalah suatu perangkat yang diperlukan oleh personil yang melakukan kegiatan di mana tanpa peralatan tersebut tidak mungkin dicapai hasil pelayanan yang baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Mesin, adalah suatu perangkat yang berfungsi disamping sebagai sarana bantu untuk membuat suatu produk juga berperan sebagai simulator, sehingga khusus bagi petugas yang memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan akan memiliki kemampuan / kebiasaan dalam mengoperasikan suatu mesin dan merasa tidak asing lagi apabila mengoperasikan mesin yang ada pada tempat kerjanya kemudian.
4. Perabot Ruangan, adalah merupakan perlengkapan yang diletakkan dalam suatu ruangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif dan efisien. Perabot ruangan tersebut biasanya dirancang dengan bentuk, warna, konstruksi sedemikian rupa dan ditata secara fungsional serta memperhatikan estetika.

Sumberdaya virtual meliputi informasi dan metode. Badan Kepegawaian Negara (2001:18) menyatakan “dengan semakin berkurangnya batas-batas negara maka informasi menjadi sumber yang tidak mengenal batas. Keakuratan informasi

menjadi tuntutan dalam membuat keputusan-keputusan organisasi”. Metode yang digunakan sangat tergantung dari tujuan yang ingin di capai. Pada organisasi publik seperti BKB Kabupaten Sintang, reputasi organisasi, efisiensi dan efektivitas layanan masyarakat hanya akan dapat ditingkatkan apabila metode yang diterapkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan dengan memanfaatkan segenap informasi yang berguna bagi organisasi sehingga tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin modern.

Salah satu aspek penting dalam pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah tanggapan target group/masyarakat. Tanggapan atau respon masyarakat ini akan sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengumpulan data-data yang diperlukan dalam pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Menurut Allport (dalam Sastropetro, 1988:12) menjelaskan batasan tentang partisipasi adalah sebagai berikut: “bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja.” Dalam hal ini keterlibatan diri yang dimaksudkan adalah menyangkut keterlibatan dalam pikiran dan perasaan. Sementara menurut Davis (dalam Sastropetro, 1988:13) memberikan definisi mengenai partisipasi sebagai berikut:

Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them. (Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan

mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan)

Selanjutnya, menurut Gie (1981:20) bahwa partisipasi diartikan sebagai: “Suatu aktivitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi”. Dari pengertian partisipasi ini menunjukkan adanya aktivitas seseorang untuk ikut ambil bagian didalam kegiatan organisasi. Lebih lanjut menurut David (dalam Sastropoetro 1988:13) menyatakan sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”

Berdasarkan pengertian di atas, didalam pengertian partisipasi paling tidak terdapat tiga unsur penting memerlukan perhatian khusus, yaitu:

1. Bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peran serta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan. Lebih dari semata-mata keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesiediaan memberikan sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa kesenangan, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Unsur tanggung jawab yang merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

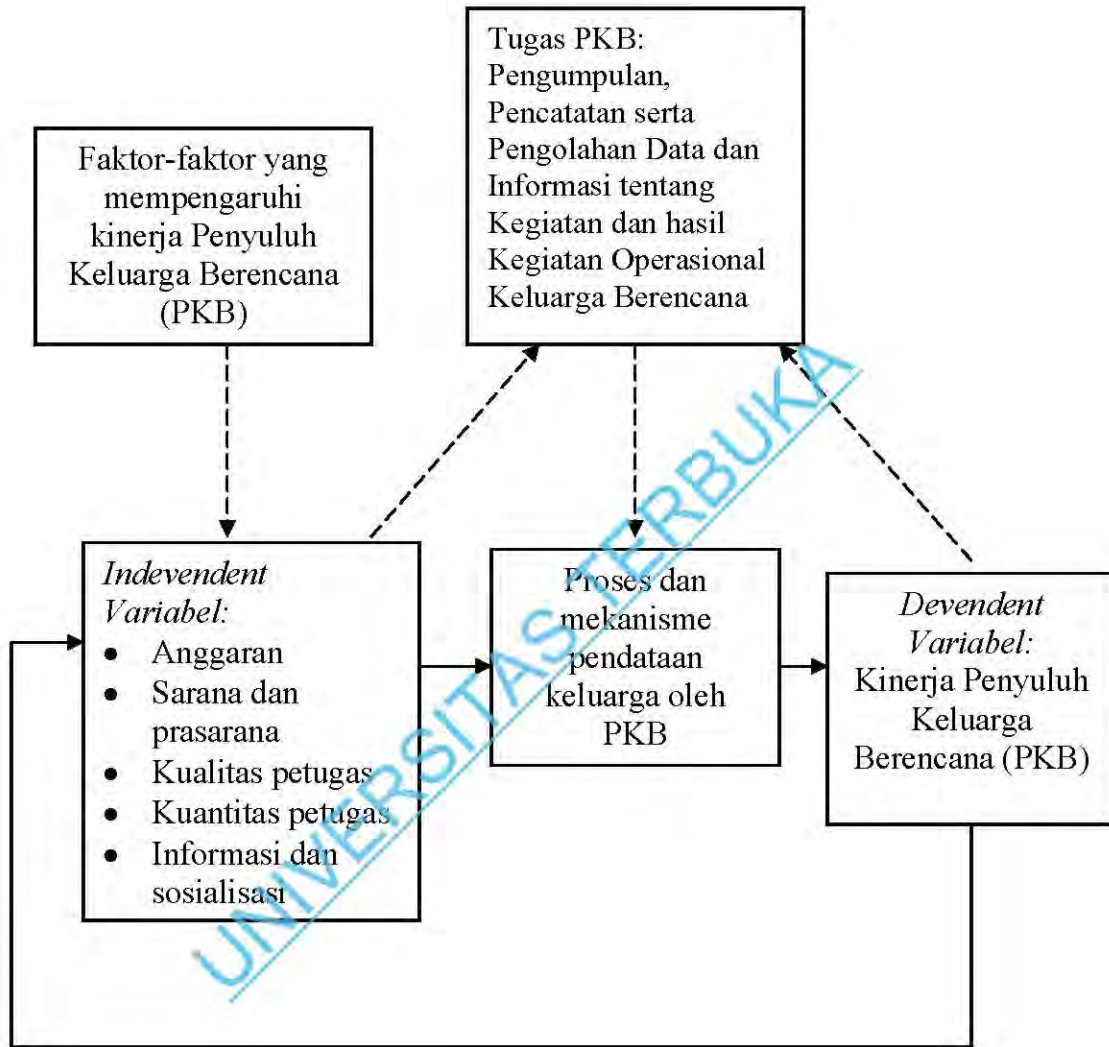
Kemudian Ndraha (1987:42), menjelaskan tentang definisi tersebut diatas, bahwa: “Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan bebas) menurut kemampuan (swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dan dalam mempertanggung jawabanya.” Dari apa yang telah dikemukakan tersebut, terdapat beberapa unsur yang penting dari pengertian partisipasi tersebut yang antara lain, keterlibatan mental, emosi dan dengan sendirinya fisik, kehendak sendiri atau prakasa (inisiatif) untuk mengambil bagian didalam usaha mencapai tujuan, memberikan swadaya serta adanya rasa tanggung jawab.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Partisipasi masyarakat bukanlah sekedar pelengkap, tetapi merupakan faktor yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Bahkan Du-Sautoy (dalam Ndraha 1987:103) mengatakan bahwa, “partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan atau bukan. Jika masyarakat yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan.”

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Berdasarkan gambar di atas, salah satu instrumen penting dalam mendukung sasaran dan arah kebijakan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berkualitas di Kabupaten Sintang adalah keberadaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang bertugas di tingkat Desa.

Salah satu tugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pengumpulan, Pencatatan serta Pengolahan Data dan Informasi tentang Kegiatan dan hasil Kegiatan

Operasional. Guna melaksanakan tugas dimaksud, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah: Anggaran, Sarana dan prasarana, Kualitas petugas, Kuantitas petugas, Informasi dan sosialisasi. Jika faktor tersebut tersedia secara memadai, proses dan mekanisme pendataan keluarga oleh PKB diharapkan dapat terselenggara secara baik sehingga mendukung peningkatan kinerja PKB di Kabupaten Sintang. Data dan informasi hasil pendataan keluarga ini selain digunakan untuk keperluan operasional Program KB Nasional sendiri juga dimanfaatkan sebagai data basic oleh stake holder pengambil kebijakan pembangunan lainnya, khususnya untuk menentukan sasaran program pemberian bantuan kepada keluarga miskin dan tidak mampu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dilihat dari substansinya, penelitian ini pada dasarnya adalah menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian di pilih dengan mempertimbangkan keserasian dengan objek yang di teliti. Menurut Arikunto (1998:16) langkah-langkah penelitian yang lebih menitikberatkan pada kegiatan administrasi adalah: “(1) Pembuatan rancangan penelitian, (2) Pelaksanaan penelitian, dan (3) Pembuatan laporan penelitian”.

Menurut Azwar (1998:7), penelitian deskriptif adalah “suatu penelitian yang hendak melakukan penilaian tentang sesuatu hal dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya antar fakta”. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai sasaran atau mengenai bidang tertentu, serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, maka langkah-langkah penelitian yang di tempuh oleh penelitian adalah melalui dua jenis penelitian yaitu :

1. Studi kepustakaan (*liberary research*) yakni melalui penelitian literatur atau buku-buku, brosur-brosur, buletin-buletin, laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan yakni dengan melakukan penelitian di lapangan atau subjek penelitian di lokasi penelitian.

B. Definisi Konseptual Variabel

1. Kinerja adalah hasil atau apa yang keluar (*outcomes*) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi seorang atau kelompok pegawai pada organisasi.
2. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah petugas yang berkedudukan di desa atau di kelurahan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan, penggerakkan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB Nasional serta kegiatan program pembangunan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah di wilayah kerjanya.
3. Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah hasil kerja PKB dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

C. Informan

Cara yang paling baik dalam melakukan penelitian adalah seorang peneliti harus menentukan populasinya sebagai sumber data primer dan menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989:152) mengatakan, bahwa populasi atau *universe* ialah sejumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara *populasi sampling* dengan *populasi sasaran*. Menurut Azwar (2003:35) “apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi, yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung”.

Mengingat sasaran dari penelitian ini adalah keseluruhan populasi yang ada, penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang meliputi seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 44 orang yang tersebar di 14 kecamatan. Selanjutnya, sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala BKBPP Kabupaten Sintang.
2. Camat
3. Koordinator PKB
4. LSM pemerhati KB (PKBI Kabupaten Sintang)
5. Kader pendataan keluarga termasuk PPKBD dan Sub PPKBD

D. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Penggunaan kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk menjangkau data dalam rangka mengetahui gejala umum tentang kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang.
2. Pedoman wawancara adalah alat pengumpulan data dalam penelitian dengan mengajukan pertanyaan secara terpandu kepada responden.
3. Dokumenter adalah dokumen yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan dari Badan Keluarga Berencana Kabupaten Sintang

E. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini ditempuh melalui prosedur dalam pengumpulan data sebagaimana penggunaan instrumen yang kuesioner atau angket, pedoman wawancara, dan dokumenter. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui prosedur pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kuesioner atau angket disebarkan kepada responden dalam hal ini adalah 44 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang tersebar di 14 kecamatan.
2. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada informan yaitu Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Camat serta Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana.
3. Dokumen review (*document review*) yang ada untuk dikumpulkan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Kantor

Camat serta Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana yang kemudian dilakukan dianalisis terhadap data tersebut.

F. Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu deskriptif, maka pengolahan dan analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Menurut Azwar (1998:5) “analisis kualitatif artinya suatu teknik analisis yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah”. Data yang telah diambil atau dikumpulkan dari hasil wawancara, kuesioner dan dokumentasi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Setelah itu, setiap data akan diberikan penjelasan dan tahap terakhir atau bersamaan dengan uraian data akan dilakukan analisis dengan memberikan diskripsi (pemaparan dan penafsiran data dalam bentuk narasi)

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sintang. Alasan pemilihan lokasi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan dalam kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang serta tersedianya data informasi yang di perlukan dalam penelitian ini.
2. Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berupaya meningkatkan kualitas data dan informasi Program Keluarga Berencana Era Baru melalui rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisa dan

penilaian, penyajian dan penyebarluasan, pemanfaatan sampai dokumentasi dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada awal menjelang diberlakukannya otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Sintang terdapat 9 kelembagaan Perangkat Wilayah/Daerah dan Komponen Departemen Dalam Negeri, 8 Dinas Daerah Tingkat II, 23 Instansi Vertikal, 13 Cabang Dinas Tingkat I, 21 Kantor Kecamatan, 6 Kantor Kelurahan, 22 Instansi UPD, UPTD dan UPT, 8 Kantor Perbankan dan 8 Kantor BUMN dan BUMD.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan kembali. Guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, telah dibentuk Tim Fasilitasi Penyempurnaan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang melalui Surat Tugas Bupati Sintang Nomor 061/0322/OR-B tanggal 17 Maret 2004. Sehingga pada tahun 2004 telah dilaksanakan pula penataan dan pendayagunaan PNS pada lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diserahkan pada pemerintah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 ditegaskan bahwa kelembagaan BKKBN secara bertahap akan diserahkan ke kabupaten/kota selambat-lambatnya 31 Desember 2003. Guna menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut pada tanggal 12 Desember 2003 telah dilakukan serah terima satuan kerja, personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen

BKKBN kepada Pemerintah Kabupaten Sintang oleh Gubernur Kalimantan Barat berdasarkan Berita Acara Nomor 127/3807/OR-B. Selanjutnya, dibentuk Badan Keluarga Berencana (BKB) Kabupaten Sintang berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 636 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Sintang.

Sebagai konsekuensi penyerahan tersebut, dilakukan pula pengalihan status kepegawaian BKB menjadi PNS Daerah Kabupaten Sintang sebanyak 183 orang. Penataan/pendayagunaan PNS pada BKB tersebut adalah:

1. Diangkat dalam jabatan struktural eselon II, III dan IV pada SOTK BKB sebanyak 13 orang
2. Dialihkan/ditetapkan statusnya sebagai PNS Kabupaten Melawi sebanyak 40 orang.
3. Mutasi ke Kabupaten Melawi sebanyak 15 orang
4. Diangkat kembali jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebanyak 77 orang
5. Ditugaskan sebagai staf/jabatan fungsional umum pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebanyak 38 orang.

Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tersebut terjadi perubahan

nama BKB menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP).

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Peraturan Bupati Sintang Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang data dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang penggerakan masyarakat, bidang pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan, bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; penyusunan penetapan kinerja di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan; penyusunan analisa jabatan; penyusunan pengawasan melekat; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan serta kesekretariatan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

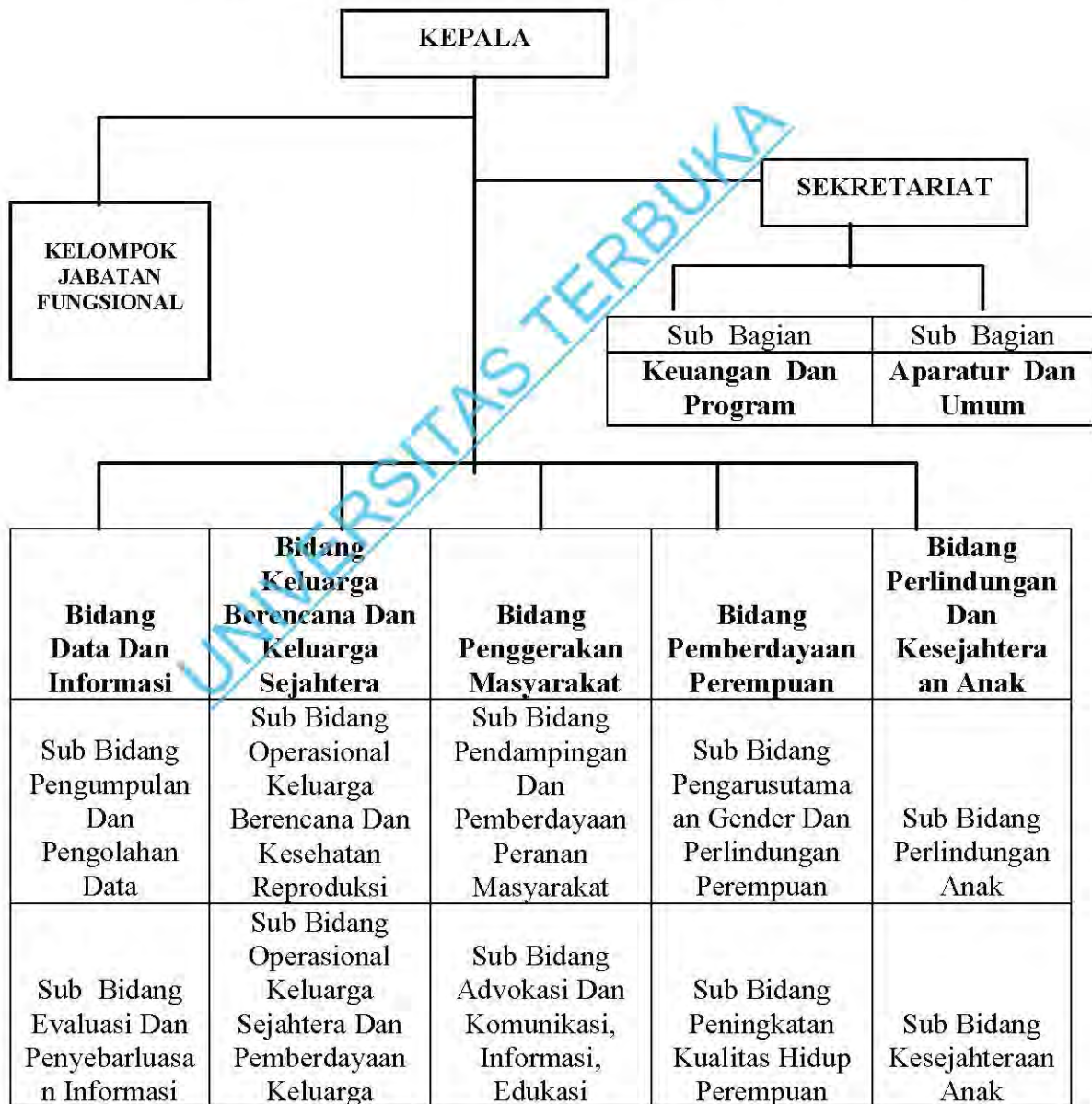
Susunan Organisasi BKBPP Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari: Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum, Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari: Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, Sub Bidang Evaluasi dan Penyebarluasan Informasi
4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari: Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
5. Bidang Penggerakan Masyarakat, terdiri dari: Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peranan Masyarakat, Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan, Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
7. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, terdiri dari : Sub Bidang Perlindungan anak, Sub Bidang Kesejahteraan anak
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

9. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 4.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Struktural dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

B. Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang

1. Mekanisme Operasional Program KB Di Kabupaten Sintang

a. Kebijakan Dan Strategi

Visi Program KB Nasional dan yang semula melembagakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) menjadi Keluarga Berkualitas Tahun 2015 dengan ciri-ciri Keluarga Sejahtera, Sehat, Maju, Mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, Berwawasan Kedepan, Bertanggung Jawab, Harmonis, dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi tersebut akan dicapai melalui Misi Utama Program KB Nasional yaitu : Membangun setiap Keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi Hak-Hak Reproduksi melalui Pengembangan Kebijakan, Penyediaan Layanan

Promosi, Fasilitas, Perlindungan, Informasi Kependudukan dan Keluarga serta Penguatan Kelembagaan dan Jejaring KB.

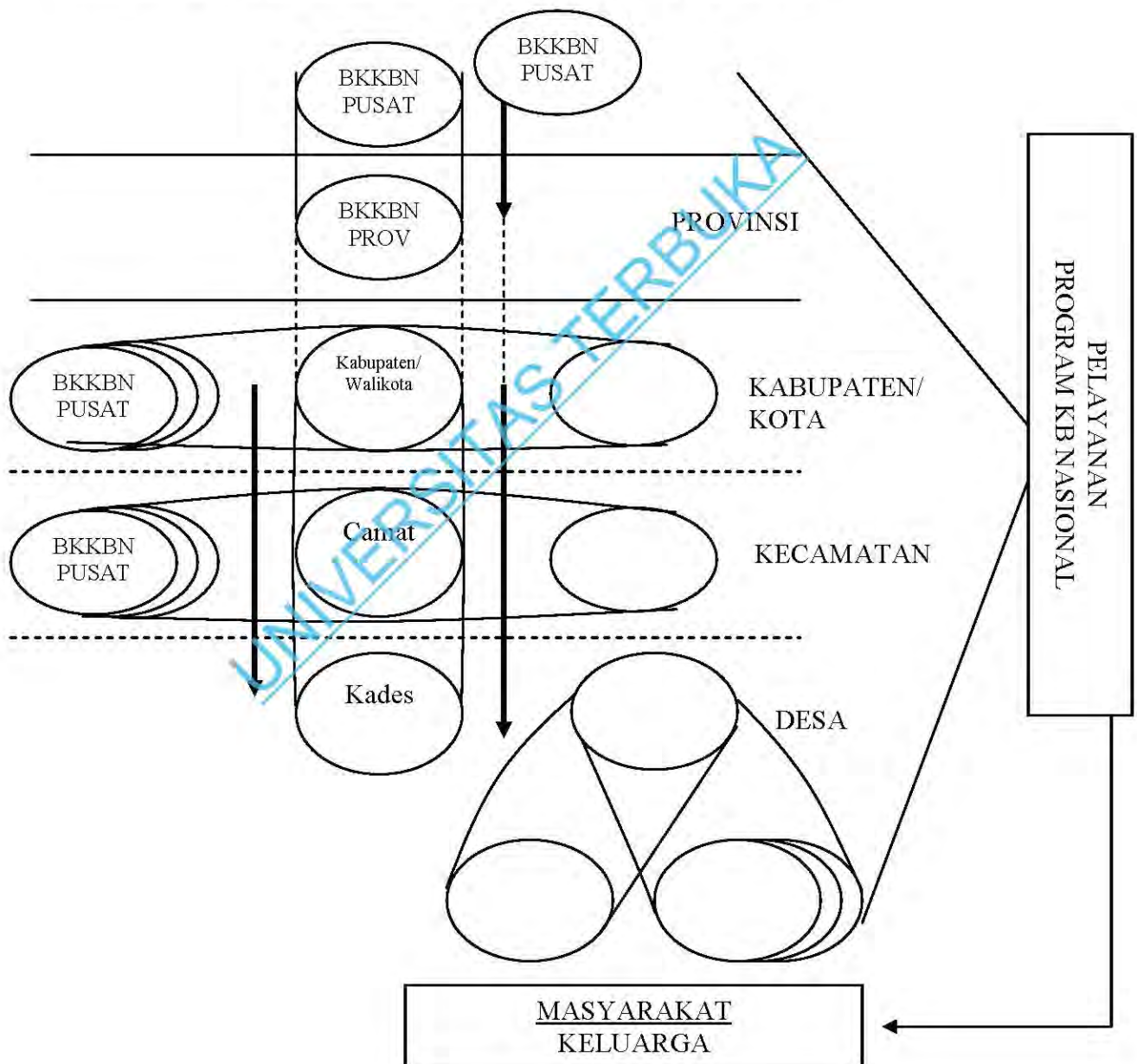
Salah satu Isu Strategi dan Tantangan yang paling utama bagi kelangsungan Program KB Nasional dan Kelembagaannya, ada Paradigma Baru Sistem Pemerintahan di Indonesia yaitu Otonomi Daerah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah dan dengan Pengganti UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 34 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi. Berdasarkan hal tersebut, menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang:

Agar keseimbangan Pengelolaan Program dapat terjaga dengan baik dari Pusat sampai Lini Lapangan, diperlukan adanya Sistem Pengelolaan Program KB Nasional sebagai acuan para Pengelola dalam Pelaksanaan Program Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber-Sumber yang tersedia dalam rangka mencapai Tujuan Program KB Nasional secara berhasil guna dan berdaya guna disemua Tingkat Wilayah di Kabupaten Sintang khususnya.

Selain mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber-Sumber yang tersedia dalam rangka mencapai Tujuan Program KB Nasional secara berhasil guna dan berdaya guna disemua Tingkat Wilayah di Kabupaten Sintang sebagaimana diungkapkan di atas, secara khusus tujuannya menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang adalah: (1) Meningkatkan Keterlibatan dan Pemanfaatan berbagai Sumber Daya yang ada dalam Kegiatan Operasional, (2) Meningkatkan Pendayagunaan Sarana dan Prasarana yang ada dalam Kegiatan Operasional, (3) Meningkatkan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta, dan Masyarakat dalam Kegiatan Operasional, (4) Memanfaatkan dan mengoperasionalkan

Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai Penggerak Program KB, (5) Memelihara kesinambungan dan keberlanjutan Kegiatan Operasional.

Gambar 4.2. Mekanisme Pengelolaan Operasional Program KB



Kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan di atas, antara lain adalah: (1) Memantapkan Pengorganisasian Satuan Kerja bagi Pengembangan Jaringan Operasional dari Kabupaten sampai Desa/Kelurahan, (2) Memantapkan Peran dan Kemandirian Pengelola dan Pelaksanaan Operasional baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat maupun Klien, (3) Mengembangkan Ketentuan dan Standar Prosedur Operasional di Satuan Kerja masing-masing, (4) Mengoptimalkan Peran dan Fungsi PLKB/PKB dalam Operasional Program KB. Adapun Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah: (1) Mensosialisasikan pentingnya Mekanisme Pengelolaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Operasional, (2) Meningkatkan Ketrampilan Pengelola dan Pelaksana dalam Kegiatan Operasional, (3) Meningkatkan Kualitas Peran Pengelola dan Pelaksana dalam Kegiatan Operasional, (4) Membentuk dan memanfaatkan Forum Pertemuan Tehnis dan Manajerial bagi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Operasional, (5) Mengembangkan Kemitraan dan Keterpaduan Operasional dengan Sektor lainnya, (6) Meningkatkan Mutu Pelayanan Program KB Nasional.

b. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian

Perencanaan Operasional merupakan langkah awal dan Kegiatan Operasional mempersiapkan, Tenaga, Dana, dan Sarana serta menentukan Jadwal Kegiatan yang dilakukan di Wilayah masing-masing. Prinsip-Prinsip yang perlu diperhatikan pada Tahap Perencanaan Operasional adalah: (1) Mengupayakan adanya dukungan Legal Aspek, (2) Memanfaatkan Data Wilayah, (3) Mengakomodasi Kebutuhan dan

Tuntutan Masyarakat, (4) Memadukan Program KB Nasional dengan Program Pembangunan lain, (5) Mewujudkan Keterbukaan.

Selanjutnya, pengorganisasian yaitu upaya menetapkan Jumlah dan Kualifikasi serta Penataan tentang Tenaga, Sarana, Prasarana, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Kerja sehingga kesemuanya siap digerakkan untuk mencapai Sasaran Program KB Nasional secara berdaya guna dan berhasil guna di Wilayah masing-masing. Pengorganisasian dapat dilaksanakan melalui Rapat-Rapat Koordinasi Lintas Sektor, dan Lintas Komponen secara berjenjang dan berkesinambungan. Substansi Pembahasan disesuaikan dengan Tingkat Pencapaian Program, Kebutuhan dan Kemampuan Wilayah masing-masing. Oleh karena itu setiap Wilayah mempunyai Peran sebagai berikut :

1) Tingkat Kabupaten

Pada tingkat Kabupaten, Bupati Sintang dibantu BKBPP Kabupaten Sintang bertanggung jawab melaksanakan Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat Bidang KB yang berperan: (1) Merumuskan Kebijakan Operasional, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan, serta Pemantauan dan Evaluasi Program KB Nasional Wilayah Kabupaten, (2) Menyelenggarakan dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB Nasional, (3) Membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial untuk Koordinasi Berkala yang membahas hasil Evaluasi guna penyempurnaan Rencana Operasional dan Penyegaran Kesepakatan Baru, (4) Mengembangkan Forum dan Penyelenggaraan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), (5)

Menyelenggarakan Pelayanan Program KB Nasional, (6) Menyiapkan atau membentuk Satuan Tugas Operasional, baik dalam bentuk Tim maupun Perseorangan bagi Pelaksanaan berbagai Kegiatan/Pelayanan untuk menggarap Wilayah Kabupaten, (7) Mengembangkan dan melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Strategis untuk menggerakkan Program Lintas Wilayah misalnya : Lomba, Penghargaan, Kegiatan Momentum dan Bakti Sosial dll, (8) Mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Peran Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Peran Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kabupaten

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Rumusan Kebijakan Operasional, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan, serta Pemantauan dan Evaluasi Program KB Nasional Wilayah Kabupaten	20 (45,46 %)	24 (54,54 %)	44
2	Menyelenggarakan dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB	17 (38,64 %)	27 (61,36 %)	44
3	Membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial untuk Koordinasi Berkala yang membahas hasil Evaluasi guna penyempurnaan Rencana Operasional	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	44
4	Mengembangkan Forum dan Penyelenggaraan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	25 (56,82 %)	19 (43,18 %)	44

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
5	Menyelenggarakan Pelayanan Program KB	28 (63,64 %)	16 (36,36 %)	44
6	Menyiapkan atau membentuk Satuan Tugas Operasional, baik dalam bentuk Tim maupun Perseorangan bagi Pelaksanaan berbagai Kegiatan/Pelayanan untuk menggarap Wilayah Kabupaten	35 (79,55 %)	24 (20,45 %)	44
7	Mengembangkan dan melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Strategis untuk menggerakkan Program Lintas Wilayah misalnya : Lomba, Penghargaan, Kegiatan Momentum dan Bakti Sosial dll	23 (52,27 %)	21 (47,73 %)	44
8	Mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan	12 (27,27 %)	24 (72,73 %)	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.1, belum semua Peran Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kabupaten dapat dilaksanakan secara optimal. Peran yang belum optimal tersebut adalah sebanyak 54,54 % menyatakan belum dirumuskan Kebijakan Operasional, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan, serta Pemantauan dan Evaluasi Program KB Nasional Wilayah Kabupaten, sebanyak 61,36 % menyatakan belum menyelenggarakan dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB Nasional, sebanyak 68,18% menyatakan belum membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial untuk

Koordinasi Berkala yang membahas hasil Evaluasi guna penyempurnaan Rencana Operasional dan Penyegaran Kesepakatan Baru, serta sebanyak 72,73% menyatakan belum mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan. Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, belum optimalnya peran tersebut, disebabkan belum adanya petunjuk teknis yang mengatur serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia.

2) Tingkat Kecamatan

Pada tingkat Kecamatan, Camat dibantu Unit Pelaksana Teknis yang menangani Program KB Wilayah Kecamatan bertanggung jawab menyelenggarakan Program KB Nasional di Wilayah Kecamatan antara lain: (1) Menjabarkan dan memanfaatkan Operasional dan Pengendalian Operasional Bidang KB Wilayah Kecamatan, (2) Membentuk dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB Nasional, (3) Membentuk atau memanfaatkan Forum (Manajerial Berkala Rapat Koordinasi/Konsultasi) yang membahas hasil Evaluasi, Penyempurnaan Rencana, Pelaksanaan dan Pengendalian Operasional, serta Penyegaran Kesepakatan Baru, (4) Mengembangkan forum dan penyelenggaraan advokasi dan penyelenggaraan KIE, (5) Menyelenggarakan Pelayanan Program KB Nasional, (6) Menyiapkan atau membentuk Satuan Tugas dalam bentuk Tim atau Perseorangan sebagai Pengelola/Pelaksana Operasional untuk menggarap Wilayah Kecamatan ke bawah, (7) Mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan Pelayanan Program KB Nasional, (8) Merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Peran Penyelenggaraan Program

KB Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kecamatan

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Menjabarkan dan memanfaatkan Operasional dan Pengendalian Operasional Bidang KB Wilayah Kecamatan	20 (45,46 %)	24 (54,54 %)	44
2	Membentuk dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	44
3	Membentuk atau memanfaatkan Forum (Manajerial Berkala Rapat Koordinasi/Konsultasi) yang membahas hasil Evaluasi, Penyempurnaan Rencana Pelaksanaan dan Pengendalian Operasional	31 (70,46 %)	13 (29,54 %)	44
4	Mengembangkan forum dan penyelenggaraan advokasi dan penyelenggaraan KIE	29 (65,91 %)	15 (34,09 %)	44
5	Menyelenggarakan Pelayanan Program KB	28 (63,64 %)	16 (36,36 %)	44
6	Menyiapkan atau membentuk Satuan Tugas dalam bentuk Tim atau Perseorangan sebagai Pengelola/Pelaksana Operasional untuk menggarap Wilayah Kecamatan dibawah	31 (70,46 %)	13 (29,54 %)	44
7	Mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan Pelayanan Program KB	12 (27,27 %)	32 (72,73 %)	44
8	Merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi	9 (20,46 %)	35 (79,54 %)	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.2, belum semua Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kecamatan dapat dilaksanakan secara optimal. Kegiatan yang belum optimal tersebut adalah, sebanyak 54,54 % menyatakan belum menjabarkan dan memanfaatkan Operasional dan Pengendalian Operasional Bidang KB Wilayah Kecamatan, sebanyak 68,18 % menyatakan belum membentuk dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB, sebanyak 72,73 % menyatakan belum mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan Pelayanan Program KB serta sebanyak 79,54 % menyatakan belum merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi. Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, belum optimalnya peran tersebut, disebabkan masih minimnya koordinasi antara Kabupaten dengan Kecamatan serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia.

3) Tingkat Desa/Kelurahan

Pada tingkat Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa dibantu PKB bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Program KB Nasional di desa/kelurahan. Peran yang diharapkan dari Lurah/Kepala Desa adalah: (1) Menyiapkan dan membuat Rencana, Pelaksanaan dan Pengendalian Operasional meliputi Kesiapan Tenaga, Dana, Sarana dan Jadwal Kegiatan, (2) Melaksanakan Kegiatan Operasional sesuai dengan Rencana, (3) Membentuk dan memanfaatkan Forum Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB Nasional, (4) Membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial Berkala (Rapat Koordinasi/Desa) yang membahas

hasil Evaluasi, Penyempurnaan Rencana Operasional, (5) Mengembangkan Forum dan melaksanakan Advokasi dan KIE serta Pusat-Pusat Pelayanan Program KB Nasional, (6) Membentuk Satuan Tugas Operasional dalam bentuk Tim atau Perseorangan sebagai Pengelola/Pelaksana Program yang menggarap Desa/Kelurahan dibawah, (7) Merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi, (8) Melakukan Pembinaan terhadap IMP dan Kader lain yang terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Peran Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Penyelenggaraan Program KB Tingkat Desa/Kelurahan

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Menyiapkan dan membuat Rencana, Pelaksanaan dan Pengendalian Operasional meliputi Kesiapan Tenaga, Dana, Sarana dan Jadwal Kegiatan	34 (77,27 %)	10 (22,73 %)	44
2	Melaksanakan Kegiatan Operasional sesuai dengan Rencana	30 (68,18 %)	14 (31,82 %)	44
3	Membentuk dan memanfaatkan Forum Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB	11 (25,00 %)	33 (75,00 %)	44
4	Membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial Berkala (Rapat Koordinasi/Desa) yang membahas hasil Evaluasi, Penyempurnaan Rencana Operasional	11 (25,00 %)	33 (75,00 %)	44
5	Mengembangkan Forum dan melaksanakan Advokasi dan KIE serta	32 (72,73 %)	12 (27,27 %)	44

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
6	Pusat-Pusat Pelayanan Program KB Membentuk Satuan Tugas Operasional dalam bentuk Tim atau Perseorangan sebagai Pengelola/Pelaksana Program yang menggarap Desa/Kelurahan dibawah	31 (70,45 %)	13 (29,55 %)	44
7	Merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi	9 (20,45 %)	35 (79,55 %)	44
8	Melakukan Pembinaan terhadap IMP dan Kader lain yang terkait	44 (100 %)	-	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.3, belum semua Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara optimal. Kegiatan yang belum optimal tersebut adalah, sebanyak 75,00 % menyatakan belum membentuk dan memanfaatkan Forum Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB, sebanyak 79,55 % menyatakan belum membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial Berkala (Rapat Koordinasi/Desa) yang membahas hasil Evaluasi, Penyempurnaan Rencana Operasional, serta Merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi. Menurut salah seorang Camat, belum optimalnya peran tersebut, disebabkan kondisi geografis wilayah Desa yang sulit dijangkau karena masih terisolir sehingga pembinaan jarang dilakukan serta terbatasnya petugas dan anggaran.

Selanjutnya, Pelaksanaan Operasional KB merupakan upaya memberdayakan setiap Keluarga agar mempunyai kemampuan untuk membangun Keluarga Kecil,

Sehat, Sejahtera, Maju, Mandiri, Berwawasan Kedepan, Bertanggung Jawab, Harmonis dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan Operasional Program KB diarahkan untuk memperkuat Keluarga dalam Pengendalian Kelahiran, Peningkatan Kesehatan Reproduksi, serta Pemantapan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga sehingga menjadi Keluarga yang Berkualitas. Bentuk kegiatan Pelaksanaan Operasional Program KB antara lain adalah (1) Pertemuan Koordinasi Teknis dan (2) Pertemuan Koordinasi Manajemen.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Pertemuan Koordinasi Teknis Kegiatan Program KB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Pertemuan Koordinasi Teknis Kegiatan Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	7	15,91
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	30	68,18
3	Tidak pernah dilaksanakan	7	15,91
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Sebagian besar Penyuluh Keluarga Berencana (68,18%) sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 44, menyatakan Pertemuan Koordinasi Teknis Kegiatan Program KB di Kabupaten Sintang kadang-kadang saja dilaksanakan. Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, hal tersebut disebabkan masih minimnya koordinasi antara pihak – pihak yang terlibat di Kabupaten serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia. Padahal Pertemuan Koordinasi Teknis merupakan Forum Pertemuan Koordinasi Sektor Terkait dalam rangka memadukan Kegiatan Program KB Nasional dengan Pembangunan lain yang membahas Tata Cara dan Teknis

Pelayanan Kegiatan.Pertemuan ini diselenggarakan dari Pusat sampai Desa/Kelurahan dan diikuti oleh semua unsur terkait.

Selanjutnya, untuk mengetahui Pertemuan Koordinasi Manajemen Kegiatan Program KB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Forum Pertemuan Koordinasi Manajemen Lintas Sektor

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	11	25,00
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	24	54,55
3	Tidak pernah dilaksanakan	9	20,45
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.5, Pertemuan Koordinasi Manajemen Kegiatan Program KB di Kabupaten Sintang kadang-kadang saja dilaksanakan. Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, hal tersebut disebabkan masih minimnya koordinasi antara pihak – pihak yang terlibat di Kabupaten serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia. Padahal, Forum Pertemuan Koordinasi Manajemen Lintas Sektor diselenggarakan di tiap-tiap Wilayah dengan Tujuan: Membangun Kesepakatan Operasional, Meningkatkan Koordinasi dan KIE, Merumuskan Kebijakan Operasional Program KB Nasional, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program KB Nasional serta Menyempurnaan Perencanaan Operasional Program KB Nasional. Pertemuan ini diselenggarakan di semua Wilayah dari Pusat sampai dengan Desa/Kelurahan dan melibatkan Pimpinan Formal dan Informal terkait.

Berkaitan dengan Pengendalian Operasional merupakan keseluruhan Proses Pengawasan dan Peminaan Melekat yang didukung oleh Pengembangan Norma dan Standarisasi Pelaksanaan Operasional untuk menjadi Koridor, baik bagi Pelaksana dan Pengelola Program maupun bagi para Pengawas dan Pembina. Pengendalian dilaksanakan melalui: Pengawasan Melekat, Peminaan Program, Ketenagaan, Dana, Sarana dan Pra Sarana dalam Operasional Program KB Nasional, Pemantauan melalui Supervisi, Pencatatan dan Pelaporan, serta Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Kegiatan yang dicapai sesuai dengan Rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Kegiatan Pengendalian Program KB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Kegiatan Pengendalian Program KB

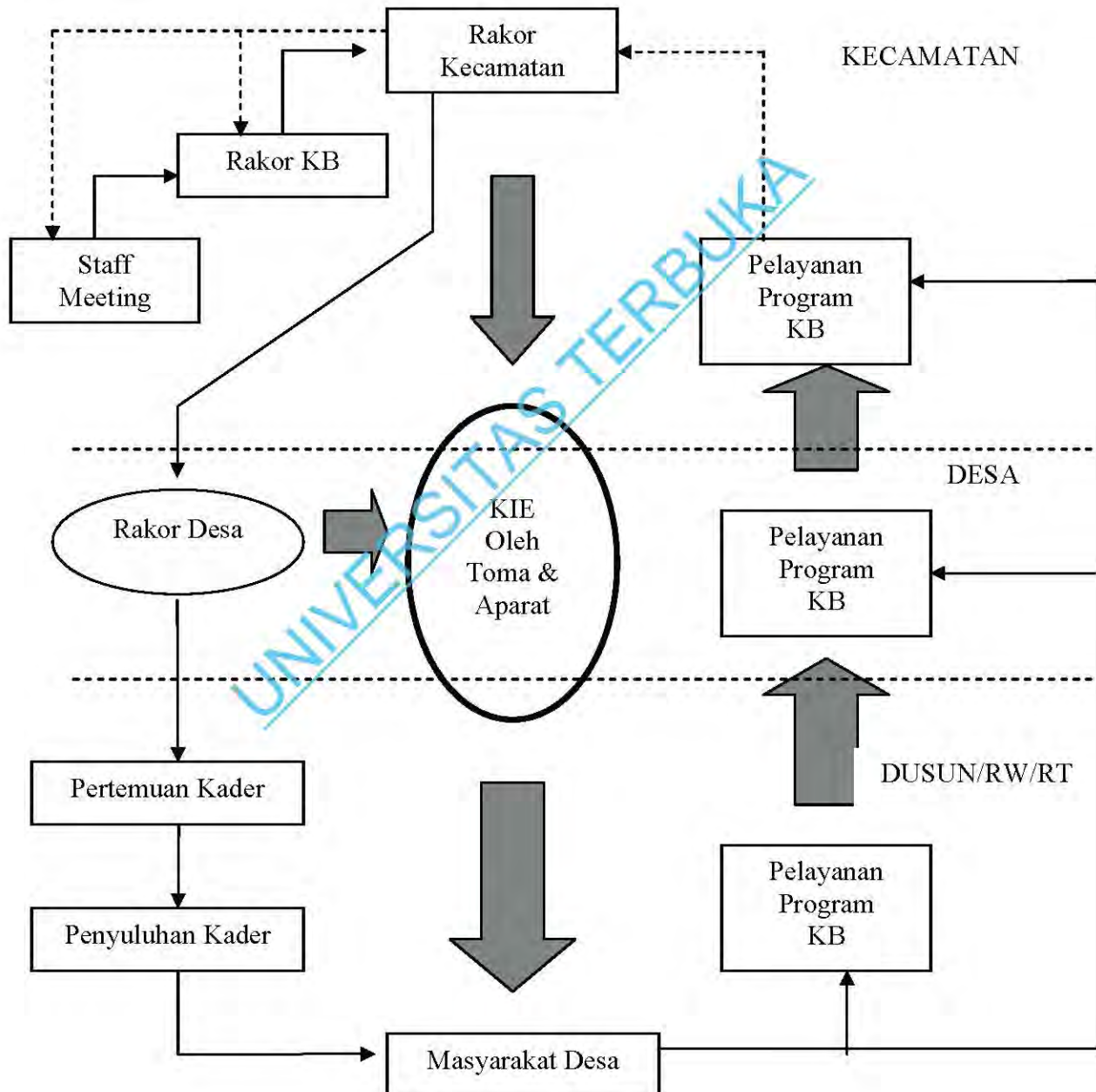
No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Pengawasan Melekat	7 (15,91 %)	37 (84,09 %)	44
2	Pembinaan Program, Ketenagaan, Dana, Sarana dan Pra Sarana dalam Operasional Program KB	44 (100%)	-	44
3	Pemantauan melalui Supervisi, Pencatatan dan Pelaporan	27 (61,36 %)	17 (38,64 %)	44
4	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Kegiatan yang dicapai sesuai dengan Rencana yang telah ditetapkan	35 (79,55 %)	9 (20,45 %)	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.6, Kegiatan Pengendalian Program KB belum optimal. Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, hal tersebut disebabkan masih minimnya koordinasi

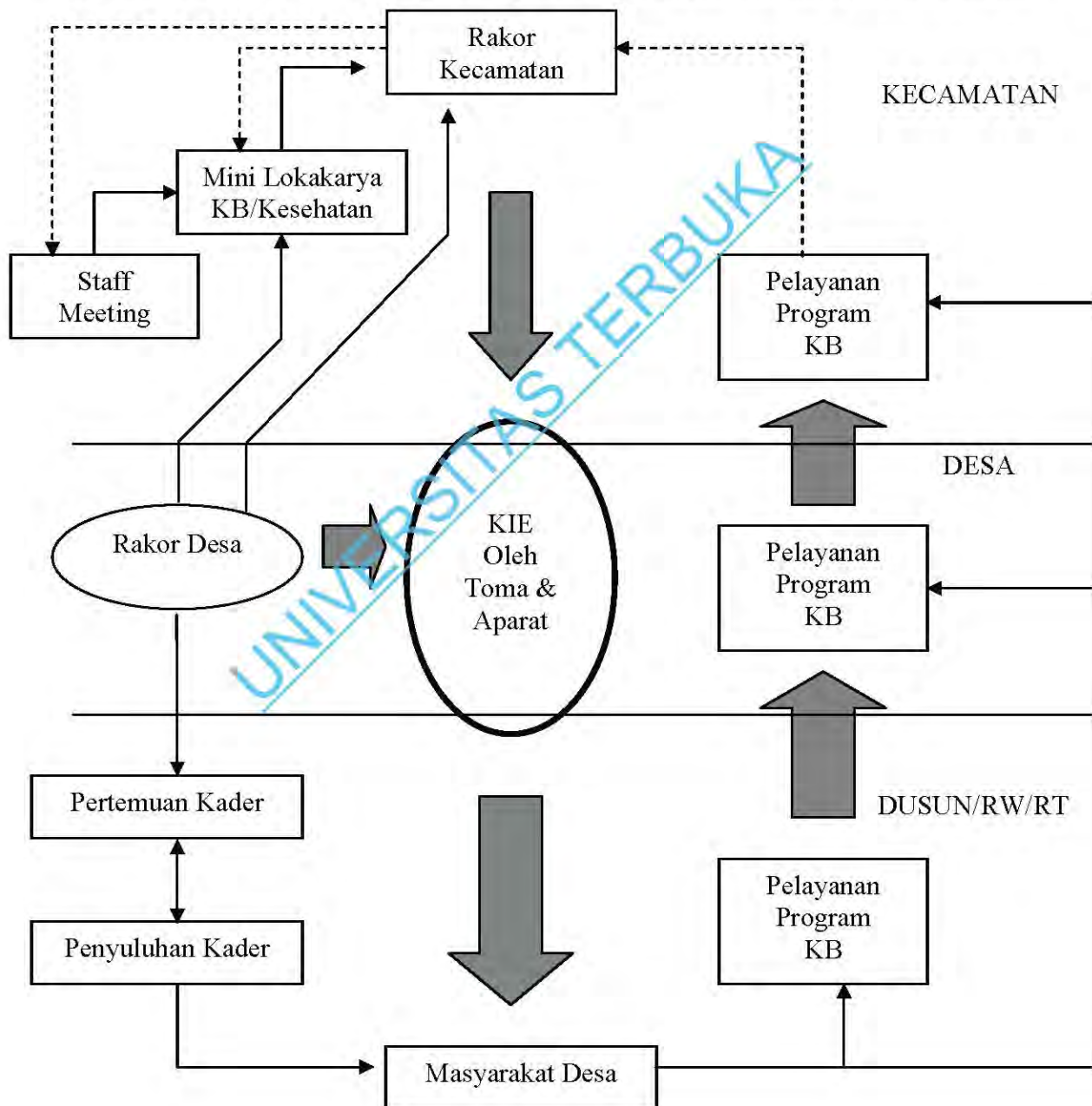
antara pihak – pihak yang terlibat di Kabupaten serta kondisi geogarfis wilayah kecamatan yang sulit dijangkau.

Gambar 4.3. Mekanisme Kegiatan Operasional Program KB Lini Lapangan Tahap Awal



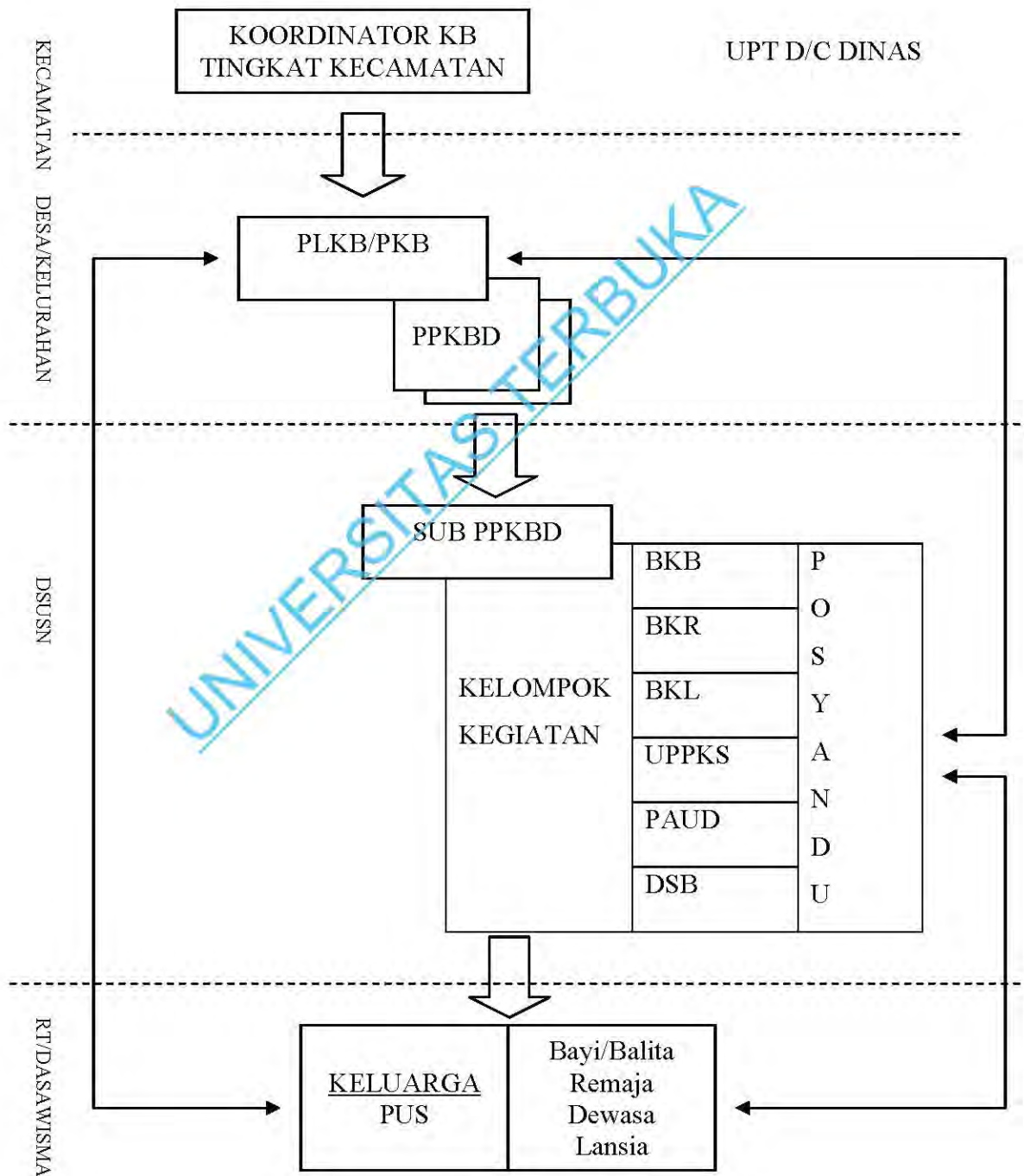
Pada tahap perencanaan operasional, para pengelola program mengupayakan dan memetakan kegiatan secara jelas serta komprehensif terhadap sumber-sumber daya yang telah disediakan dengan jadwal yang rasional.

Gambar 4.4. Mekanisme Kegiatan Operasional Program KB Tahap Perkembangan



Dalam hubungan tersebut, Pola Pembinaan Wilayah Operasional Petugas Lapangan KB digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5. Pola Pembinaan Wilayah Operasional Petugas Lapangan KB



Pada tahap pelaksanaan operasional, pengelola program menyelenggarakan penggerakan kegiatan yang telah dimantapkan pada tahap pengorganisasian. Dalam penggerakan kegiatan, para tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), pihak swasta dan masyarakat dilibatkan agar pendekatan kemasyarakatan dapat berjalan lancar. Pada tahap pengendalian operasional, pengelola program cek ulang, baik pada tingkat perencanaan dan pengorganisasian maupun pelaksanaan operasional agar penyelenggaraan operasional program KB Nasional dapat mencapai Tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk memantapkan Mekanisme Pengelolaan Operasional diperlukan dukungan berbagai Pertemuan sebagai berikut: Rapat pimpinan, Rapat Koordinasi, Pertemuan Telaah Staf Paripurna, Pertemuan Teknis, Sarasehan. Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Rapat Pimpinan Dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Rapat Pimpinan Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	9	20,45
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	33	75,00
3	Tidak pernah dilaksanakan	2	4,55
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.7, Rapat Pimpinan Dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang kadang-kadang saja dilaksanakan. Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, hal tersebut disebabkan karena para pimpinan dengan kesibukan masing-

masing jarang berada ditempat, dan sering menugaskan staf untuk mewakili. Rapat Pimpinan merupakan Forum Pertemuan yang diselenggarakan untuk menetapkan Kebijakan Operasional yang bersumber dari hasil Pertemuan Telaah Staf Paripurna tentang masalah-masalah Strategi. Kebijaksanaan Operasional tersebut kemudian menjadi acuan sebagai Penyusun Perencanaan

Selanjutnya, untuk mengetahui Rapat Koordinasi Dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8. Rapat Koordinasi Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	7	15,91
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	29	65,91
3	Tidak pernah dilaksanakan	8	18,18
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.8, Rapat Koordinasi Dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang, kadang-kadang saja dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya koordinasi antara Stake Holder. Rapat Koordinasi merupakan Forum Penggerakan yang dihadiri oleh Stake Holder (Lintas Sektor baik Swasta, Pemerintah, maupun Masyarakat) dengan maksud untuk mengoperasionalkan secara dinamis berbagai Kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahap Perencanaan dan Pengorganisasian Operasional.

Bentuk-bentuk Rakor tersebut antara lain Rakor Pembangunan atau Rakor lain yang telah dibakukan di Wilayah masing-masing. Rapat dilaksanakan dalam bentuk

Formal, Informal seperti pada Forum Olahraga, dengan mengalokasikan Waktu untuk membahas masalah yang berhubungan dengan Operasional Program yang hasilnya menjadi Kesepakatan/Keputusan bersama. Hal demikian sudah dapat dikatakan sebagai Rapat Koordinasi.

Selanjutnya, untuk mengetahui Pertemuan Telaah Staf Paripurna dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9. Pertemuan Telaah Staf Paripurna Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	14	31,82
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	26	59,09
3	Tidak pernah dilaksanakan	4	9,09
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.9, Pertemuan Telaah Staf Paripurna dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang, kadang-kadang saja dilaksanakan. Hal ini disebabkan dana yang tersedia sangat terbatas, sementara untuk mengumpulkan PKB seluruh Kecamatan (14 Kecamatan) memerlukan dana yang cukup besar. Padahal, pertemuan ini penting diadakan karena masalah-masalah yang menyangkut Operasional harus diketahui oleh semua Staf sehingga tiap-tiap Staf dapat meninjau dan mengaitkan dengan Tugas dan Fungsi yang diemban agar dapat diakomodasi ke dalam Konsep Operasional yang Komprehensif. Konsep ini akan menjadi bahan masukan bagi

Rapat Pimpinan. Bahan Pertemuan ini bersumber dari berbagai Pertemuan Teknis. Selanjutnya, untuk mengetahui Pertemuan Teknis dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10. Pertemuan Teknis Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	30	68,18
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	12	27,27
3	Tidak pernah dilaksanakan	2	4,55
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.10, Pertemuan Teknis dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang, selalu dilaksanakan secara rutin. Hal ini disebabkan dana yang tersedia sangat terbatas, sementara untuk mengumpulkan PKB seluruh Kecamatan (14 Kecamatan) memerlukan dana yang cukup besar. Pertemuan Teknis, dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah Teknis Operasional, baik menyangkut masalah Substansi Program maupun Tata Cara Pelaksanaan Operasional misalnya cara mengoperasionalkan Alat Permainan Edukatif (APE) secara tepat dan benar, mengisi Kartu Menuju Sehat (KMS) dan cara mengakses permodalan. Pertemuan Teknis ini dapat membahas Kasus ataupun Kejadian yang meluas dan juga Penerapan Konsep-Konsep Baru.

Untuk Peristiwa yang bersifat Kasus, Pertemuan Teknis ini dapat dijadikan sebagai Koreksi. Sementara itu, untuk Peristiwa besar/meluas sebagai akibat kekeliruan Kebijakan maka Forum ini diteruskana pada Rapat-Rapat Pimpinan.

Konsep Baru yang akan diaplikasikan juga dapat disampaikan dalam Rapat Pimpinan agar dapat dibakukan sebagai Kebijakan Umum. Pertemuan Teknis ini dapat berupa Seminar, Lokakarya, Pemecahan Masalah, Rapat Pembinaan Wilayah, Rapat Proyek, Rapat Rutin, dsb yang diselenggarakan dari Pusat sampai Desa yang Metarinya sesuai dengan Kebutuhan Wilayah masing-masing.

Selanjutnya, untuk mengetahui Sarasehan dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11. Sarasehan Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	2	4,55
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	23	52,27
3	Tidak pernah dilaksanakan	19	43,18
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.11, Pertemuan Teknis dalam Pengelolaan Operasional Program KB di Kabupaten Sintang, kadang-kadang saja dilaksanakan. Hal ini disebabkan dana yang tersedia sangat terbatas, sementara untuk mengumpulkan PKB seluruh Kecamatan (14 Kecamatan) memerlukan dana yang cukup besar. Sarasehan merupakan Forum Pertemuan yang membahas hasil Pendataan Keluarga untuk menetapkan Intervensi atau bentuk-bentuk Kegiatan yang diperlukan. Sarasehan ini dihadiri oleh berbagai

Stake Holder baik Pemerintah maupun Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, yang ada di Wilayah yang bersangkutan. Hasil Sarasehan akan menjadi masukan bagi Pertemuan Teknis atau Rapat Koordinasi untuk mendapatkan dukungan Operasional yang lebih besar (Komitmen, Dana, Sarana dan Pra Sarana). Sarasehan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan Kebutuhan Operasional di Wilayah masing-masing.

2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

a. Pencatatan Dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi

Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi adalah Suatu Kegiatan Mencatat dan Melaporkan berbagai Aspek yang berkaitan dengan Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan oleh Klinik KB dan Dokter/Bidan Praktek Swasta. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Program KB Nasional Era Desentralisasi meliputi: Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi di Klinik KB dan Dokter/Bidan Praktek Swasta, Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi di Klinik KB dan Dokter/Bidan Praktek Swasta, Keadaan Alat-Alat Kontrasepsi di Klinik KB.

Data Bulanan meliputi: Keadaan Umum, Hasil Pelayanan Peserta KB Baru, Pelayanan Komplikasi, Kegagalan dan Pencabutan Implant, Persediaan Alat Kontrasepsi. Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Penyediaan Data Bulanan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12. Penyediaan Data Bulanan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB

No	Jenis Data Bulanan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Keadaan Umum	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	-	44
2	Hasil Pelayanan Peserta KB Baru	23 (52,27 %)	21 (47,73 %)	-	44
3	Pelayanan Komplikasi, Kegagalan dan Pencabutan Implant	3 (6,82 %)	39 (88,64 %)	2 (4,54 %)	44
4	Persediaan Alat Kontrasepsi	3 (6,82 %)	39 (88,64 %)	2 (4,54 %)	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.12, Penyediaan Data Bulanan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB di Kabupaten Sintang, sebagian sudah ada namun belum lengkap. Hal ini disebabkan pengumpulan data dari kader sering terlambat, karena untuk mengumpulkan data ke lapangan memerlukan waktu yang cukup panjang. Data Keadaan Umum meliputi: Jumlah DBS yang ada dan yang dilaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan. Jumlah Klinik (Pemerintah dan Swasta) yang ada dan yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan, Jumlah Kabupaten/Kota yang ada dan yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan. Data Hasil Pelayanan Peserta KB Baru meliputi Data Menurut Metode Kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntikan, Pill), serta data Menurut Tempat Pelayanan (Klinik KB Pemerintah/Swasta, Dokter/Bidan Praktek Swasta).

Data Pelayanan Komplikasi, Kegagalan dan Pencabutan Implant meliputi, data Menurut Metode Kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntikan) serta data Menurut Tempat Pelayanan (Klinik KB, Dokter/Bidan Praktek Swasta). Data Persediaan Alat Kontrasepsi meliputi data Menurut Metode Kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntikan, Pill), data dengan rincian sisa akhir bulan lalu, penerimaan bulan ini, pengeluaran bulan ini, dan sisa akhir bulan ini serta Laporan Persediaan Alat Kontrasepsi ini hanya dilaporkan dari Klinik KB ke Kabupaten/Kota. Selanjutnya, untuk mengetahui Penyediaan Data Tahunan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13. Penyediaan Data Tahunan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB

No	Jenis Data Tahunan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Jumlah Klinik KB menurut Status, menurut Klasifikasi dan menurut Kepemimpinan Klinik KB	-	31 (70,46 %)	13 (29,54 %)	44
2	Jumlah Petugas Klinik KB terdiri dari Dokter, Bidan, Paramedis Lain dan Tenaga Administrasi	2 (4,55 %)	34 (77,27 %)	8 (18,18 %)	44
3	Jumlah Petugas Klinik KB yang pernah dilatih mengenai IUD, MOW, MOP, Implant, KIP/Konseling serta Pencatatan dan Pelaporan	2 (4,55 %)	34 (77,27 %)	8 (18,18 %)	44
4	Sarana Perlengkapan Klinik KB	-	-	44 (100%)	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.13, Penyediaan Data Tahunan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB di Kabupaten Sintang, sebagian sudah ada namun belum lengkap. Hal ini disebabkan pengumpulan data bulanan dari kader sering terlambat, sehingga rekapitulasi data tahunan juga menjadi terlambat. Data Tahunan meliputi: Jumlah Klinik KB menurut Status, menurut Klasifikasi dan menurut Kepemimpinan Klinik KB, Jumlah Petugas Klinik KB terdiri dari Dokter, Bidan, Paramedis Lain dan Tenaga Administrasi, Jumlah Petugas Klinik KB yang pernah dilatih mengenai IUD, MOW, MOP, Implant, KIP/Konseling serta Pencatatan dan Pelaporan. Sarana Perlengkapan Klinik KB.

Jenis Dan Kegunaan Kartu, Register, Formulir Pelayanan Kontrasepsi di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Jenis Dan Kegunaan Kartu, Register, Formulir Pelayanan Kontrasepsi di Kabupaten Sintang

No	Jenis Kartu, Register, Formulir Pelayanan Kontrasepsi	Kegunaan	Keterangan
1	Kartu Pendaftaran Klinik KB (K/0/KB/04)	Kartu ini digunakan oleh Klinik KB untuk Pendaftaran Pertama bagi Klinik KB Baru pada saat didirikan dan Pendaftaran Ulang untuk semua Klinik KB lama, yang dilakukan pada setiap awal Tahun Anggaran (Bulan Januari).	ada
2	Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Klinik KB Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab. K/0.KB/04)	Formulir ini digunakan oleh Kabupaten/Kota untuk Rekapitulasi dan Melaporkan Data serta Informasi tentang Identitas, Jumlah Tenaga, Pelatihan Teknis Pelayanan dan RR oleh setiap Klinik KB didalam Wilayah Kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan	Ada dan kurang lengkap

No	Jenis Kartu, Register, Formulir Pelayanan Kontrasepsi	Kegunaan	Keterangan
3	Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Klinik KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov. K/0.KB/04)	Formulir ini digunakan oleh BKKBN Provinsi untuk Rekapitulasi dan melaporkan Data serta Informasi tentang Identitas, Tenaga, Pelatihan Teknis Pelayanan dan RR oleh Klinik KB di setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kerja Provinsi yang bersangkutan	Tidak ada
4	Kartu Peserta KB (K/I/KB/04)	Kartu ini digunakan sebagai Tanda Pengenal dan Bukti Diri bagi Peserta KB.	Kurang lengkap, sebagian peserta KB saja yang mendapatkan
5	Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/04)	Kartu Status Peserta KB adalah Kartu yang digunakan untuk Mencatat Identitas Diri dan Hasil Skrining dalam Penggunaan Metode Kontrasepsi dan Pelayanan KB bagi Peserta KB	Kurang lengkap, sebagian peserta KB saja yang mendapatkan
6	Register Hasil Pelayanan KB di Klinik KB (R/I/KB/04)	Buku Register ini digunakan oleh Klinik KB untuk Mencatat Hasil Pelayanan Kontrasepsi yang diberikan kepada Peserta KB Baru dan Peserta KB Lama (Ulangan) pada setiap hari Pelayanan, dan sebagai Sumber Data untuk Membuat Laporan Bulanan Klinik KB (F/II/KB/04) pada setiap akhir bulan	ada
7	Register Alat Kontrasepsi di Klinik KB (R/II/KB/04)	Register Alat Kontrasepsi di Klinik KB ini digunakan oleh Klinik KB untuk Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran (Mutasi) serta Persediaan Alat Kontrasepsi di Klinik KB dan sebagai Sumber Data untuk membuat Laporan Bulanan Klinik KB (F/II/KB/04) tentang Keadaan Alat Kontrasepsi pada setiap akhir bulan	ada
9	Buku Bantu Hasil Pelayanan Kontrasepsi pada Dokter/Bidan Praktek Swasta (B/I/DBS/04)	Buku ini digunakan oleh Dokter/Bidan Praktek Swasta untuk Mencatat Hasil Pelayanan Peserta KB Baru dan Pencabutan Implant pada setiap hari Pelayanan	Kurang lengkap, sebagian saja yang mendapatkan
10	Laporan Bulanan	Formulir ini digunakan oleh Petugas	Tidak ada

No	Jenis Kartu, Register, Formulir Pelayanan Kontrasepsi	Kegunaan	Keterangan
	Petugas Penghubung tentang Hasil Pelayanan Kontrasepsi oleh Dokter/Bidan Praktek Swasta (F/I/PH/DBS/04)	Penghubung DBS untuk Mencatat dan Melaporkan Hasil Pelayanan Kontrasepsi serta Pencabutan Implant yang dilakukan oleh Dokter/Bidan praktek swasta setiap bulan.	
11	Laporan Bulanan Klinik KB (F/II/KB/04)	Formulir ini digunakan oleh Klinik KB untuk Melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan Klinik KB dan Dokter/Bidan Praktek Swasta, Pelayanan Komplikasi, Kegagalan Dan Pencabutan Implant serta Keadaan Alat Kontrasepsi di Klinik KB.	ada
12	Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB Tingkat Kabupaten / Kota (Rek.Kab.F / II/KB/04)	Formulir ini digunakan oleh Kabupaten/Kota untuk Melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan oleh Klinik KB Pemerintah dan Swasta, Dokter dan Bidan Praktek Swasta, Pelayanan Komplikasi dan Pencabutan Implant yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota	ada
13	Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov.F/II/KB/04)	Formulir ini digunakan oleh BKKBN Provinsi untuk Melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi yang dilakukan oleh Klinik KB Pemerintah dan Swasta, Dokter dan Bidan Praktek Swasta, Pelayanan Komplikasi dan Pencabutan Implant pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan	ada

Sumber: Hasil Observasi, Oktober 2009.

Jenis Dan Kegunaan Kartu, Register, Formulir Pelayanan Kontrasepsi di Kabupaten Sintang sebagaimana terlihat pada tabel di atas masih belum lengkap. Hal ini disebabkan, jenis data tersebut sulit diperoleh oleh para kader serta blanko –

blanko penyediaannya dari Kabupaten sering tidak disampaikan kepada PKB di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, Kartu Pendaftaran Klinik KB (K/0/KB/04), berisikan Informasi tentang Identitas, Jumlah Tenaga dan Sarana/Perlengkapan Klinik KB yang bersangkutan. Kartu Peserta KB (K/I/KB/04), digunakan untuk mencari Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/04), dan guna memperoleh Pelayanan Ulang disemua Klinik KB dan Tempat Pelayanan KB lain. Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/04) dibuat untuk setiap Pengunjung di Klinik KB yang ingin menjadi Peserta KB dan Peserta KB Lama (Pindahan dari Klinik KB atau Tempat Pelayanan KB lain).

Menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, Laporan Bulanan Petugas Penghubung tentang Hasil Pelayanan Kontrasepsi oleh Dokter/Bidan Praktek Swasta (F/I/PH/DBS/04) dibuat dengan cara Mengambil/Mencatat Data atau Informasi dari Buku Bantu Hasil Pelayanan Kontrasepsi pada Dokter/Bidan Praktek Swasta (B/I/DBS/04). Laporan Bulanan Klinik KB (F/II/KB/04) mencakup Identitas Klinik KB Pemerintah dan Swasta termasuk jumlah Dokter dan Bidan Praktek Swasta, Hasil Pelayanan Peserta KB Baru dan Pelayanan Komplikasi, Kegagalan, Pencabutan Implant. Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.F/II/KB/04) merupakan Rekapitulasi dari semua Laporan Bulanan Klinik KB (F/II/KB/04) yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov.F/II/KB/04) merupakan Rekapitulasi dari semua

Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.F/II/KB/04) yang diterima oleh BKKBN Provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya, Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15. Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu tepat waktu	2	15,91
2	Kadang-kadang saja tepat waktu	27	61,36
3	Tidak pernah tepat waktu (terlambat)	10	22,73
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.15, Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB tidak selalu tepat waktu. Hal ini disebabkan pengumpulan data bulanan dari kader sering terlambat, selain karena terbatasnya petugas, juga karena untuk proses pengumpulan data cukup sulit dilakukan karena kondisi wilayah yang berjauhan dan sulit ditempuh. Padahal, Data dicatat setiap hari atau setiap Pelaksanaan Kegiatan dan dilaporkan secara bulanan maupun tahunan. Jangkauan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Konstrasepsi Program KB Nasional Era Desentralisasi adalah para Pengelola/Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Klinik KB, Dokter/Bidan Praktek Swasta (DBS) dan Petugas Penghubung DBS.

b. Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan

Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional yang meliputi Pengumpulan, Pencatatan serta Pengolahan Data dan Informasi tentang Kegiatan dan hasil Kegiatan Operasional. Sasaran Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Era Desentralisasi mencakup 4 (empat) Sasaran Utama, yaitu : Keadaan Umum, Kegiatan Operasional PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan, PPLKB/Pengelola Program KB Kecamatan dan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Program KB Kabupaten/Kota, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sampai ke Pusat dan khusus untuk Data Pembinaan PUS dan kesertaan ber KB sampai Wilayah Provinsi. Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Penyediaan Data Bulanan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKE di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16. Penyediaan Data Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKE

No	Jenis Data Bulanan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Keadaan Umum	2 (4,55%)	42 (95,45%)	-	44
2	Kegiatan Operasional	-	44 (100%)	-	44
3	Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Kegiatan BKB, BKR, dan BKL	-	40 (90,91%)	4 (9,09%)	44
4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	-	44 (100%)	-	44
5	Pembinaan PUS dan Kesertaan ber KB	11 (25%)	33 (75%)	-	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.16, Penyediaan Data Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB sudah ada namun belum lengkap. Hal ini disebabkan, jenis data tersebut sulit diperoleh oleh para kader serta blanko – blanko penyediaannya dari Kabupaten sering tidak disampaikan kepada PKB di lapangan. Data Bulanan meliputi: Keadaan Umum, Kegiatan Operasional, Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Kegiatan BKB, BKR, dan BKL, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, serta Pembinaan PUS dan Kesertaan ber KB. Keadaan Umum terdiri atas, Jumlah Kecamatan yang melapor Kegiatan dan Hasil Kegiatan Program KB di Kecamatan yang bersangkutan oleh PPLKB/Pengelola Program KB Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Program KB di Desa/Kelurahan yang bersangkutan oleh PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan, Jumlah PPKBD yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatannya, Jumlah Sub PPKBD yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatannya, Jumlah Kelompok Kegiatan BKB yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatannya, Jumlah Kelompok Kegiatan BKR yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatannya, Jumlah Kelompok Kegiatan BKL yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatannya, Jumlah Kelompok Kegiatan UPPKS yang melaporkan Kegiatan dan Hasil Kegiatannya.

Data Kegiatan Operasional terdiri atas, Rakor Program KB Nasional Tingkat Kecamatan, Rakor Program KB Nasional Tingkat Desa/Kelurahan, TKBK dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan. Data Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Kegiatan BKB, BKR, dan BKL terdiri atas, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota

Kelompok Kegiatan BKB, BKR, & BKL, Jumlah Pertemuan/Penyuluhan di Kelompok Kegiatan BKB, BKR, dan BKL, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKB, BKR, dan BKL hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan.

Data Pembinaan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS (Anggota Keseluruhan dan Keluarga Pra. S dan KS I), Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS sedang menggunakan Bantuan Modal (Anggota Keseluruhan dan Keluarga Pra. S dan KS . I), Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS yang berusaha (Anggota Keseluruhan dan Keluarga Pra. S dan KS. I). Data Pembinaan PUS dan Kesertaan ber KB, Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), PUS yang menjadi Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi, PUS yang bukan Peserta KB dikelompokkan menjadi hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, tidak ingin anak lagi), Khusus Pembinaan PUS dan Kesertaan ber KB dilaporkan hanya sampai Tingkat Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, untuk mengetahui Penyediaan Data Tahunan Pengendalian Lapangan oleh PKB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17. Penyediaan Data Tahunan Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB

No	Jenis Data Tahunan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Data Cakupan Wilayah	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	-	44
2	Petugas Lapangan KB	44 (100 %)	-	-	44

No	Jenis Data Tahunan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
3	Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB) dan Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	28 (63,64 %)	30 (36,36 %)	-	44
4	KB-Perusahaan	-	37 (84,09 %)	7 (15,91 %)	44
5	Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	-	28 (63,64 %)	30 (36,36 %)	44
6	Tempat Pelayanan Kontrasepsi Pemerintah dan Swasta	-	44 (100 %)	-	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.17, Penyediaan Data Tahunan Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB sudah ada namun belum lengkap. Hal ini disebabkan, jenis data tersebut sulit diperoleh oleh para kader serta blanko – blanko penyediaannya dari Kabupaten sering tidak disampaikan kepada PKB di lapangan. Data Tahunan meliputi: Data Cakupan Wilayah, Petugas Lapangan KB, Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB) dan Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS, KB-Perusahaan, Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Tempat Pelayanan Kontrasepsi Pemerintah dan Swasta. Frekuensi Laporan, Data dicatat setiap hari atau setiap Pelaksanaan Kegiatan dan dilaporkan secara bulanan maupun tahunan.

Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18. Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu tepat waktu	2	4,55
2	Kadang-kadang saja tepat waktu	38	86,36
3	Tidak pernah tepat waktu (terlambat)	4	9,09
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.18, Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB kadang-kadang saja tepat waktu. Hal ini disebabkan, jenis data tersebut sulit diperoleh oleh para kader serta blanko – blanko penyediaannya dari Kabupaten sering tidak disampaikan kepada PKB di lapangan. Jangkauan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KB adalah para Pengelola/Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta Kelompok Kegiatan di Tingkat Dusun/RW dan RT seluruh Indonesia.

Jenis-Jenis Dan Kegunaan Formulir Pengendalian Lapangan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19. Jenis-Jenis Dan Kegunaan Formulir Pengendalian Lapangan di Kabupaten Sintang

No	Jenis-Jenis Formulir Pengendalian Lapangan	Kegunaan	Keterangan
1	Register Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (R/I/Sub.PPKBD/04)	Digunakan oleh Sub PPKBD untuk Mencatat Nama PUS yang menjadi Peserta KB menurut Metode Kontrasepsi, Mencatat PUS yang belum/tidak menjadi Peserta KB yaitu yang sedang Hamil, Ingin Anak Segera, Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak Lagi	Belum tersedia di semua Desa
2 3	Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (C/I/BKB/04)	Digunakan oleh Ketua Kelompok untuk Mencatat Jumlah Keluarga Sasaran Kelompok Kegiatan BKB menurut Kelompok Umur Anak, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKB menurut Kelompok Umur Anak, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKB hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan, Jumlah Pertemuan/Penyuluhan, Jumlah Kader BKB yang Terdaftar, Jumlah Kader BKB yang hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan, Jumlah Keluarga yang dikunjungi oleh Kader	Belum tersedia di semua Desa
	Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (C/I/BKR/04)	Digunakan sebagai Sarana untuk Mencatat Jumlah Keluarga Sasaran Kelompok Kegiatan BKR, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKR, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKR hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan, Jumlah Anak Usia 6-<15 Tahun yang Belum Kawin, Jumlah Pertemuan/Penyuluhan, Jumlah Kader Kelompok Kegiatan BKR yang Terdaftar, Jumlah Kader Kelompok BKR hadir dalam	Belum tersedia di semua Desa

No	Jenis-Jenis Formulir Pengendalian Lapangan	Kegunaan	Keterangan
		Pertemuan/Penyuluhan serta Jumlah Keluarga yang dikunjungi oleh Kader	
4	Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (C/I/BKL/04)	Digunakan sebagai Sarana untuk Mencatat Jumlah Keluarga Sasaran Kelompok Kegiatan BKL, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKL, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKL hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan, Jumlah Pertemuan/Penyuluhan, Jumlah Kader Kelompok Kegiatan BKL yang Terdaftar, Jumlah Kader Kelompok Kegiatan BKL hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan, Jumlah Keluarga yang dikunjungi oleh Kader	Belum tersedia di semua Desa
5	Catatan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (C/I/UPPKS/04)	Digunakan sebagai Sarana untuk Mencatat Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota UPPKS, Jumlah Keluarga Pra. S dan KS. I yang menjadi Anggota UPPKS, Jumlah Keluarga yang menjadi anggota Kelompok Kegiatan UPPKS menggunakan Bantuan Modal, Jumlah Keluarga Pra. S dan KS. I yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS menggunakan Bantuan Modal, Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS berusaha, Jumlah Keluarga Pra. S dan KS. I yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS berusaha	Belum tersedia di semua Desa
6	Catatan Keadaan Program KB Nasional Tingkat	Digunakan oleh PPKBD untuk Mencatat Keadaan Umum, Kegiatan Operasional, Pembinaan Ketahanan	Belum tersedia di semua Desa

No	Jenis-Jenis Formulir Pengendalian Lapangan	Kegunaan	Keterangan
	Desa/Kelurahan pada PPKBD (C/I/Des.DaI/04)	Keluarga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan PUS dan kesertaan ber KB yang dilaporkan	
7	Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Desa/Kelurahan (F/I/Des.DaI/04)	Digunakan oleh PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan untuk Melaporkan Keadaan Umum, Kegiatan Operasional PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan PUS dan kesertaan ber KB di Desa/Kelurahan yang bersangkutan	Belum tersedia di semua Desa
8	Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Kecamatan (F/I/Kec.DaI/04)	Digunakan oleh Pengelola Program KB Kecamatan untuk Melaporkan Keadaan Umum, Kegiatan Operasional Pengelola Program KB Kecamatan dan PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan PUS dan kesertaan ber KB di Kecamatan yang bersangkutan	Sudah tersedia lengkap di Kecamatan
9	Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Kabupaten/Kota (F/I/Kab.DaI/04)	Digunakan oleh Kabupaten Kota untuk melaporkan Keadaan Umum, Kegiatan Operasional Pengelola Program KB Kecamatan dan PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan PUS dan kesertaan ber KB di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	Tidak ada
10	Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Provinsi (F/I/Prov.DaI/04)	Digunakan oleh Kepala BKKBN untuk Melaporkan Keadaan Umum, Kegiatan Operasional Pengelola Program KB Kecamatan dan PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan, Pembinaan	Tidak ada

No	Jenis-Jenis Formulir Pengendalian Lapangan	Kegunaan	Keterangan
		Ketahanan Keluarga dan Pembinaan PUS dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi yang bersangkutan	
11	Kartu Data Potensi Wilayah Kecamatan Program KB Nasional (K/0/Kec.DaI/04)	oleh Pengelola Program KB Kecamatan digunakan sebagai Sarana untuk mengumpulkan Data Potensi Wilayah Kecamatan dan dilakukan setiap tahun pada bulan Januari	Sudah tersedia lengkap di Kecamatan
12	Rekapitulasi Data Potensi Wilayah Kecamatan Program KB Nasional Kabupaten/Kota (Rek.Prov.K/0/Kec.DaI/04)	Kartu ini oleh Kabupaten/Kota digunakan sebagai Sarana untuk Melaporkan Data Potensi Wilayah Kecamatan di Kabupaten/Kota setiap tahun	Tidak ada
13	Rekapitulasi Data Potensi Wilayah Kecamatan Program KB Nasional Provinsi (Rek.Prov.K/0/Kec.DaI/04)	Kartu ini oleh BKKBN Provinsi digunakan sebagai Sarana untuk Melaporkan Data Potensi Wilayah Kecamatan dan di Provinsi setiap tahun	Tidak ada

Sumber: Hasil Observasi, Oktober 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Register Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (R/I/Sub.PPKBD/04), digunakan sebagai salah satu Sumber untuk Membuat Catatan PPKBD (C/I/Des.DaI/04). Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (C/I/BKB/04) digunakan sebagai salah satu Sumber Data untuk membuat Catatan PPKBD (C/I/Des.DaI/04). Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (C/I/BKR/04) digunakan sebagai salah satu Sumber Data untuk membuat Catatan PPKBD (C/I/Des.DaI/04). Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (C/I/BKL/04) digunakan sebagai salah Sumber Data untuk

membuat Catatan PPKBD (C/I/Des.DaI/04). Catatan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (C/I/UPPKS/04) digunakan sebagai salah Sumber Data untuk membuat Catatan PPKBD (C/I/Des.DaI/04). Data untuk Pengisian C/I/Des.DaI/04 ini adalah dari R/I/Sub.PPKBD/04, C/I/BKB/04, C/I/BKL/04, C/I/UPPKS/04.

Menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, Data untuk Mengisi F/I/Des.DaI/04 adalah dari C/I/Des.DaI/04. Data untuk Mengisi F/I/Kec.DaI/04 ini adalah dari F/I/Des.DaI/04 yang diterima Pengelola Program KB Kecamatan dan Catatan yang ada di Pengelola Program KB Kecamatan. Data untuk Mengisi F/I/Kab.DaI/04 ini adalah dari F/I/Kec.DaI/04 yang diterima Kabupaten/Kota. Data untuk Mengisi F/I/Prov.DaI/04 ini adalah dari F/I/Kab.DaI/04 yang diterima oleh BKKBN Provinsi.

Menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, Langkah-langkah pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan adalah Sub PPKBD Mencatat PUS dan Hasil Pembinaannya terhadap para Peserta KB, PUS bukan Peserta KB (Hamil, Ingin Anak Segera, Ingin Anak Ditunda, Tidak Ingin Anak Lagi) ke dalam R/I/Sub.PPKBD/04 serta Datanya dicatat oleh PPKBD kedalam C/I/Des.DaI/04 pada setiap bulan. Ketua Kelompok Kegiatan BKB Mencatat Hasil Kegiatan Kelompok Kegiatan BKB ke dalam C/I/BKB/04 serta Datanya dicatat oleh PPKBD ke dalam C/I/Des.DaI/04 pada setiap bulan.

Menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, Ketua Kelompok kegiatan BKR Mencatat Hasil Kegiatan Kelompok Kegiatan BKR

kedalam C/I/BKR/04 serta Datanya dicatat oleh PPKBD ke dalam C/I/Des.DaI/04 pada setiap bulan. Ketua Kelompok Kegiatan BKL Mencatat Hasil Kegiatan Kelompok Kegiatan BKL kedalam C/I/BKL/04 serta Datanya dicatat oleh PPKBD ke dalam C/I/Des.DaI/04 pada setiap bulan. Ketua Kelompok Kegiatan UPPKS Mencatat Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kedalam C/I/UPPKS/04 serta Datanya dicatat oleh PPKBD kedalam C/I/Des.DaI/04 pada setiap bulan.

Menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan pada akhir bulan membuat Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Desa/Kelurahan (F/I/Des.DaI/04) berdasarkan Data dari Catatan PPKBD di Wilayah Kerja PLKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Pengelola Program KB Kecamatan pada akhir bulan membuat Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Kecamatan (F/I/Kec.DaI/04) berdasarkan (F/I/Des.DaI/04) yang diterima serta melaporkannya kepada Kabupaten/Kota setiap bulan. Disamping itu Pengelola Program KB Kecamatan Mengisi K/0/Kec.DaI/04 dan Mengirimkannya kepada Kabupaten/Kota setiap bulan.

Kabupaten/Kota membuat Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Provinsi (F/I/Kab.DaI/04) berdasarkan F/I/Kec.DaI/04 yang diterima dan Mengirimkannya kepada Kepala BKKBN Provinsi dengan tembusan BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik). Disamping itu Kabupaten/Kota membuat Rekapitulasi Data Potensi Wilayah Kecamatan Program KB Nasional di

Kabupaten/Kota (Rek.Kab.K/0/Kec.Dal/04) berdasarkan K/0/Kec.Dal/04 yang diterima dan Mengirimkannya kepada Kepala BKKBN Propinsi dengan tembusan BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik).

BKKBN Provinsi membuat Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Provinsi (F/I/Prov.Dal/04) berdasarkan F/I/Kec.Dal/04 yang diterima dan Mengirimkannya kepada Kepala BKKBN Provinsi dengan tembusan BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik). Disamping itu BKKBN Provinsi membuat Rekapitulasi Data Potensi Wilayah Kecamatan Program KB Nasional di Provinsi (Rek.Prov/K/0/Kec.Dal/04) berdasarkan Rek.Kab K/0/Kec.Dal/04 yang diterima dan Mengirimkannya ke BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik) setiap tahun.

Menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, Mekanisme pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan adalah Hasil Kegiatan Pembinaan Sub PPKBD yang telah dicatat dalam R/I/Sub PPKBD/04 dilaporkan pada Pertemuan Rutin kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hasil Kegiatan Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, Kelompok Kegiatan UPPKS, yang dicatat dalam C/I/BKB/04, C/I/BKR/04, C/I/BKL/04, C/I/UPPKS/04 dilaporkan kepada Kabupaten/Kota dalam Pertemuan Rutin setiap Tanggal 1 bulan berikutnya.

Hasil Pembinaan Sub PPKBD dan Hasil Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, Kelompok UPPKS, dilaporkan oleh PPKBD kepada LKB/PKB/Pengelola Program KB Desa/Kelurahan dengan menggunakan Catatan PPKBD (C/I/Des.Dal/04) selambat-lambatnya Tanggal 2 bulan berikutnya. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional (F/I/Des.Dal/04) oleh PLKB/PKB/Pengelola

Program KB Desa/Kelurahan dikirim kepada Pengelola Program KB Kecamatan setiap bulan selambat-lambatnya Tanggal 5 bulan berikutnya.

Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Kecamatan F/I/Kec.Dal/04 oleh Pengelola Program KB Kecamatan dikirim ke Kabupaten/Kota setiap bulan selambat-lambatnya Tanggal 7 bulan berikutnya. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Provinsi (F/I/Prov.Dal/04) dibuat oleh Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke BKKBN Provinsi dengan tembusan ke BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik) selambat-lambatnya Tanggal 10 bulan berikutnya.

Pengelola Program KB Kabupaten/Kota melakukan Pengolahan Laporan F/I/Kec.Dal/04 yang diterima dan mengirimkan kepada Bupati/Walikota serta mengumpunbalikan kepada Pengelola Program KB Kecamatan dan Mitra Kerja Tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya Tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Provinsi (F/I/Prov.Dal/04) oleh BKKBN Provinsi dikirim ke BKKBN Pusat setiap bulan selambat-lambatnya Tanggal 15 bulan berikutnya. Disamping itu melakukan pengoLahan (F/I/Prov.Dal/04) dan Melaporkn kepada Gubernur serta mengupanbalikan kepada Pengelola Program KB Kabupaten/Kota dan Mitra Kerja Tingkat Provinsi selambat-lambatnya pada akhir bulan.

Hasil Pengumpulan Data Potensi Wilayah Kecamatan Program KB Nasional (K/0/Kec.Dal/04) oleh Pengelola Program KB Kecamatan dikirim ke Pengelola Program KB Kabupaten/Kota selambat-lambatnya Tanggal 7 Februari setiap tahun.

Pengelola Program KB Kabupaten/Kota merkapitulasi Hasil Pengumpulan Data Potensi Wilayah Kecamatan Program KB Nasional (Rek.Kab.K/0/Kec.Dal/04) berdasarkan K/0/Kec.Dal/04 yang diterima dan mengirimkan ke BKKBN Provinsi dengan tembusan ke BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik) selambat-lambatnya Tanggal 14 Februari setiap tahun. Disamping itu melakukan Pengolahan Rek.Kab.K/0/Kec.Dal/04 dan Melaporkan kepada Bupati/Walikota serta mengumpanbalikan kepada Pengelola Program KB Kecamatan dan Mitra Kerja Tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambat pada bulan berikutnya.

BKKBN Provinsi merkapitulasi Hasil Pengumpulan Data Potensi Wilayah Kecamatan Program KB Nasional (Rek.Prov.K/0/Kec.Dal/04) berdasarkan Rek.Kab.K/0/Kec.Dal/04 yang diterima dan Melaporkannya ke BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik) selambat-lambat Tanggal 21 Februari setiap tahun. Disamping itu melakukan Pengolahan Rek.Prov.K/0/Kec.Dal/04 dan Melaporkan kepada Gubernur serta mengumpanbalikan kepada Pengelola Program KB Kabupaten/Kota dan Mitra Kerja Tingkat Provinsi pada bulan berikutnya. BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik bersama Direktorat Pengolahan dan Teknologi Informasi) Mengolah F/I/Prov.Dal/04 yang diterima dan mengumpanbalikan ke BKKBN Provinsi serta Mitra Kerja Tingkat Pusat pada setiap akhir bulan.

BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik bersama Direktorat Pengolahan dan Teknologi Informasi) mengolah Rek.Prov.K/0/Kec.Dal/04 yang diterimanya dan mengumpanbalikan ke BKKBN Provinsi serta Mitra Kerja Tingkat

Pusat pada akhir Februari setiap tahunnya. BKKBN Pusat (Direktorat Pelaporan dan Statistik) mengumpankan Data Strategis dan Selektif kepada Bupati/Walikota baik setiap bulan maupun setiap tahun.

c. Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan Keluarga

Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan Keluarga adalah Kegiatan Pengumpulan Data Primer tentang Data Demografi, Data Keluarga Berencana, Data Tahapan Keluarga Sejahtera, dan Data Individu yang dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah (Kantor BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (Bulan Juli sampai dengan September setiap Tahun) melalui Kunjungan ke Keluarga dari Rumah ke Rumah Pendataan Keluarga merupakan Kegiatan untuk mendapat Data dan Informasi tentang Status dan Kondisi Keluarga dan Individu Anggota Keluarga.

Pendataan Keluarga dilaksanakan sejak Tahun 1994 dan sampai dengan Tahun 2004 sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali, dua belas kali Pendataan Keluarga tersebut, tiga kali diantaranya (Tahun 2002-2004) dilaksanakan melalui Pemutakhiran Data. Sasaran Pendataan Keluarga adalah Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Pendataan Keluarga mencakup Lima Aspek, yaitu Demografi, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Anggota Keluarga, dan Status Keluarga dari Segi Kemiskinan.

Dilihat dari segi penyediaan data hasil pendataan keluarga oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20. Penyediaan Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB

No	Jenis Data	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Aspek Demografi	16 (36,36 %)	28 (63,64 %)	-	44
2	Aspek Keluarga Berencana	16 (36,36 %)	28 (63,64 %)	-	44
3	Aspek Tahapan Keluarga Sejahtera	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	-	44
4	Aspek Anggota Keluarga	12 (27,27 %)	32 (72,73 %)	-	44
5	Status Keluarga dari Segi Kemiskinan	14 (31,82 %)	30 (63,64 %)	-	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.20, Penyediaan Data Hasil Pendataan Keluarga oleh PKB sudah ada, namun belum lengkap. Hal ini disebabkan jenis data tersebut sulit diperoleh oleh para kader serta blanko – blanko penyediaannya dari Kabupaten sering tidak disampaikan kepada PKB di lapangan. Data dimaksud adalah, Aspek Demografi terdiri dari Variabel: Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin (Laki-laki, Perempuan), Kepala Keluarga menurut Status Pekerjaan (Bekerja, Tidak Bekerja), Kepala Keluarga menurut Status Perkawinan (Kawin, Janda/Duda, Belum Kawin), Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan (Tidak Tamat SD, Tamat, SD/SLTP, Tamat SLTA, Tamat AK/PT), Keluarga mendapatkan Kredit Mikro/Bantuan Modal (Ya/Tidak), Jumlah Jiwa dalam Keluarga menurut Jenis Kelamin (Laki-Laki, Perempuan), Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 Tahun, Jumlah Jiwa dalam Keluarga yang dirinci menurut Kelompok Umur tertentu.

Aspek Keluarga Berencana terdiri dari Variabel: Nama Isteri dari Pasangan Usia Subur (PUS), Umur Isteri dari Pasangan Usia Subur, menurut Kelompok Umur (<20 Tahun, 20-29 Tahun, 20-49 Tahun), Peserta KB (Pemerintah, Swasta Per Metode Kontrasepsi dan Peserta KB yang Implantnya perlu dicabut tahun depan), Bukan Peserta KB (Hamil, Ingin Anak Segera, Ingin Anak Ditunda, Tidak Ingin Anak). Aspek Tahapan Keluarga Sejahtera terdiri dari variabel: Agama, Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana, Tabungan, Interaksi dalam Keluarga, Interaksi dalam lingkungan, Informasi, serta Peranan dalam Masyarakat.

Aspek Status Keluarga dari Segi Kemiskinan, terdiri dari: Indikator Tambahan (Tidak Berlaku Untuk Menentukan Tahapan KS) yaitu Keluarga memperoleh/akses Sumber Air Minum dari Air Kemasan/Ledeng/Pompa/Sumur, atau Mata Air Terlindung), Keluarga memiliki Jamban sendiri untuk Buang Air Besar), Keluarga menggunakan Kompor Gas/Listrik untuk memasak sehari-hari), Keluarga menggunakan Listrik sebagai Sumber Penerangan). Status Keluarga dari Segi Kemiskinan, yaitu: Miskin, Hampir Miskin, Tidak Miskin.

Frekuensi Penyampaian Data Hasil Pendataan Keluarga oleh PKB adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21. Frekuensi Penyampaian Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB Oleh PKB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu tepat waktu	-	-
2	Kadang-kadang saja tepat waktu	-	-
3	Tidak pernah tepat waktu (terlambat)	44	100
	Jumlah	44	100

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.21, Frekuensi Penyampaian Data Hasil Pendataan Keluarga oleh PKB di Kabupaten Sintang tidak pernah tepat waktu (terlambat). Hal ini disebabkan, jenis data tersebut sulit diperoleh oleh para kader serta blanko – blanko penyediaannya dari Kabupaten sering tidak disampaikan kepada PKB di lapangan. Jangkauan Pendataan Keluarga meliputi Wilayah RT, Dusun/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Tingkat Nasional.

Data yang dikumpulkan melalui Pendataan Keluarga terutama bermanfaat untuk :

- Penentu Sasaran yang lebih tajam berdasarkan Kondisi, Potensi dan Kebutuhan Aktual dari masing-masing Keluarga yang ada disetiap Tingkatan Wilayah.
- Pembuatan Peta Keluarga berdasarkan Tingkat Kesertaan KB, Tingkat Pencapaian Tahapan Keluarga Sejahtera tiap Keluarga disuatu Wilayah tertentu.
- Penentu Program Dukungan yang sesuai untuk setiap Keluarga dan setiap Wilayah tertentu di dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera.

- d. Sarana Motivasi untuk mendorong setiap Keluarga meningkatkan Tahap Kesejahteraannya serta sekaligus untuk merangsang kepedulian Keluarga-Keluarga yang sudah lebih mampu untuk bersama-sama mengangkat Tingkat Kesejahteraan Keluarga-Keluarga yang kurang mampu yang ada di Lingkungannya.
- e. Kepentingan Program Pembangunan Sektor-Sektor lain, salah satu diantaranya yang sangat penting adalah untuk Program-Program Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan atau dari Ketertinggalannya dalam berbagai Aspek Kehidupan.
- f. Merencanakan, Memantau maupun menilai Program-Program dukungan yang dilakukan terhadap suatu Wilayah atau suatu Kelompok Masyarakat disuatu Tingkat Wilayah tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Pemanfaatan Data Hasil Pendataan Keluarga oleh PKB di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22. Pemanfaatan Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB

No	Jenis Pemanfaatan	Selalu dimanfaatkan	Kadang-kadang dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan sama sekali	Jumlah
1	Penentu Sasaran yang lebih tajam berdasarkan Kondisi, Potensi dan Kebutuhan Aktual dari masing-masing Keluarga yang ada disetiap Tingkatan Wilayah	3 (6,82 %)	37 (84,09 %)	4 (9,09 %)	44

No	Jenis Pemanfaatan	Selalu dimanfaatkan	Kadang-kadang dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan sama sekali	Jumlah
2	Pembuatan Peta Keluarga berdasarkan Tingkat Kesertaan KB, Tingkat Pencapaian Tahapan Keluarga Sejahtera tiap Keluarga disuatu wilayah tertentu	-	-	44 (100%)	44
3	Penentu Program Dukungan yang sesuai untuk setiap Keluarga dan setiap Wilayah tertentu di dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera	3 (6,82 %)	37 (84,09 %)	4 (9,09 %)	44
4	Sarana Motivasi untuk mendorong setiap Keluarga meningkatkan Tahap Kesejahteraannya serta sekaligus untuk merangsang kepedulian Keluarga-Keluarga yang sudah lebih mampu untuk bersama-sama mengangkat Tingkat Kesejahteraan Keluarga-Keluarga yang kurang mampu yang ada di Lingkungannya	-	29 (65,91 %)	15 (34,09 %)	44
5	Kepentingan Program Pembangunan Sektor-Sektor lain, salah satu diantaranya yang sangat penting adalah untuk Program-Program Pengentasan Masyarakat dari	-	44 (100%)	-	44

No	Jenis Pemanfaatan	Selalu dimanfaatkan	Kadang-kadang dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan sama sekali	Jumlah
	Kemiskinan atau dari Ketertinggalannya dalam berbagai Aspek Kehidupan				
6	Merencanakan, Memantau maupun menilai Program-program dukungan yang dilakukan terhadap suatu Wilayah atau suatu Kelompok Masyarakat disuatu Tingkat Wilayah tertentu	3 (6,82 %)	41 (93,18 %)	-	44

Sumber: Data Lapangan Diolah, Oktober 2009.

Menurut Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana ditunjukkan data pada tabel 4.22, Pemanfaatan Data Hasil Pendataan Keluarga oleh PKB di Kabupaten Sintang belum optimal. Hal ini disebabkan data tersebut jarang sekali di gunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan untuk kegiatan pengembangan program KB. Sedangkan pelaksanaan pemetaan dan pendataan keluarga terdiri dari Unsur-Unsur sebagai berikut :

Tabel 4.23. Pelaksanaan Pemetaan Dan Pendataan Keluarga Di Kabupaten Sintang

No	Kegiatan	Pihak-Pihak Yang Terlibat	Keterangan
1	Pelaksana Pengumpulan Data/Pewawancara	Terdiri dari para Kader Masyarakat, seperti Kader KB, Kader Posyandu, Kader Dasa Wisma/PKK, Karang Taruna, Saka Kencana/Pramuka dan Tokoh-Tokoh Masyarakat setempat	Belum melibatkan semua kader setempat

No	Kegiatan	Pihak-Pihak Yang Terlibat	Keterangan
2	Pembina Pengumpulan Data	Terdiri dari para Penyuluh KB/PLKB yang Membina RT, RW/Dusun, Desa/Kelurahan yang bersangkutan	Pembina Pengumpulan Data belum dapat menjangkau seluruh Desa
3	Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Tanggung jawab Pelaksanaan Pengumpulan Data berada pada para Ketua RT, Dusun/RW, dan para Kepala Desa/Kelurahan setempat	Ketua RT, Dusun/RW, dan para Kepala Desa/Kelurahan setempat belum dilibatkan
4	Pengawas Pengumpulan Data	Pengawas Pelaksanaan Pendataan Keluarga berada pada para Pengelola Program KB masing-masing Kecamatan	Pengawasan belum optimal
5	Petugas Pembuat Peta Keluarga	Pembuatan Peta Keluarga sesuai Hasil Pendataan dilakukan oleh PPKBD/Sub PPKBD dengan Bantuan para Kader Pendata dan dibawah Bimbingan Penyuluh KB/PLKB setempat	-
6	Pengelola Data	Data Hasil Pendataan Keluarga dikelola oleh Petugas-Petugas Jajaran BKKBN disetiap Tingkatan Wilayah	-

Sumber: Hasil Observasi, Oktober 2009.

Pelaksanaan Pemetaan Dan Pendataan Keluarga Di Kabupaten Sintang belum optimal. Hal ini disebabkan, jenis data tersebut sulit diperoleh oleh para kader serta blanko – blanko penyediaannya dari Kabupaten sering tidak disampaikan kepada PKB di lapangan.

Secara rinci Jenis dan Formulir yang digunakan dalam Pendataan Keluarga adalah sebagai berikut : Register Pendataan Keluarga (R/I/KS/05), Rekapitulasi Hasil

Pendataan Keluarga, Pengamatan Pendataan Keluarga dan Peta Keluarga. Register Pendataan Keluarga (R/I/KS/05) digunakan untuk mencatat secara lengkap Hasil

Pendataan Keluarga yang meliputi Demografi, Keluarga Berencana, Tahapan Keluarga Sejahtera serta Data Anggota Keluarga Hasil Pendataan Keluarga melalui Kunjungan dari Rumah ke Rumah. Register Pendataan Keluarga ini terdiri dari Lembar A, B dan C. Hasil Pendataan ini digunakan sebagai Sumber Data dalam Pembuatan Peta Keluarga, Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Dusun/RW, Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin.

Menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang, Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga terdiri dari beberapa macam sesuai dengan Tingkat Wilayah sebagai berikut . Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Dusun/RW (Rek.Dus.R/I/KS/05), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan (Rek.Des.R/I/KS/05), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Kec.R/I/KS/05), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.R/I/KS/05), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Provinsi (Rek.Prov.R/I/KS/05), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin tingkat Dusun/RW (Rek.Dus.R/I/KM/05).

Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin Tingkat Desa/Kelurahan (Rek.Des.R/I/KM/05), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin Tingkat Kecamatan

(Rek.Kec.R/I/KM/05), Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.R/I/KM/05) Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga serta Register Pendataan Keluarga Form C untuk Mendata Anggota Keluarga.

Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Dusun/RW (Rek.Dus.R/I/KS/05) berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Hasil Pendataan Keluarga menurut RT atau Wilayah yang setingkat, Laporan ini dibuat oleh Sub PPKBD berdasarkan R/I/KS/05. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan (Rek.Des.R/I/KS/05) berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Hasil Pendataan Keluarga menurut Dusun/RW atau Wilayah yang setingkat, Laporan ini dibuat oleh PPKBD berdasarkan Rek.Dus.R/I/KS/05. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Kec.R/I/KS/05) berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Hasil Pendataan Keluarga menurut Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan, Laporan ini dibuat oleh Pengelola Program KB Kecamatan berdasarkan Rek.Des.R/I/KS/05. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.R/I/KS/05) ini berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Hasil Pendataan Keluarga menurut Kecamatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Laporan ini dibuat oleh Pengelola Program KB Kabupaten/Kota berdasarkan Rek.Kec.R/I/KS/05.

Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Provinsi (Rek.Prov.R/I/KS/05) ini berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Hasil

Pendataan Keluarga menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan. Laporan ini dibuat oleh BKKBN Provinsi berdasarkan Rek.Kab.R/I/KS/05.

Rekapitulasi Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin Tingkat Dusun/RW (Rek.Dus.R/I/KM/05) berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin menurut RT atau Wilayah yang setingkat, Laporan ini dibuat oleh Sub PPKBD berdasarkan R/I/KS/05. Rekapitulasi Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin Tingkat Desa/Kelurahan (Rek.Des.R/I/KM/05) berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin di Tingkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan, Laporan ini dibuat oleh PPKBD berdasarkan Rek.Dus.R/I/KM/05. Rekapitulasi Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin Tingkat Kecamatan (Rek.Kec.R/I/KM/05) berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan, Laporan ini dibuat oleh Pengelola Program KB berdasarkan Rek.Des.R/I/KM/05.

Rekapitulasi Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.R/I/KM/05) berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Laporan ini dibuat oleh Pengelola Program KB Kabupaten/Kota berdasarkan Rek.Kec.R/I/KM/05. Rekapitulasi Pendataan Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin Tingkat Provinsi

(Rek.Prov.R/I/KM/05) berfungsi sebagai Sarana untuk Melaporkan Jumlah (Rekapitulasi) Keluarga Miskin dan Keluarga Hampir Miskin di Wilayah Provinsi yang bersangkutan, Laporan ini dibuat oleh BKKBN Provinsi berdasarkan Rek.Kab.R/I/KM/05.

Formulir Pengamatan Pendataan Keluarga terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: Formulir Pengamatan Pendataan Keluarga (LS.R/I/KS/05) dan Rekapitulasi Hasil Pengamatan Pendataan Keluarga (Rek.LS.R/I/KS/05). Formulir Pengamatan Pendataan Keluarga (LS.R/I/KS/05) digunakan untuk Mencatat Hasil Pengamatan terhadap Pelaksanaan dan Hasil Pelaksanaan Pendataan Keluarga. Formulir ini dibuat oleh Petugas yang melaksanakan Pengamatan, baik oleh Petugas di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Pengelola Program Tingkat Kecamatan. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Pendataan Keluarga (Rek.LS.R/I/KS/05). berfungsi sebagai Sarana untuk merekapitulasi Hasil Pengamatan Pendataan Keluarga, dibuat oleh Petugas yang melakukan Pengamatan berdasarkan LS.R/I/KS/05.

Berdasarkan peserta ber KB, Tahapan Keluarga Sejahtera masing-masing Keluarga, dibuat Peta di Tingkat RT, RW/Dusun. Pada masing-masing Peta ditempelkan Stiker berwarna sesuai dengan Tahapan Keluarga Sejahtera (Merah, Kuning, Coklat, Hijau, dan Biru) serta sesuai dengan Pemakaian Kontrasepsi dari masing-masing PUS pada Posisi Tempat Tinggal Keluarga yang bersangkutan didalam Peta tersebut. Peta tersebut dilengkapi dengan Tanda-Tanda Situasi Wilayah RT, RW/Dusun yang bersangkutan, misalnya Tempat Ibadah, Sungai, Jalan, dan Bangunan Penting lainnya. Peta tersebut ditempelkan di Rumah Ketua, RT, RW dan

Kepala Dusun, atau dapat pula ditempelkan di Kantor Desa, sehingga mudah dilihat dan dimanfaatkan untuk melakukan Dukungan Program oleh Pihak-Pihak yang bersangkutan.

3. Pandangan Informan Kunci Tentang Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang

Perubahan Visi Program KB Nasional dari Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) menjadi Menuju Keluarga Berkualitas 2015 serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Misi Program KB semakin luas. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, hasil wawancara peneliti dengan Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, kompetensi PKB dalam memahami visi dan misi sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya bervariasi. Artinya masih terdapat PKB yang belum dapat memahami secara utuh tentang visi dan misi Program KB Nasional.

Mengenai kompetensi PKB dilihat dari aspek jumlah kewenangan, yang telah diselesaikan dan aspek volume pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Koordinator PKB yaitu sebagai berikut:

“PKB di Kabupaten Sintang pada umumnya memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas-tugas menajerial dan pemerintahan yang dibebankan kepadanya. Sehingga, kewenangan pekerjaan yang diberikan juga dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Demikian pula dengan target dari volume pekerjaan, apakah itu pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek maupun pekerjaan dengan target jangka panjang, semuanya berjalan sesuai dengan perencanaan dan alhamdulillah tercapai, walaupun terdapat hal-hal yang mengganjal secara teknis, namun tidak berarti mengurangi penyelesaian volume pekerjaan”.

Menurut salah seorang Camat di Kabupaten Sintang:

“Volume pekerjaan yang dapat terselesaikan oleh PKB bisa dikatakan efektif, meskipun kalau kita bicara jujur atau dari segi ideal masih kurang. Sebagai contoh, volume pekerjaan yang dilakukan PKB dalam menangani administrasi bisa dikatakan efektif, namun ada tugas-tugas lain yang masih kurang, tergantung juga volume pekerjaan itu, jika dirasakan berat, mereka melakukannya secara berkelompok. Untuk kewenangan dibidang administrasi dan manajerial, dengan sendirinya akan melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, yang akhirnya secara bersama mencapai tujuan dan sasaran Program KB secara keseluruhan”.

Pencapaian hasil suatu pekerjaan dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai kinerja PKB dalam menjalankan kegiatan-kegiatan/program-program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Penyelesaian suatu pekerjaan tersebut tidak terlepas dari proses penyelesaiannya seperti kualitas, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh gambaran bahwa terdapat peningkatan kinerja PKB. Hal ini diketahui melalui wawancara peneliti dengan PKBI Kabupaten Sintang sebagai berikut:

“Peningkatan secara kualitas tetap dirasakan, walaupun tidak terlalu besar perubahan yang dirasakan dalam rutinitas administrasi sehari-hari. Paling tidak pegawai kita merasa ada peningkatan kualitas kerjanya, dan yang paling penting adalah menambah wawasan mereka. Tujuannya tentu agar mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas-tugas manajerial dan pemerintahan yang dibebankan kepadanya.”

Wawancara peneliti dengan Koordinator PKB menekankan kepada pentingnya evaluasi kinerja PKB. Menurut Koordinator PKB:

“Kita belum menetapkan indikator apa untuk menilai peningkatan kinerja PKB. Oleh karena itu, evaluasi kinerja secara rutin sangat penting dilakukan. Apakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PKB sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan?”.

Dari sisi kualitas kinerja PKB, diketahui bahwa pada umumnya ada peningkatan kualitas kinerja PKB. Namun demikian ada pula kepala bagian yang mengatakan bahwa mereka sulit memberikan penilaian apakah kualitas kinerja PKB meningkat atau belum, karena mereka tidak memahami indikator keberhasilan suatu pekerjaan. Dari keterangan itu diperoleh kesimpulan bahwa, setidaknya hasil minimal yang ditargetkan dalam tiap-tiap tugas sudah ada. Hal itu terlihat dari penilaian yang positif atas kinerja PKB di Kabupaten Sintang.

Kualitas kinerja seperti yang dikemukakan di atas, sangat berhubungan dengan tingkat kesalahan PKB menjalankan suatu pekerjaan. Oleh karena itu berdasarkan keterangan di atas bisa dikatakan bahwa, kesalahan yang dilakukan PKB di Kabupaten Sintang bisa dikatakan relatif kecil. Setidaknya hal itu bisa dikatakan sebagai hasil dari berbagai program pengembangan sumberdaya PKB yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

Unsur ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh atasan merupakan indikator penting guna mengetahui apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan berhasil atau sebaliknya. Sebab ketepatan waktu berhubungan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh program kerja maupun oleh atasan dalam suatu bagian.

Dalam menjalankan tugas-tugas Program KB Nasional yang dilakukan oleh PKB, unsur ketepatan dinilai secara beragam oleh masing-masing informan. Ada yang mengatakan bahwa ketepatan waktu harus disesuaikan dengan urgensinya, ada pula yang mengatakan bahwa ketepatan waktu dalam pekerjaan ini harus disesuaikan dengan sifat pekerjaan itu sendiri, yakni apakah berdimensi jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek.

Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang:

“Pada umumnya jika dilihat dari target kerja jangka pendek, maka tingkat ketepatan waktu itu sangat relatif dan sangat tergantung pada urgensinya. Hasil kerja selama ini sudah bisa diukur dengan mengetahui kesesuaian atas target yang ditentukan. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa umumnya tugas-tugas yang dilakukan oleh PKB sudah bisa dinilai efektif dan efisien, meski dilihat dari segi ideal masih kurang. Dan hal itu menurut saya merupakan sesuatu yang wajar”.

Dari pernyataan itu bisa diketahui bahwa, ketepatan waktu dalam menunaikan tugas memang sangat penting guna menjamin efektifitas dan efisiensinya. Tetapi, pandangan lainnya bisa saja berbeda. Melalui pengamatan peneliti bahwa ketepatan waktu PKB di Kabupaten Sintang masih tergolong rendah. Hal itu jika dilihat dari sisi bahwa target kerja yang dicanangkan masih belum mampu merangsang kreatifitas PKB untuk berinisiatif memajukan pekerjaannya sesuai dengan perubahan zaman.

Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang sendiri dalam wawancara yang sama mengatakan bahwa,

“Di lingkungan BKBPP Kabupaten Sintang, soal ketetapan waktu PKB itu tergantung dari klasifikasi pekerjaan yang akan diselesaikan, misalnya pekerjaan yang sudah terjadwal dapat diselesaikan tepat waktu. Tetapi kalau ada pekerjaan yang tidak jelas kapan waktu penyelesaian, maka tingkat

penyelesaiannya sering juga tidak tepat waktu. Namun tidak semua PKB berperilaku seperti itu, hanya sebagian saja”.

Keberhasilan seorang PKB dalam menjalankan tugasnya akan sangat berhubungan dengan pengetahuan atau wawasannya, baik pengetahuan atas pekerjaan itu sendiri yang paling utama, maupun pengetahuan dibidang-bidang yang lain. Jika pengetahuan seorang PKB terbatas, maka kemungkinan besar keberhasilan dalam melaksanakan tugas juga sangat minim, demikian pula sebaliknya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Petugas Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang

1. Kualitas Petugas

Kebijakan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Memantapkan Pengorganisasian Satuan Kerja bagi Pengembangan Jaringan Operasional dari Pusat sampai Desa/Kelurahan, Memantapkan Peran dan Kemandirian Pengelola dan Pelaksanaan Operasional baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat maupun Klien, Mengembangkan Ketentuan dan Standar Prosedur Operasional di Satuan Kerja masing-masing serta Mengoptimalkan Peran dan Fungsi PLKB/PKB dalam Operasional Program KB Nasional. Dari kebijakan tersebut Strategi yang dilakukan adalah: Mensosialisasikan pentingnya Mekanisme Pengelolaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Operasional, Meningkatkan Ketrampilan Pengelola dan Pelaksana dalam Kegiatan Operasional, Meningkatkan Kualitas Peran Pengelola dan Pelaksana dalam Kegiatan Operasional, Membentuk dan memanfaatkan Forum Pertemuan Tehnis dan

Manajerial bagi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Operasional, Mengembangkan Kemitraan dan Keterpaduan Operasional dengan Sektor lainnya serta Meningkatkan Mutu Pelayanan Program KB Nasional.

Guna melaksanakan kebijakan dan strategi tersebut, tentunya dibutuhkan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang berkualitas. Salah satu indikator untuk menunjukkan kualitas adalah melalui tingkat pendidikan formalnya. Adapun Tingkat Pendidikan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang.

Tabel 4.24. Tingkat Pendidikan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	4	9,09
4	Diploma	10	22,72
5	Sarjana	30	68,69
	Jumlah	44	100

Sumber: BKBPP Kabupaten Sintang, 2009.

Tingkat Pendidikan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang cukup memadai, karena sebagian besar berpendidikan sarjana. Namun demikian, sebagian besar Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada BKB Kabupaten Sintang belum pernah diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan mengenai penyusunan Pelaporan Program Keluarga Berencana.

2. Kuantitas Petugas

Selanjutnya, untuk mengetahui Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.25. Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah PKB
1	Sintang	15	4
2	Kelam Permai	16	3
3	Sepauk	33	5
4	Binjai Hulu	11	3
5	Tempunak	24	3
6	Sungai Tebelian	21	5
7	Ketungau Hilir	17	2
8	Ketungau Tengah	20	3
9	Ketungau Hulu	18	2
10	Dedai	20	4
11	Kayan Hilir	26	3
12	Kayan Hulu	29	3
13	Serawai	24	2
14	Ambalau	13	2
	Jumlah	287	44

Sumber: BKBPP Kabupaten Sintang, 2009.

Berdasarkan data pada Tabel disamping, dari sisi jumlah, keberadaan personil masih belum memadai. Rata-rata satu orang PKB harus menangani 4 – 7 Desa. Bahkan di Kecamatan Serawai satu orang PKB harus menangani 12 Desa.

3. Anggaran Serta Sarana Dan Prasarana

Menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang, dari aspek uang berkaitan dengan anggaran dan pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga. Dengan semakin

besarnya anggaran yang dimiliki akan mempengaruhi kegiatan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga itu sendiri. Semakin besar atau kecilnya anggaran akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya kegiatan-kegiatan kegiatan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga.

Tabel 4.26. Jumlah Anggaran Penunjang Kegiatan Pelaporan Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang Tahun 2008

No	Jenis Anggaran	Jumlah (Rp)	Prosentase
1	Belanja Barang (ATK, dll)	500.000.	25%
2	Belanja Pemeliharaan	500.000.	25%
3	Belanja Perjalanan	1.000.000.	50%
	Jumlah	2.000.000.	100%

Sumber: BKBPP Kabupaten Sintang, 2009.

Masih minimnya anggaran yang dimiliki oleh BKBPP Kabupaten Sintang sekarang ini terutama untuk pos Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan menyebabkan kurang maksimalnya dalam kegiatan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga. Secara keseluruhan keterbatasan sarana atau fasilitas, jelas merupakan faktor penghambat dalam kegiatan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga, sehingga belum terlaksana secara optimal.

4. Informasi Dan Metode

Dalam upaya menunjang keberhasilan Pelaksanaan Misi untuk mewujudkan Visi Keluarga berkualitas 2015, dilakukan metode sebagai berikut: Prinsip Integrasi, Prinsip Desentralisasi, Prinsip Pemberdayaan, Prinsip Kemitraan serta Prinsip

Segmentasi Sasaran. Prinsip Integrasi Dimaksudkan agar Pelaksanaan Program KB Nasional merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Program Pembangunan lainnya seperti Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial Budaya dan Teknologi. Hal ini sejalan dengan hakekat Program yang dimaksud untuk membangun Keluarga Sejahtera, maka Pelaksanaannya harus dilaksanakan secara Terpadu dengan Program Pembangunan lainnya, termasuk dengan berbagai Program Pembangunan yang menjadi Kewenangan Daerah, Strategi Integrasi tersebut meliputi :

1. Integrasi Konsep KB dalam Konsep Kesehatan Reproduksi Hak-Hak Reproduksi serta Kesenjangan dan Keadilan Gender.
2. Integrasi Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dengan Pelayanan KB dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Integrasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Program KB dan Kesehatan Reproduksi.
4. Integrasi Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB dengan Program Pengembangan Institusi Pelayanan Masyarakat lainnya.
5. Integrasi Program KB Pembangunan lainnya.

Prinsip Desentralisasi dimaksudkan untuk dapat memberikan Peluang dan Kesempatan Daerah dalam melaksanakan Program KB Nasional sesuai dengan Aspirasi dan Kondisi Sosial Budaya setempat. Strategi tersebut meliputi : Penegakan dan Jenis Peningkatan Kewenangan, Sistem dan Kebijakan Sumber Daya Manusia, Dukungan Infrastruktur Lintas Sektor, Mekanisme Pengendalian yang handal, serta Pendelegasian Operasional dengan Pendekatan Wilayah Paripurna. Prinsip

Pemberdayaan dimaksudkan untuk mengoptimalkan Potensi yang telah ada di Masyarakat untuk memberikan dukungan Pelaksanaan Program secara berdaya guna dan berhasil guna. Startegi Pemberdayaan tersebut mencakup: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelaksanaan Program KB Nasional, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemberdayaan Institusi Masyarakat dalam Program KB Nasional dan Pemberdayaan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga dan Individu dalam rangka meningkatkan Kemandirian, Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Program KB Nasional serta Pemantapan Jaringan Kerja Program KB Nasional.

Prinsip Kemitraan dimaksudkan untuk mengembangkan kerja sama yang didasarkan pada Kesetaraan, saling menguntungkan, tulus dan saling menghargai diantara Pihak-Pihak yang bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati. Strategi ini meliputi : Koordinasi dalam Kemitraan yang tulus dan setara, partisipasi Aktif Masyarakat serta Kerja sama Internasional. Prinsip Segmentasi Sasaran dimaksudkan untuk memberikan Fokus Sasaran Program agar Pelaksanaan dapat dilakukan secara Optimal, Efektif dan Efisien. Strategi ini meliputi: Keberpihakan kepada Keluarga rentan, Perhatian kepada Segmen Khusus, Data dan Informasi Keluarga serta Partisipasi Pria dalam rangka Kesetaraan dan Keadilan Gender.

5. Partisipasi Masyarakat

Salah satu Isu Strategi dan Tantangan yang paling utama bagi kelangsungan Program KB Nasional dan Kelembagaannya, adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, agar keseimbangan Pengelolaan Program dapat terjaga

dengan baik dari Pusat sampai Lini Lapangan, diperlukan adanya Sistem Pengelolaan Program KB Nasional sebagai acuan para Pengelola dalam Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Ruang lingkup partisipasi dalam Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang meliputi kesediaan masyarakat untuk memberikan sumbangan, kerelaan dan kesediaan membantu, kontrol/pengawasan masyarakat penilaian masyarakat guna mendukung pelaksanaan belum berjalan secara optimal. Jenis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang keaktifan masyarakat memberikan sumbangan berupa uang, keaktifan masyarakat menyumbangkan tenaganya, kesediaan masyarakat menyumbangkan alat-alat perlengkapan, serta kesediaan masyarakat memberikan tanggapan, pendapat, saran, pikiran, dan prakarsa dalam berbagai kegiatan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang yang paling tinggi adalah partisipasi dalam hal penyediaan tenaga.

Sementara itu, dari sisi waktu partisipasi ini belum begitu optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Jarak tempuh yang jauh, sementara fasilitas yang ada tidak memadai. Kesibukan Warga; berhubungan dengan Mata Pencarian Penduduk yang rata-rata adalah bertani, sebagian besar Penduduk pada Pagi hari bekerja di Kebun Karet, sementara pada Sore hari menggarap Ladang masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan memberi

tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang cukup tinggi. Hanya saja Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Prinsip Dasar Operasional Program KB Nasional didasarkan pada saling mengasihi, saling menyayangi serta saling membimbing dan membina diantara para Pengelola dan Masyarakat dengan semangat ingin selalu meningkatkan Pengetahuan masing-masing yang diwarnai dengan Kemitraan yang tinggi dan menjunjung tinggi Hak-Hak Klien. Pada Tahap Pengendalian Operasional, Pengelola Program Cek Ulang, baik pada Tingkat Perencanaan dan Pengorganisasian maupun Pelaksanaan Operasional agar Penyelenggaraan Operasional Program KB Nasional dapat mencapai Tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk memantapkan Mekanisme Pengelolaan Operasional diperlukan dukungan berbagai Pertemuan antara lain melalui Sarasehan. Sarasehan merupakan Forum Pertemuan yang membahas hasil Pendataan Keluarga untuk menetapkan Intervensi atau bentuk-bentuk Kegiatan yang diperlukan. Sarasehan ini dihadiri oleh berbagai Stake Holder baik Pemerintah maupun Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, yang ada di Wilayah yang bersangkutan. Hasil Sarasehan akan menjadi masukan bagi Pertemuan Teknis atau Rapat Koordinasi untuk mendapatkan dukungan Operasional yang lebih

besar (Komitmen, Dana, Sarana dan Pra Sarana). Sarasehan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan Kebutuhan Operasional di Wilayah masing-masing.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam melaksanakan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang belum berjalan secara optimal. Indikasi hal tersebut adalah:
 - a. Belum semua Peran Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kabupaten dapat dilaksanakan. Peran yang belum dapat dilaksanakan tersebut adalah belum dirumuskan Kebijakan Operasional, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan, serta Pemantauan dan Evaluasi Program KB Nasional Wilayah Kabupaten, belum menyelenggarakan dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB Nasional, belum membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial untuk Koordinasi Berkala yang membahas hasil Evaluasi guna penyempurnaan Rencana Operasional dan Penyegaran Kesepakatan Baru, serta belum mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan.
 - b. Di Tingkat Kecamatan belum menjabarkan dan memanfaatkan Operasional dan Pengendalian Operasional Bidang KB Wilayah Kecamatan, belum membentuk dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB, belum mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan Pelayanan Program

KB serta belum merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi.

- c. Di Tingkat Kelurahan/Desa, belum membentuk dan memanfaatkan Forum Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB, belum membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial Berkala (Rapat Koordinasi/Desa) yang membahas hasil Evaluasi, Penyempurnaan Rencana Operasional, serta Merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kabupaten Sintang, yaitu yang berkaitan dengan kualitas Petugas Lapangan Keluarga Berencana masih menghadapi masalah. Dari sisi jumlah, keberadaan personil masih belum memadai. Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada BKB Kabupaten Sintang yang bertugas membuat laporan masih sangat minim. Sedangkan dari aspek kualitas juga masih belum memadai. Sebagian besar Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada BKBPP Kabupaten Sintang belum pernah diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan mengenai penyusunan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru . Masih minimnya anggaran yang dimiliki oleh BKBPP Kabupaten Sintang sekarang ini terutama untuk pos Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan menyebabkan kurang maksimalnya dalam kegiatan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga. Secara keseluruhan keterbatasan sarana atau fasilitas, jelas merupakan faktor penghambat dalam kegiatan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas

Lapangan Keluarga, sehingga belum terlaksana secara optimal. Demikian pula dengan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

B. Saran

1. Upaya untuk mengoptimalkan kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), diharapkan Mekanisme Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB) di Kabupaten Sintang diharapkan dapat dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan RT, RW/Dusun, Desa dan Pemerintah Kecamatan.
2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana diharapkan diikutkan dalam kegiatan bimbingan teknis atau diklat mengenai penyusunan Pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru. Selain itu, kepada para petugas diberikan insentif dan biaya operasional serta sarana penunjang kerja lainnya.
3. Pemerintah Kabupaten Sintang diharapkan dapat merumuskan suatu kebijakan mengenai pengembangan karier PKB sebagaimana dengan tenaga fungsional lainnya seperti fungsional guru, fungsional kesehatan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amirudin, J. (2002). *Pelayanan Publik (Antara Harapan Warga dan Performance Kinerja pemerintah di Beberapa Kota di Indonesia)*. Jakarta: Jurnal PPSK.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ashari, E.T. (2003). *Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Era Persaingan Bebas*. Jakarta: Forum Inovasi UI.
- Badan Keluarga Berencana Nasional. (2006). *Pengelolaan Program Keluarga Berencana Era Baru* (tidak diterbitkan)
- Badan Kepegawaian Negara. (2001). *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Bappenas RI. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009* (tidak diterbitkan)
- Bappeda Kabupaten Sintang. (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang tahun 2006 – 2010*. (tidak diterbitkan)
- Diamar, S. (2003). *Beberapa Catatan Kunci Dimensi Politik Pelayanan Publik*. Jakarta: Forum Inovasi UI.
- Islamy, M.I. (1999). “*Profesionalisasi Pelayanan Publik*”. Makalah, disampaikan pada Pelatihan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Era Globalisasi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- Moenir, A.S. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Furhan, A. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Irawan. (2001). *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Islamy, M.I. (1988). *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Karunika UT.
- Mangkunegara, A.P. (2005). *Evaluasi Kinerja SDM*. Yogyakarta: BPFE.
- Ma'moeri, E. (2000). *Hubungan Kerja dan Koordinasi*. Bahan Diklat Adum. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Ma'moeri, E. (2001). *Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan*. Jakarta: LAN.

- Nasution, S. (1998). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Transito.
- Ndraha, T. (1987). *Partisipasi Masyarakat di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Pudiklatwas BPKP. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Departemen Keuangan RI.
- Sastropetro, R.A.S. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni: Bandung.
- Siagian, S.P. (1988). *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Suharto, E. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, P. (1999). *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta: LAN.
- Sutrisno. (2001). *Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Lembaga Administrasi RI.
- Soepodo, H. (2003). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta*. Jakarta: Forum Inovasi UI.
- Singarimbun, M. & Sofian Effendi. (Ed) (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Tayibnapis, B. (1995). *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- The Liang Gie. (1981). *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- The Liang Gie. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Thoha, M. (1992). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A.S. (1997). *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, A.S. (1998). *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif Dan Berkualitas*. Malang: PPSUB.
- Winardi. (1990). *Manajemen Perkantoran dan Pengawasan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Waworuntu. (1997). *Petunjuk Praktis Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Gramedia.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah kebijakan dan strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang?
2. Apa saja kebijakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang?
3. Bagaimanakah kompetensi PKB dilihat dari aspek jumlah kewenangan. yang telah diselesaikan dan aspek volume pekerjaan yang telah diselesaikan?
4. Bagaimanakah ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan PKB di Kabupaten Sintang?
5. Dilihat dari sisi bahwa target kerja yang dicanangkan apakah mampu merangsang kreatifitas PKB untuk berinisiatif memajukan pekerjaannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi?
6. Apakah terdapat peningkatan kinerja PKB di Kabupaten Sintang?
7. Menurut anda, apakah perlu dilakukan evaluasi kinerja PKB di Kabupaten Sintang?

KUESIONER

A. Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam melaksanakan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang

1. Bagaimanakah prosedur penyampaian data laporan pelaksanaan Keluarga Berencana Era Baru yang harus dibuat oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana?
 - a. Seluruhnya sudah dilaksanakan
 - b. Sebagian besar sudah dilaksanakan
 - c. Sebagian kecil saja yang baru terlaksana
 - d. Belum terlaksana sama sekali
2. Apakah laporan tersebut telah disampaikan seluruhnya kepada pihak yang berkepentingan?
 - a. Seluruhnya sudah disampaikan
 - b. Sebagian besar sudah disampaikan
 - c. Sebagian kecil saja yang baru disampaikan
 - d. Belum disampaikan sama sekali
3. Apakah seluruh jenis data laporan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Era Baru telah dibuat oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana?
 - a. Seluruhnya sudah dibuat
 - b. Sebagian besar sudah dibuat
 - c. Sebagian kecil saja yang baru dibuat
 - d. Belum dibuat sama sekali
4. Apakah data laporan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Era Baru yang harus dibuat oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana sudah memuat tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pengelolaan program Keluarga Berencana?
 - a. Seluruhnya sudah dimuat
 - b. Sebagian besar sudah dimuat
 - c. Sebagian kecil saja yang baru dimuat
 - d. Belum dimuat sama sekali
5. Apakah data laporan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Era Baru oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana sudah memuat Lampiran-lampiran?
 - a. Seluruhnya sudah dimuat
 - b. Sebagian besar sudah dimuat
 - c. Sebagian kecil saja yang baru dimuat
 - d. Belum dimuat sama sekali

6. Apakah data laporan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Era Baru oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana sudah disampaikan tepat waktu?
 - a. Seluruhnya sudah tepat waktu
 - b. Sebagian besar sudah tepat waktu
 - c. Sebagian kecil saja yang baru tepat waktu
 - d. Belum tepat waktu sama sekali
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang**
 1. Apakah jumlah petugas lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang sudah mencukupi?
 - a. Lebih dari cukup
 - b. Cukup
 - c. Tidak cukup
 2. Bagaimanakah rata-rata tingkat pendidikan petugas lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang?
 - a. Sangat memadai
 - b. Cukup memadai
 - c. Tidak memadai
 3. Bagaimanakah kemampuan petugas lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang dalam membuat laporan Program Keluarga Berencana Era Baru?
 - a. Sangat memadai
 - b. Cukup memadai
 - c. Tidak memadai
 4. Apakah kualitas petugas lapangan mempengaruhi pelaporan Program Keluarga Berencana Era Baru di Kabupaten Sintang?
 - a. Sangat mempengaruhi
 - b. Cukup mempengaruhi
 - c. Tidak mempengaruhi
 5. Apakah anggaran yang tersedia untuk mendukung penyusunan laporan Program Keluarga Berencana Era Baru di Kabupaten Sintang sudah memadai?
 - a. Sangat memadai
 - b. Cukup memadai
 - c. Tidak memadai
 6. Apakah telah tersedia informasi yang memadai mengenai penyusunan laporan Program Keluarga Berencana Era Baru di Kabupaten Sintang?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada

7. Apakah telah tersedia metode khusus mengenai penyusunan laporan Program Keluarga Berencana Era Baru di Kabupaten Sintang?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
8. Apakah pernah dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada petugas lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Sintang dalam membuat laporan Program Keluarga Berencana Era Baru?
 - a. Pernah dan sering
 - b. Pernah tapi jarang
 - c. Tidak pernah sama sekali
9. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan laporan Program Keluarga Berencana Era Baru di Kabupaten Sintang?
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL KUESIONER

A. Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang

1. Mekanisme Operasional Program KB Di Kabupaten Sintang

a. Tingkat Kabupaten

Peran Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kabupaten

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Rumusan Kebijakan Operasional, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan, serta Pemantauan dan Evaluasi Program KB Nasional Wilayah Kabupaten	20 (45,46 %)	24 (54,54 %)	44
2	Menyelenggarakan dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB	17 (38,64 %)	27 (61,36 %)	44
3	Membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial untuk Koordinasi Berkala yang membahas hasil Evaluasi guna penyempurnaan Rencana Operasional	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	44
4	Mengembangkan Forum dan Penyelenggaraan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	25 (56,82 %)	19 (43,18 %)	44
5	Menyelenggarakan Pelayanan Program KB	28 (63,64 %)	16 (36,36 %)	44
6	Menyiapkan atau membentuk Satuan Tugas Operasional, baik dalam bentuk Tim maupun Perseorangan bagi Pelaksanaan berbagai Kegiatan/Pelayanan untuk menggarap	35 (79,55 %)	24 (20,45 %)	44

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
	Wilayah Kabupaten			
7	Mengembangkan dan melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Strategis untuk menggerakkan Program Lintas Wilayah misalnya : Lomba, Penghargaan, Kegiatan Momentum dan Bakti Sosial dll	23 (52,27 %)	21 (47,73 %)	44
8	Mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan	12 (27,27 %)	24 (72,73 %)	44

b. Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Program KB Tingkat Kecamatan

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Menjabarkan dan memanfaatkan Operasional dan Pengendalian Operasional Bidang KB Wilayah Kecamatan	20 (45,46 %)	24 (54,54 %)	44
2	Membentuk dan memanfaatkan Forum Pertemuan Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	44
3	Membentuk atau memanfaatkan Forum (Manajerial Berkala Rapat Koordinasi/Konsultasi) yang membahas hasil Evaluasi, Penyempurnaan Rencana, Pelaksanaan dan Pengendalian Operasional	31 (70,46 %)	13 (29,54 %)	44
4	Mengembangkan forum dan penyelenggaraan advokasi dan penyelenggaraan KIE	29 (65,91 %)	15 (34,09 %)	44
5	Menyelenggarakan Pelayanan Program KB	28 (63,64 %)	16 (36,36 %)	44
6	Menyiapkan atau membentuk	31	13	44

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
	Satuan Tugas dalam bentuk Tim atau Perseorangan sebagai Pengelola/Pelaksana Operasional untuk menggarap Wilayah Kecamatan dibawah	(70,46 %)	(29,54 %)	
7	Mengembangkan dan memantapkan Pusat-Pusat Rujukan Pelayanan Program KB	12 (27,27 %)	32 (72,73 %)	44
8	Merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi	9 (20,46 %)	35 (79,54 %)	44

c. Tingkat Desa/Kelurahan

Penyelenggaraan Program KB Tingkat Desa/Kelurahan

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Menyiapkan dan membuat Rencana, Pelaksanaan dan Pengendalian Operasional meliputi Kesiapan Tenaga, Dana, Sarana dan Jadwal Kegiatan	34 (77,27 %)	10 (22,73 %)	44
2	Melaksanakan Kegiatan Operasional sesuai dengan Rencana	30 (68,18 %)	14 (31,82 %)	44
3	Membentuk dan memanfaatkan Forum Teknis Berkala yang membahas Tata Cara dan Teknis Operasional Program KB	11 (25,00 %)	33 (75,00 %)	44
4	Membentuk atau memanfaatkan Forum Manajerial Berkala (Rapat Koordinasi/Desa) yang membahas hasil Evaluasi, Penyempurnaan Rencana Operasional	11 (25,00 %)	33 (75,00 %)	44
5	Mengembangkan Forum dan melaksanakan Advokasi dan KIE serta	32 (72,73 %)	12 (27,27 %)	44
6	Pusat-Pusat Pelayanan Program KB	31 (70,45 %)	13 (29,55 %)	44
	Membentuk Satuan Tugas Operasional dalam bentuk Tim atau Perseorangan sebagai Pengelola/Pelaksana Program yang menggarap Desa/Kelurahan			

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
	kebawah			
7	Merujuk Kasus-Kasus yang tak tertangani ke tingkat lebih tinggi	9 (20,45 %)	35 (79,55 %)	44
8	Melakukan Pembinaan terhadap IMP dan Kader lain yang terkait	44 (100 %)	-	44

Pertemuan Koordinasi Teknis Kegiatan Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	7	15,91
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	30	68,18
3	Tidak pernah dilaksanakan	7	15,91
	Jumlah	44	100

Forum Pertemuan Koordinasi Manajemen Lintas Sektor

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	11	25,00
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	24	54,55
3	Tidak pernah dilaksanakan	9	20,45
	Jumlah	44	100

Tabel 4.6. Kegiatan Pengendalian Program KB

No	Kegiatan	Ada	Tidak ada	Jumlah
1	Pengawasan Melekat	7 (15,91 %)	37 (84,09 %)	44
2	Pembinaan Program, Ketenagaan, Dana, Sarana dan Pra Sarana dalam Operasional Program KB	44 (100%)	-	44
3	Pemantauan melalui Supervisi, Pencatatan dan Pelaporan	27 (61,36 %)	17 (38,64 %)	44
4	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Kegiatan yang dicapai sesuai dengan Rencana yang telah ditetapkan	35 (79,55 %)	9 (20,45 %)	44

Rapat Pimpinan Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	9	20,45
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	33	75,00
3	Tidak pernah dilaksanakan	2	4,55
	Jumlah	44	100

Rapat Koordinasi Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	7	15,91
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	29	65,91
3	Tidak pernah dilaksanakan	8	18,18
	Jumlah	44	100

Pertemuan Telaah Staf Paripurna Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	14	31,82
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	26	59,09
3	Tidak pernah dilaksanakan	4	9,09
	Jumlah	44	100

Pertemuan Teknis Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	30	68,18
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	12	27,27
3	Tidak pernah dilaksanakan	2	4,55
	Jumlah	44	100

Sarasehan Dalam Pengelolaan Operasional Program KB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	2	4,55
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	23	52,27
3	Tidak pernah dilaksanakan	19	43,18
	Jumlah	44	100

2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

a. Pencatatan Dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi

Penyediaan Data Bulanan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB

No	Jenis Data Bulanan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Keadaan Umum	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	-	44
2	Hasil Pelayanan Peserta KB Baru	23 (52,27 %)	21 (47,73 %)	-	44
3	Pelayanan Komplikasi, Kegagalan dan Pencabutan Implant	3 (6,82 %)	39 (88,64 %)	2 (4,54 %)	44
4	Persediaan Alat Kontrasepsi	3 (6,82 %)	39 (88,64 %)	2 (4,54 %)	44

Penyediaan Data Tahunan Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB

No	Jenis Data Tahunan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Jumlah Klinik KB menurut Status, menurut Klasifikasi dan menurut Kepemimpinan Klinik KB	-	31 (70,46 %)	13 (29,54 %)	44
2	Jumlah Petugas Klinik KB terdiri dari Dokter, Bidan, Paramedis Lain dan Tenaga Administrasi	2 (4,55 %)	34 (77,27 %)	8 (18,18 %)	44
3	Jumlah Petugas Klinik KB yang pernah dilatih mengenai IUD, MOW, MOP, Implant, KIP/Konseling serta Pencatatan dan Pelaporan	2 (4,55 %)	34 (77,27 %)	8 (18,18 %)	44
4	Sarana Perlengkapan Klinik KB	-	-	44 (100%)	44

Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pelayanan Kontrasepsi Oleh PKB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu tepat waktu	2	15,91
2	Kadang-kadang saja tepat waktu	27	61,36
3	Tidak pernah tepat waktu (terlambat)	10	22,73
	Jumlah	44	100

b. Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan

Penyediaan Data Bulanan Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB

No	Jenis Data Bulanan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Keadaan Umum	2 (4,55%)	42 (95,45%)	-	44
2	Kegiatan Operasional	-	44 (100%)	-	44
3	Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Kegiatan BKB, BKR, dan BKL	-	40 (90,91%)	4 (9,09%)	44
4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	-	44 (100%)	-	44
5	Pembinaan PUS dan Kesertaan ber KB	11 (25%)	33 (75%)	-	44

Penyediaan Data Tahunan Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB

No	Jenis Data Tahunan	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Data Cakupan Wilayah	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	-	44
2	Petugas Lapangan KB	44 (100 %)	-	-	44
3	Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB) dan Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	28 (63,64 %)	30 (36,36 %)	-	44
4	KB-Perusahaan	-	37 (84,09 %)	7 (15,91 %)	44
5	Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	-	28 (63,64 %)	30 (36,36 %)	44
6	Tempat Pelayanan Kontrasepsi Pemerintah dan Swasta	-	44 (100 %)	-	44

Frekuensi Penyampaian Data (Bulanan dan Tahunan) Pengendalian Lapangan Program KB Oleh PKB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu tepat waktu	2	4,55
2	Kadang-kadang saja tepat waktu	38	86,36
3	Tidak pernah tepat waktu (terlambat)	4	9,09
	Jumlah	44	100

c. Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan Keluarga

Penyediaan Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB

No	Jenis Data	Ada dan lengkap	Ada, tapi tidak lengkap	Tidak ada sama sekali	Jumlah
1	Aspek Demografi	16 (36,36 %)	28 (63,64 %)	-	44
2	Aspek Keluarga Berencana	16 (36,36 %)	28 (63,64 %)	-	44
3	Aspek Tahapan Keluarga Sejahtera	14 (31,82 %)	30 (68,18 %)	-	44
4	Aspek Anggota Keluarga	12 (27,27 %)	32 (72,73 %)	-	44
5	Status Keluarga dari Segi Kemiskinan	14 (31,82 %)	30 (63,64 %)	-	44

Frekuensi Penyampaian Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB Oleh PKB

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu tepat waktu	-	-
2	Kadang-kadang saja tepat waktu	-	-
3	Tidak pernah tepat waktu (terlambat)	44	100
	Jumlah	44	100

Pemanfaatan Data Hasil Pendataan Keluarga Oleh PKB

No	Jenis Pemanfaatan	Selalu dimanfaatkan	Kadang-kadang dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan sama sekali	Jumlah
1	Penentu Sasaran yang lebih tajam berdasarkan Kondisi, Potensi dan Kebutuhan Aktual dari masing-masing Keluarga yang ada disetiap Tingkatan Wilayah	3 (6,82 %)	37 (84,09 %)	4 (9,09 %)	44
2	Pembuatan Peta Keluarga berdasarkan Tingkat Kesertaan KB, Tingkat Pencapaian Tahapan Keluarga Sejahtera tiap Keluarga disuatu Wilayah tertentu	-	-	44 (100%)	44
3	Penentu Program Dukungan yang sesuai untuk setiap Keluarga dan setiap Wilayah tertentu di dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera	3 (6,82 %)	37 (84,09 %)	4 (9,09 %)	44
4	Sarana Motivasi untuk mendorong setiap Keluarga meningkatkan Tahap Kesejahteraannya serta sekaligus untuk merangsang kepedulian Keluarga-Keluarga yang sudah lebih mampu untuk bersama-sama mengangkat Tingkat Kesejahteraan Keluarga-Keluarga yang kurang mampu yang ada di Lingkungannya	-	29 (65,91 %)	15 (34,09 %)	44
5	Kepentingan Program Pembangunan Sektor-Sektor lain, salah satu diantaranya yang sangat penting adalah untuk Program-Program	-	44 (100%)	-	44

No	Jenis Pemanfaatan	Selalu dimanfaatkan	Kadang-kadang dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan sama sekali	Jumlah
	Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan atau dari Ketertinggalannya dalam berbagai Aspek Kehidupan				
6	Merencanakan, Memantau maupun menilai Program-Program dukungan yang dilakukan terhadap suatu Wilayah atau suatu Kelompok Masyarakat disuatu Tingkat Wilayah tertentu	3 (6,82 %)	41 (93,18 %)	-	44

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **WARNIDA**
NIM : **015283764**
Judul : **KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SINTANG**
Nama Yang : **Ulidal Muhtar (Camat Kayan Hilir)**
Diwawancara
Waktu wawancara : **Januari 2010**

Bagaimanakah kompetensi PKB dilihat dari aspek jumlah kewenangan. yang telah diselesaikan dan aspek volume pekerjaan yang telah diselesaikan?

Jawab:

Volume pekerjaan yang dapat terselesaikan oleh PKB bisa dikatakan efektif, meskipun kalau kita bicara jujur atau dari segi ideal masih kurang. Sebagai contoh, volume pekerjaan yang dilakukan PKB dalam menangani administrasi bisa dikatakan efektif, namun ada tugas-tugas lain yang masih kurang, tergantung juga volume pekerjaan itu, jika dirasakan berat, mereka melakukannya secara berkelompok. Untuk kewenangan dibidang administrasi dan manajerial, dengan sendirinya akan melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, yang akhirnya secara bersama mencapai tujuan dan sasaran Program KB secara keseluruhan".

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **WARNIDA**
NIM : **015283764**
Judul : **KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SINTANG**
Nama Yang : **Koordinator PKB dan PKBI Kabupaten Sintang**
Diwawancara
Waktu wawancara : **Januari 2010**

Apakah terdapat peningkatan kinerja PKB di Kabupaten Sintang?

Jawab:

Peningkatan secara kualitas tetap dirasakan, walaupun tidak terlalu besar perubahan yang dirasakan dalam rutinitas administrasi sehari-hari. Paling tidak pegawai kita merasa ada peningkatan kualitas kerjanya, dan yang paling penting adalah menambah wawasan mereka. Tujuannya tentu agar mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas-tugas manajerial dan pemerintahan yang dibebankan kepadanya.”

Menurut anda, apakah perlu dilakukan evaluasi kinerja PKB di Kabupaten Sintang?

Jawab:

Kita belum menetapkan indikator apa untuk menilai peningkatan kinerja PKB. Oleh karena itu, evaluasi kinerja secara rutin sangat penting dilakukan. Apakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PKB sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan?.”

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **WARNIDA**
NIM : **015283764**
Judul : **KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SINTANG**
Nama Yang : **Ir. Veronica Ancili (Kepala BKBPP Kabupaten Sintang)**
Diwawancara : **Sintang)**
Waktu wawancara : **Januari 2010**

Bagaimanakah kebijakan dan strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang?

Jawab:

Agar keseimbangan Pengelolaan Program dapat terjaga dengan baik dari Pusat sampai Lini Lapangan, diperlukan adanya Sistem Pengelolaan Program KB Nasional sebagai acuan para Pengelola dalam Pelaksanaan Program Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber-Sumber yang tersedia dalam rangka mencapai Tujuan Program KB Nasional secara berhasil guna dan berdaya guna disemua Tingkat Wilayah di Kabupaten Sintang khususnya. Selain mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber-Sumber yang tersedia dalam rangka mencapai Tujuan Program KB Nasional secara berhasil guna dan berdaya guna disemua Tingkat Wilayah di Kabupaten Sintang sebagaimana diungkapkan di atas, secara khusus tujuannya menurut Kepala BKBPP Kabupaten Sintang adalah: (1) Meningkatkan Keterlibatan dan Pemanfaatan berbagai Sumber Daya yang ada dalam Kegiatan Operasional, (2) Meningkatkan Pendayagunaan Sarana dan Prasarana yang ada dalam Kegiatan Operasional, (3) Meningkatkan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta, dan Masyarakat dalam Kegiatan Operasional, (4) Memanfaatkan dan mengoperasionalkan Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai Penggerak Program KB, (5) Memelihara kesinambungan dan keberlanjutan Kegiatan Operasional.

Apa saja kebijakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Sintang?

Jawab:

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan di atas, antara lain adalah: (1) Memantapkan Pengorganisasian Satuan Kerja bagi Pengembangan Jaringan Operasional dari Kabupaten sampai Desa/Kelurahan, (2) Memantapkan Peran dan Kemandirian Pengelola dan Pelaksanaan Operasional baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat maupun Klien, (3) Mengembangkan Ketentuan dan Standar Prosedur

Operasional di Satuan Kerja masing-masing, (4) Mengoptimalkan Peran dan Fungsi PLKB/PKB dalam Operasional Program KB. Adapun Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah: (1) Mensosialisasikan pentingnya Mekanisme Pengelolaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Operasional, (2) Meningkatkan Ketrampilan Pengelola dan Pelaksana dalam Kegiatan Operasional, (3) Meningkatkan Kualitas Peran Pengelola dan Pelaksana dalam Kegiatan Operasional, (4) Membentuk dan memanfaatkan Forum Pertemuan Tehnis dan Manajerial bagi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Operasional, (5) Mengembangkan Kemitraan dan Keterpaduan Operasional dengan Sektor lainnya, (6) Meningkatkan Mutu Pelayanan Program KB Nasional.

Bagaimanakah kompetensi PKB dilihat dari aspek jumlah kewenangan. yang telah diselesaikan dan aspek volume pekerjaan yang telah diselesaikan?

Jawab:

PKB di Kabupaten Sintang pada umumnya memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas-tugas manajerial dan pemerintahan yang dibebankan kepadanya. Sehingga, kewenangan pekerjaan yang diberikan juga dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Demikian pula dengan target dari volume pekerjaan, apakah itu pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek maupun pekerjaan dengan target jangka panjang, semuanya berjalan sesuai dengan perencanaan dan alhamdulillah tercapai, walaupun terdapat hal-hal yang menggagalkan secara teknis, namun tidak berarti mengurangi penyelesaian volume pekerjaan”.

Bagaimanakah ketepatan waktu penyelesaian pekerja PKB di Kabupaten Sintang?

Jawab:

Pada umumnya jika dilihat dari target kerja jangka pendek, maka tingkat ketepatan waktu itu sangat relatif dan sangat tergantung pada urgensinya. Hasil kerja selama ini sudah bisa diukur dengan mengetahui kesesuaian atas target yang ditentukan. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa umumnya tugas-tugas yang dilakukan oleh PKB sudah bisa dinilai efektif dan efisien, meski dilihat dari segi ideal masih kurang. Dan hal itu menurut saya merupakan sesuatu yang wajar”.

Dilihat dari sisi bahwa target kerja yang dicanangkan apakah mampu merangsang kreatifitas PKB untuk berinisiatif memajukan pekerjaannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi?

Jawab:

Di lingkungan BKBPP Kabupaten Sintang, soal ketetapan waktu PKB itu tergantung dari klasifikasi pekerjaan yang akan diselesaikan, misalnya pekerjaan yang sudah terjadwal dapat diselesaikan tepat waktu. Tetapi kalau ada pekerjaan yang tidak jelas kapan waktu penyelesaian, maka tingkat penyelesaiannya sering juga tidak tepat waktu. Namun tidak semua PKB berperilaku seperti itu, hanya sebagian saja”.